HARIAN UMUM NusaBali

Proyek Bendungan Sidan Resmi Digarap

Penggarapan Bendungan Tamblang di Buleleng Timur masih tunggu identifikasi peta bidang lahan yang dibebaskan

MANGUPURA, NusaBali

Pembangunan Bendungan Sidan di perbatasan tiga kabupaten: Badung, Bangli, dan Gianyar secara resmi dimulai, ditandai dengan ground breaking (peletakan batu pertama) yang akan dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster, Kamis (4/4) pagi ini. Proyek Bendungan Sidan yang bernilai Rp 786,32 miliar ini ditarget selesai tahun 2021 mendatang.

Acara ground breaking pembangunan Bendungan Sidan rencananya akan dilakukan Gubernur Koster di Desa Bilok Sidan, Kecamatan Petang, Badung, Kamis pagi ini pukul 09.00 Wita. "Ya, besok (hari ini) dilakukan ground breaking Bendungan Sidan oleh Gubernur Bali," ungkap Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida Direktorat Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Airlangga Mardjono, saat dikonfirmasi NusaBali, Rabu (3/4).

Secara umum, Bendungan Sidan yang merupakan proyek strategis pemerintah pusat, dibangun di atas lahan seluas

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Kamis, 4 April 2019
Hal : 1 dan 15

HARIAN UMUM NusaBali

Proyek Bendungan Sidan Resmi Digarap

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

82,73 hektaer di 5 desa bertetangga pada 3 kaupaten di Bali. Pertama, wilayah Desa Bilok Sidan, Kecamatan Petang, Badung. Kedua, wilauah Desa Buahan Kaja, Kecamatan Payangan, Gianyar. Ketiga, kawasan Desa Langgahan, Kecamatan Kintamani, Bangli. Keempat, kawasan Desa Mengani, Kecamatan Kintamani, Bangli. Kelima, kawasan Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Bangli.

Menurut Airlangga Mardjono, bagian terluas bangunan fisik Bendungan Sidan berada di Desa Belok Sidan, yakni mencapai 27,06 hektare. Sedangkan luas fisik bendungan di kawasan Desa Buahan Kaja mencapai 25,23 hektare. Menyusul kemudian di kawasan Desa Bunutin (luasnya mencapai 17,74 hektare), di Desa Mengani (seluas 15,89 hektare), dan di kawasan Desa Langgahan (hanya 0,77 hektare). "Untuk pembebasan lahan dilakukan secara simultan," tegas Airlangga.

Dikonfirmasi NusaBali terpisah, Rabu kemarin, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Bendungan BWS Bali Penida, I Gusti Putu Wandira, mengatakan pembebasan lahan bendungan sedang berproses. Menurut IGP Wandira, masalah harga lahan sudah masuk dalam penilaian harga dari Tim Appraisal (tim independen penaksir harga). "Tim Appraisal masih bekerja. Nanti setelah keluar berapa harga satuannya, akan kami sosialisasikan kembali kepada masyarakat," papar Wandira.

Meskipun pembebasan lahan masih berproses, kata Wandira, masyarakat setempat sudah memberikan izin pengerjaan Bendungan Sidan, khususnya untuk membuka akses jalan, sehingga memudahkan alat berat menjangkau lokasi. Akses jalan yang telah dibangun itu panjangnya mencapai 3 kilometer, dengan lebar 7 meter.

Akses jalan masuk menuju Bendungan Sidan itu dibuat dari jalur Banjar Selantang, Desa Bilok Sidan, Kecamatan Petang. Akses jalan menuju lokasi Bendungan Sidan tersebut sudah dimulai sejak November 2018 lalu.

"Sekarang akses jalan sudah terbuka menuju lokasi bendungan. Besok (hari ini) kami akan dilaksanakan peletakan batu pertama. Rencananya, Pak Gubernur Koster secara simbolis yang meletakkan batu pertama proyek Bendungan Sidan," tegas Wandira.

IST

Camat Petang Gede Eka Sudarwitha (3 dari kanan) tinjau persiapan ground breaking Bendungan Sidan, Rabu (3/4).

Bangunan fisik Bendungan Sidan berikut fasilitas pendukungnya dirancang dengan luas sekitar 42,36 hektare. Tinggi bangunan Bendungan Sidan mencapai sekitar 68 meter. Proyek bendungan senilai Rp 786,32 miliar ini dikerjakan oleh dua perusahaan, yakni PT Brantas Abipraya dan PT Universal Suryaprima.

Proyek Bendungan Sidan---yang berlokasi di sebelah barat laut Jembatan Tertinggi 'Asia' Tukad Bangkung---ditargetkan sudah selesai dibangun tahun 2021 mendatang. Nantinya, Bendungan Sidan diperkirakan mampu menampung air dengan volume 3,8 juta meter kubik. Air yang dialirkan ke Bendungan Sidan bumber dari Sungai Ayung.

Menurut Kepala BWS Bali Penida, Airlangga Mardjono, proyek Bendungan Sidan diproyeksikan mampu memasok air baku dengan debit sebesar 1.750 liter per detik ke wilayah Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar, dan Kota Denpasar. Tak hanya memasok air baku, air Bendungan Sidan juga bisa mengairi sawah di sejumlah kabupaten.

Selain itu, Bendungan Sidan juga potensial dijadikan sumber Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), yang mampu menghasilkan listrik sebesar 1,1 MW. Manfaat lainnya lagi, keberadaan Bendungan Sidan tentunya akan memperkuat sektor pariwisata, karena bisa menjadi objek wisata.

Selain Bendungan Sidan, pada saat hampir bersamaan juga dibangun Bendungan Tamblang di wialayah Buleleng Timur. Proyek Bendungan Tambang senilai Rp 700 miliar yang ditarget rampung tahun 2022 ini, dibangun di atas lahan seluas 58,79 hektare di empat desa bertetangga kawasan Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Sawan, Buleleng.

Keempat desa yang dijadikan areal Bendungan Tamblang tersebut, masing-masing Desa Bila (Kecamatan Kubutambahan), Desa Bontihing (Kecamatan Kubutambahan), Desa Sawan (Kecamatan Sawan), dan Desa Bebetin (Kecamatan Sawan). Dari luas lahan bendungan mencapai 58,79 hektare yang dibebaskan itu, terbanyak berada di Desa Sawan, Kecamatan Sawan seluas 38,59 hektare. Menyusul kemudian di Desa Bila (Kecamatan Kubutambahan) seluas 12,2 hektare, di Desa Bontihing (Kecamatan Kubutambahan) seluas, 6,49 hektare, dan di Desa Bebetin (Kecamatan Sawan) seluas 1,49 hektare.

Bendungan Tamblang dengan luas genangan 358.585 meter persegi dan tinggi mencapai 68 meter ini diperkirakan mampu menampung air hingga 7 juta meter kubik. Air yang dialirkan ke Bendungan Tamblang bersumber dari Tukad Daya di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan. Bendungan Tamblang diproyeksikan untuk penyediaan air baku dengan debit 510 liter per detik. Di samping itu, Bendungan Tamblang juga akan menjadi objek wisata dan airnya sekaligus untuk mengairi persawahan di dua kecamatan wilayah Buleleng Timur.

Sementara itu, penggaraopan Bendungan Tamblang di Buleleng Timur masih menunggu hasil indentifikasi berupa peta bidang lahan yang dibebaskan, dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Buleleng. Setelah data fisik diterbitkan, proses akan dilanjutkan dengan pembayaran ganti rugi atas lahan yang dibebaskan.

"Permohonan kami ke BPN sudah ditindaklanjuti. BPN sudah membentuk tim, mungkin pekan depan mereka sudah mulai bekerja. Harapan kami, dua pekan ke depan sudah ada hasil indentifikasi itu," terang Kasatker Bendungan BWS Bali Penida, I Gusti Putu Wandira, Rabu kemarin.

Ketika hasil indentifikasi sudah keluar lengkap dengan data fisik berupa peta bidang lahan yang dibebaskan, kata Wandira, maka proses berikutnya adalah penentuan nilai ganti rugi. Dalam tahap ini, BWS Bali Penida akan melibatkan tim appraisal untuk menilai harga ganti rugi yang layak terhadap lahan yang dibebaskan. "Apakah nanti menunjuk langsung tim appraisal atau ditenderkan, ini tergantung dari nilai kontraknya," tegas Wandira.

Disinggung hasil sosialisasi penetapan lokasi (Penlok) Bendungan Tamblang, menurut Wandira, selama ini tidak ada pemilik lahan yang mengajukan keberatan. Intinya, pemilik lahan sudah menyetujui lokasi pembangunan Bendungan Tamblang akan memanfaatkan lahan mereka. "Selama sosialisasi tidak ada yang keberatan, mereka sudah sepakat sebelumnya, kalau lahan miliknya akan dibebaskan untuk lokasi pembangunan Bendungan Tamblang," jelasya. **asa,k19**

Edisi : Kamis, 4 April 2019
Hal : 15 dan 15

RADAR BALI

POTENSI PETANI

Perbaiki Subak, Petani Pupuan Berutang

TABANAN - Dua saluran irigasi pertanian di Subak Yeh Tilung dan Subak Yeh Sangladan yang sebelumnya jebol akibat dari bencana tanah longsor di Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, Tabanan. akhirnya kini sudah dilakukan penanganan. Meski demikian penanganan masih dilakukan sementara oleh krama subak (petani) setempat dengan memasang pipa paralon, karena bantuan atau penanganan dari pemerintah daerah tak kunjung tiba. Mirisnya lagi untuk penanganan sementara saluran irigasi subak yang kondisi jebol akibat bencana alam dengan terpaksa para petani harus mengutang di salah satu toko bangunan setempat untuk pembelian pipa paralon dan alat lainnya. Kelian Dinas Banjar Bantiran, Desa Bantiran I Made Kartika Yasa mengatakan sementara dari sembilan titik yang terdampak tanah longsor beberapa waktu lalu tidak semuanya mampu tertangani. Karena keterbatasan alat dan biaya. "Khusus untuk rusak saluran irigasi di dua subak yakni Subak Yeh Tilung dan Subak Yeh Sangladan yang jebol. Kami (warga dan petani red) sudah lakukan gotong royong penanganan sementara dengan memasang pipa paralon," ujar Kelian Dinas Banjar Bantiran Rabu (3/4).

Lanjutnya, pembelian pipa paralon masyarakat harus membeli dengan berhutang di toko banguan. Dengan pembelian pipa sekitar Rp 4 Juta. Karena sembari menunggu bantuan atau penanganan dari pemerintah daerah tak kunjung direalisasikan. "Kami pun berniat melakukan pembangunan secara swadaya, meski harus berhutang," kata Kartika Yasa.

Kartika Yasa mengakui kerusakan dua saluran irigasi subak terjadi cukup parah. Karena kerusakan terjadi pada tempat masuknya air atau bendungan air dari sungai menuju irigasi. Dia berharap agar pemerintah bisa segera menindakanjuti permasalahan tersebut sehingga par petani setempat bisa beraktivitas normal kembali. "Apalagi saat ini akan memasuki musim tanam padi," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Penataan Kawasan Pemukiman, I Made Yudiana mengakui sudah menerima laporan terkait kerusakan tanggul pada Subak Saba di Bantiran, Pupuan. Untuk sementara warga subak setempat sudah melakukan penanganan sementara dan air saat ini sudah bisa mengalir. "Sudah dilakukan gotong royong oleh krama subak setempat. Mereka bergotong royong untuk perbaikan dan saat ini sudah mengalir," ujarnya. **(uli/rid)**

Edisi : Kamis, 4. April 2019

Hal : 7

Tribun-Bali

Bupati Tinjau Utilitas Terpadu Bawah Tanah di Basangkasa, Kuta

● Tahap Awal Target 10 KM

PEMERINTAH Kabupaten Badung dibawah kepemimpinan Bupati Giri Prasta dan Wabup. Suiasa sangat komit menata utilitas terpadu bawah tanah khususnya di wilayah Kuta. Komitmen ini telah diwujudkan dengan pembangunan terowongan utilitas bawah tanah secara bertahap. Guna memastikan proyek tersebut berjalan dengan baik, Selasa (2/4) lalu, Bupati bersama Wabup. langsung turun ke lapangan meninjau proyek utilitas terpadu bawah tanah di ruas jalan Br. Basangkasa hingga Br. Pering sepanjang 1,8 km.

Menurut Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung IB Surya Suamba, penataan perangkat (utilitas) kabel listrik dan kabel telekomunikasi yang tidak beraturan di kawasan Seminyak Kuta ini dananya dari anggaran APBD Badung tahun 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 28.417.174.892,-. Pembangunan utilitas diambil oleh Kontraktor PT. Trijaya Nasional dengan Konsultan PT. Kencana Adhi Karma. Pengerjaan dilaksanakan selama 240 hari dengan box utilitas menggunakan beton pracetak ukuran 150x180 cm. "Utilitas ini sudah selesai dikerjakan, dengan metode kerja (clean construction), mulai pukul 21.00 wita hingga 06.00 wita," terangnya.

Sementara Bupati Giri Prasta mengatakan, program ini telah masuk pada Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) berkenaan dengan utilitas terpadu bawah tanah. Bupati mempunyai prinsip menjaga keindahan, estetika dengan melakukan modernisasi ke bawah. Bupati menargetkan di wilayah Kuta dibangun utilitas terpadu bawah tanah sepanjang 10 km, mulai dari Seminyak-Legian dan Kuta. "Tahap awal kita lakukan 10 km dulu. Kenapa kita mulai dari Seminyak, karena konektifitas PLN yang di Sunset Road itu masuknya dari Seminyak," jelasnya.

Dengan pembangunam ini Bupati juga mengingin-

BUPATI Nyoman Giri Prasta dan Wabup. Ketut Suiasa meninjau proyek utilitas terpadu bawah tanah di ruas jalan Br. Basangkasa hingga Br. Pering, Selasa (2/4) lalu.

kan Dinas PUPR Badung dapat mentraining dirinya sendiri, mengkomunikasikan dengan pihak yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi kaitannya dengan MRT nanti. "Kami kira sama, tinggal cukup yang lebih besar lagi. Kita targetkan ini dulu, kita harus jaga dengan baik," terangnya. Cara kerja utilitas ini, mungkin masyarakat tidak mengetahui, karena dikerjakan pada malam hari, termasuk untuk perbaikan trotoar. Bupati juga memberi apresiasi kepada PLN, Telkom dan profider yang lain, diwajibkan utilitasnya agar diturunkan ke utilitas terpadu yang telah disiapkan. "Kami akan buatkan ketentuan, maksimal bulan Juni ini sudah selesai semua, kalau tidak kami akan cabut semua," tegasnya. **(adv)**

Edisi : Kamis, 4 April 2019

Hal : 6

Tribun-Bali

Krama Sampai Ngutang Beli Pipa

TABANAN, TRIBUN BALI - Dua tempek di Subak Yeh Sabha yang sebelumnya terdampak pada bencana yang terjadi di sembilan titik wilayah Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, Tabanan, saat ini sudah mendapat penanganan. Hanya saja penanganan dilakukan seadanya oleh krama subak setempat dengan memasang pipa paralon.

Ini mereka lakukan lantaran bantuan atau penanganan dari pemerintah tak kunjung datang. Bahkan Tempek Kilung Subak Saba terpaksa mengutang di sebuah toko bangunan untuk pembelian pipa paralon dan alat lainnya.

"Sementara dari sembilan titik beberapa waktu lalu yang terdampak sudah bisa ditangani namun belum 100 persen karena keterbatasan alat dan biaya. Khusus untuk amblas di Subak Saba Tempek Yeh Kilung kami gotong royong lakukan penanganan sementara dengan pipa paralon," ujar Kelian Dinas Banjar Bantiran, I Made Kartika Yasa, Rabu (3/4).

Kerusakan sebenarnya terjadi di dua tempek yakni Tempek Kilung dan Tempek Tangladan. Namun yang terjadi di Tempek Yeh Kilung cukup parah karena kerusakan terjadi pada tempat masuknya air atau bendungan air dari sungai menuju irigasi.

Selain itu, Pura Bedugul setempat juga sempat ikut longsor. Kemudian di Tempek Tangladan hanya mengalami kerusakan pada saluran air dan sudah ditangani warga setempat.

Karena kerusakan parah, warga setempat gotong royong melakukan perbaikan dengan menyalurkan air menggunakan pipa paralon. Ironisnya karena subak tak memiliki dana sepeser pun, untuk pembelian pipa paralon warga subak harus mengutang di toko bangunan sekitar Rp 4 Juta. Ini karena bantuan atau penanganan dari pemerintah tak kunjung direalisasikan.

Ia berharap agar pemerintah bisa segera menindakanjuti permasalahan tersebut sehingga par petani setempat bisa beraktivitas normal kembali. "Mau tidak mau kami harus melakuan perbaikan sementara agar petani bisa melakukan aktivitasnya. Karena jika menunggu perbaikan dari pemerintah akan lama, karena menurut informasi pemerintah akan melakukan penanganan dua tahun lagi," jelasnya.

Sebelumnya, hujan Deras yang mengguyur Tabanan Sabtu (23/3) memicu longsor di sembilan titik. Sembilan titik tersebut terjadi di wilayah Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan. Bahkan, dari titik tersebut juga mengakibatkan dapur dan merajan warga tergerus longsor dan sempat mengakibatkan arus lalu lintas Pupuan-Singaraja lumpuh selama tiga jam. **(mpa)**

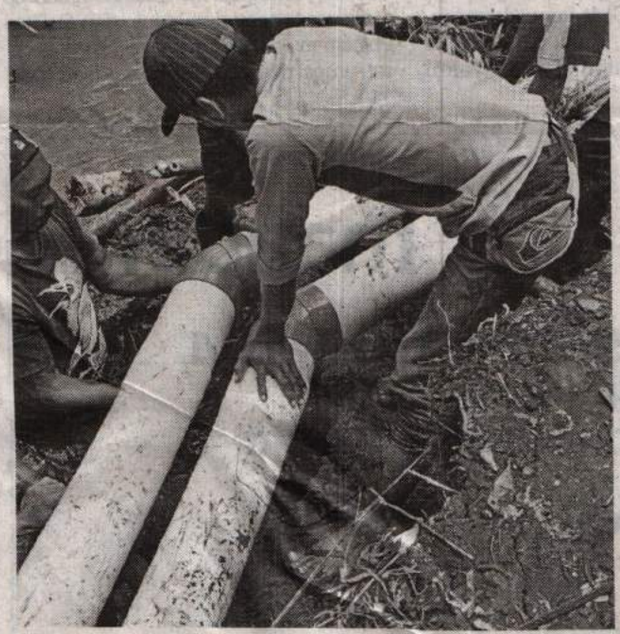

ISTIMEWA

PERBAIKAN - Suasana saat perbaikan tanggul dan saluran irigasi di Subak Saba Tempek Yeh Kilung oleh krama subak belum lama ini.

Edisi : Kamis, 4 April 2019

Hal : 4

RADAR BALI

Ladra Divonis Sambil Berdiri

- Diganjar 3,5 Tahun Penjara
- Dana LPD Dijadikan Bancakan Keluarga

DENPASAR– Kasus korupsi LPD Desa Kapal, Mengwi, Badung, dengan terdakwa I Made Ladra memasuki puncaknya di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin (2/4). Puluhan *krama* adat Kapal dengan pakaian madya yang penasaran dengan putusan hakim langsung menyerbu ruang sidang ■ ▸ *Baca* ***Ladra...*** *Hal 7*

ADRIAN SUWANTO / RADAR BALI

DISURUH BERDIRI : Made Ladra, terdakwa kasus korupsi LPD Desa Kapal, Mengwi, ini kemarin diminta berdiri saat hakim membacakan vonis hukuman 3,5 tahun penjara, denda Rp 500 juta, subsider 4 bulan penjara.

Edisi : Rabu, 3 April 2019

Hal : 1 dan 7

RADAR BALI

Uang Negara Rp 1,7 Miliar Harus Dikembalikan

■ LADRA...
Sambungan dari hal 1

"Pak Ladra, putusan mau saya bacakan. Silakan Anda berdiri," ujar Angeliky Handajani Day, saat membacakan amar putusannya. Ladra bergegas berdiri.

Mantan Ketua LPD Kapal, itu pun mengambil sikap sempurna. Dia harus mendengarkan vonis sambil berdiri. "Dengarkan baik-baik putusan kami," imbuh hakim.

Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Badung, yaitu pasal 3 *juncto* pasal 18 UU Tipikor *juncto* pasal 64 ayat (1) KUHP.

Perbuatan terdakwa merugikan negara, dalam hal ini keuangan LPD Kapal yang modalnya merupakan bantuan dari pemerintah. Sebelum menjatuhkan hukuman, hakim membacakan pertimbangan meringankan dan memberatkan. Pertimbangan meringankan terdakwa mengaku menyesal. Sedangkan pertimbangan yang memberatkan, terdakwa telah melakukan korupsi secara bersama sehingga merugikan keuangan negara.

"Mengadili, menjatuhkan pidana 3 tahun dan enam bulan (3,5 tahun) serta denda Rp 500 juta subsider 4 bulan penjara," tegas hakim. Terdakwa Ladra yang berdiri terus menunduk menatap lantai.

Hakim juga mewajibkan Ladra membayar uang pengganti kerugian negara Rp 1,7 miliar. Uang tersebut harus dibayarkan setelah sebulan keputusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Jika tidak membayar, maka harta bendanya dilelang untuk membayar uang pengganti. "Jika masih tidak cukup, maka diganti hukuman penjara dua tahun," tukas hakim yang karib disapa Kiki itu.

Usai membacakan putusan, hakim memberitahu terdakwa bahwa hukuman yang dijatuhkan bisa langsung diterima, pikir-pikir, atau banding. Terdakwa kemudian berdiskusi dengan penasihat hukumnya.

Cukup lama mereka berdiskusi. "Yang Mulia, melihat putusan yang baru saja dijatuhkan, kami harus musyawarah dengan keluarga besar terdakwa dulu. Putusan ini harus disampaikan pada keluarga besar terdakwa. Kami pikir-pikir," ujar penasihat hukum terdakwa.

Hakim memberi waktu tujuh hari untuk pikir-pikir. "Jangan lewat tujuh hari, *ya*. Kalau lewat kami anggap terdakwa menerima putusan di tingkat pertama ini," jelas Kiki.

Sikap serupa ditunjukkan JPU Agung. Agung menyatakan pikir-pikir. Sementara usai sidang, terdakwa langsung menyalami hakim.

Ladra diduga melakukan upaya memperkaya diri sendiri, orang lain, atau koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di sisi lain LPD yang dikelolanya bermodalkan dari APBD Badung dan donasi dari Pemprov. Dan pendirian LPD tersebut berdasarkan SK Gubernur Bali Nomor 151/1990 tentang Pendirian LPD.

Berdasar audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publik Sri Marmo dan selanjutnya diinvestigasi Tim Verifikasi dan Mediasi dengan metode *risk base audit*, menyimpulkan ada sebelas temuan prinsip yang mengakibatkan LPD Desa Kapal mati suri.

Di antaranya adanya permufakatan jahat dari pengurus LPD yang menikmati fasilitas kredit dalam jumlah yang sangat besar. Fasilitas itu diberikan untuk diri terdakwa sendiri, istri terdakwa, keluarga terdakwa, dan perusahaan terdakwa. Pemberian fasilitas kredit itu dilakukan dengan bunga di bawah standar yang berkisar antara 1,3 persen sampai 2,5 persen.

Temuan berikutnya menyangkut adanya *window dressing* (rekayasa pemberian kredit) kepada anggota keluarga Ni Luh Rai Kristianti (mantan kolektor LPD) sebesar Rp 8,5 miliar. Kredit tersebut diberikan dengan bunga di bawah standar. Yang minimal tiga persen, diberikan hanya satu persen. Hal itu merupakan pelanggaran BMPK atau Batas Maksimal Pemberian Kredit.

Pemberian kredit bernilai fantastis itu dilakukan terdakwa dengan persetujuan badan pengawas. Dan, untuk menghindari aturan BPMK, pemberian kredit tersebut diberikan kepada empat orang debitur yang terhitung masih anggota keluarga terdakwa. Pelunasan terhadap kredit sebesar Rp 8,5 miliar itu dilakukan terdakwa dengan menggunakan tabungan fiktif. **(san/pit)**

Edisi : Rabu, 3 April 2019
Hal : 1 dan 7

Bali Post

Dispar Cari Formula Kembangkan Desa Wisata

Mangupura (Bali Post) -

Sektor pariwisata menjadi ujung tombak pendapatan Kabupaten Badung. Tak salah jika pemerintah setempat melalui Dinas Pariwisata (Dispar) berupaya mencari formula guna menggali potensi yang ada. Salah satunya menggarap potensi desa wisata. Kadispar Badung I Made Badra mengatakan, setidaknya akan ada lima desa wisata yang akan dikembangkan pada 2019. Bahkan pihaknya akan melakukan kajian terhadap semua desa wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Badung.

"Kami masih melakukan kajian untuk pengembangan desa wisata yang ada di Kabupaten Badung. Pengembangan desa wisata akan dilakukan setelah dilakukan pengkajian terhadap desa wisata itu sendiri, sehingga desa wisata tidak monoton dengan desa wisata lainnya," ujar Made Badra, Senin (1/4) kemarin.

Sesuai Perbup Nomor 47 Tahun 2010, sebanyak 11 desa wisata telah ditetapkan yakni Desa Kerta, Desa Petang, Desa pangsan, Desa Belok Sidan, Desa Carangsari, Desa Sangeh, Desa Bongkasa Pertiwi, Desa Baha, Desa Munggu, Desa Mengwi dan Desa Kapal.

"Dalam menggali potensi desa wisata, kami melakukan tahap lelang jasa konsultansi perencanaan penataan 11 desa wisata di Kabupaten Badung. Jasa konsultasi ini dianggarkan sebesar Rp 1,1 miliar lebih," jelasnya.

Lebih jauh dijelaskan, jasa konsultasi perencanaan ini akan memaparkan potensi, perwajahan, roh serta kondisi fisik dari masing-masing desa wisata. Sehingga semua desa wisata yang ada di Kabupaten Badung benar-benar dioptimalkan. Konsultan akan membuat *masterplan* serta *detail engineering design* (DED).

"Semua kami gali potensinya, tapi sementara yang dikembangkan lima desa wisata sesuai arahan Bapak Bupati. Ini kami lakukan, agar potensi-potensi di setiap desa wisata kami ketahui," jelasnya.

Disinggung kapan akan dilakukan penataan pada desa wisata tersebut, pihaknya mengatakan setelah DED rampung. Setelah lima desa, barulah akan dilakukan penataan desa wisata yang lain. "Kami tidak mau bekerja satu-satu. Potensi kita gali semuanya, dikembangkan hanya lima. Sehingga tahun berikutnya ada anggaran kami hanya tinggal mengembangkan dan menatanya," katanya.

Seperti diketahui, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta meminta Dispar Badung untuk menata lima desa wisata yang ada di Kabupaten Badung. Kelima desa wisata tersebut yakni Desa Sangeh, Desa Pangsan, Desa Bongkasa Pertiwi, Desa Carangsari dan Desa Mengwi. **(kmb27)**

Edisi : Selasa, 2 april 2019

Hal : 3

HARIAN UMUM NusaBali

Dispar Gandeng Jasa Konsultansi untuk Gali Potensi Desa Wisata

MANGUPURA, NusaBali

Pemkab Badung saat ini telah memiliki 11 desa wisata yang ditetapkan melalui Perbup Nomor 47 Tahun 2010. Untuk upaya pengembangan, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung bakal melakukan penajaman potensi di masing-masing desa wisata tersebut, sehingga bisa lebih dikembangkan demi memikat wisatawan supaya mau datang berkunjung.

Berdasarkan Perbup Nomor 47 Tahun 2010, 11 desa wisata di Badung adalah Desa Kerta, Desa Petang, Desa Pangsan, Desa Belok Sidan, Desa Carangsari, Desa Sangeh, Desa Bongkasa Pertiwi, Desa Baha, Desa Munggu, Desa Mengwi, dan Desa Kapal. Penetapan ini dilakukan oleh Bupati Badung AA Gde Agung pada 15 September 2010.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung I Made Badra, mengatakan dalam upaya untuk mempertajam masing-masing desa perlu dilakukan kajian mendalam. Setelah ditemukan potensi yang bisa dikembangkan, barulah penataan akan dilakukan.

Menurut dia, pihaknya kini melakukan tahap lelang Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan 11 Desa Wisata di Kabupaten Badung. "Saat ini lelang sedang berlangsung, dan kami anggarkan untuk jasa konsultansi ini Rp 1,1 miliar," ungkap Badra, Senin (1/4).

11 Desa Wisata di Kabupaten Badung Berdasar Perbup Nomor 47 Tahun 2010

No	Desa	Kecamatan
1.	Kerta	Petang
2.	Petang	Petang
3.	Pangsan	Petang
4.	Belok Sidan	Petang
5.	Carangsari	Petang
6.	Sangeh	Abiansemal
7.	Bongkasa Pertiwi	Abiansemal
8.	Baha	Mengwi
9.	Munggu	Mengwi
10.	Mengwi	Mengwi
11.	Kapal	Mengwi

Birokrat asal Kuta ini menambahkan, penyedia jasa konsultansi ini akan menggali potensi serta perwajahan sesungguhnya dari 11 desa wisata yang ada sekarang. Pihak jasa konsultansi ini juga yang akan membuat masterplan serta detail engineering design (DED). "Kami tentu berharap melalui pengembangan ini, semua dewa wisata di Badung benar-benar optimal," tegasnya.

Kendati begitu, sesuai arahan Bupati, Dispar Badung akan fokus dulu menata lima desa wisata. Selebihnya menyusul secara bertahap. "Semua kami gali potensinya. Tapi sementara yang dikembangkan lima desa wisata sesuai arahan bapak bupati. Ini kami lakukan, agar potensi-potensi di setiap desa wisata kami ketahui," kata Badra. Lima desa wisata dimaksud adalah Desa Pangsan dan Desa Carangsari di Kecamatan Petang, serta Desa Bongkasar Pertiwi, Desa Baha, dan Desa Sangeh di Kecamatan Abiansemal.

Dalam beberapa kesempatan, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta meminta supaya Dinas Pariwisata menggali potensi desa wisata dengan n melibatkan seluruh komponen masyarakat. "Seluruh komponen masyarakat di desa harus mengetahui bagaimana gambaran konsep desa wisata ke depan," ujarnya.

Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Dinas LHK) pun harus dilibatkan dan saling mendukung. "Untuk taman telajakan menjadi tanggung jawab Dinas LHK, jalan dan drainase milik PUPR, jadi semuanya saling mendukung menjadi satu kesatuan," tegas Bupati Giri Prasta.

Bupati berjanji penataan desa wisata tidak berhenti hanya di lima desa wisata, tapi akan bertahap. "Tahun 2019 kita selesaikan lima desa wisata ini, selanjutnya tahun 2020 akan kita lanjutkan ke desa lainnya," tuturnya. asa

Edisi : Selasa, 2 April 2019
Hal : 2

Tribun-Bali

Desa Wajib Kembalikan Uang Karcis Rp 11 Miliar

GIANYAR, TRIBUN BALI – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gianyar akhirnya menyerahkan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) karcis masuk obyek wisata Tirta Empul, Tampaksiring, pada Inspektorat Pemkab Gianyar. Alasannya, pihak kepolisian tak menemukan adanya unsur pidana atau unsur memperkaya diri sendiri. Sebab, uang penjualan karcis senilai Rp 11 miliar yang tidak diserahkan Desa Pakraman Manukayalet ke kas Pemkab Gianyar, semua digunakan untuk kepentingan adat.

Kasatreskrim Polres Gianyar, AKP Deni Setiawan, Senin (1/4) mengatakan, keputusan itu diambil setelah kepolisian melakukan penyelidikan sekitar empat bulan.

Penyelidikan itu meliputi pemeriksaan berbagai saksi, mulai dari pihak Desa Pakraman Manukayalet, unsur terkait di Pemkab Gianyar, serta sejumlah saksi ahli. Juga mempertimbangkan hasil rapat kerja DPRD Bali tentang penanganan kasus

BERSAMBUNG ➔ HAL 7

OTT Tirta Empul beberapa waktu lalu.

"Hasil dari pemeriksaan kami terhadap saksi-saksi, bendesa, prajuru serta saksi-saksi lain, itu menjelaskan bahwa uang yang tak diserahkan ke Pemkab Gianyar dari tahun 2013 sampai 2018, semua digunakan untuk kepentingan desa adat, yaitu persembahyangan dan perbaikan pura. Karena memang kami tidak menemukan unsur memperkaya diri sendiri, jadi kasus ini kami limpahkan ke inspektorat. Surat pelimpahan telah diserahkan pada 26 Maret 2019 dan sudah diterima oleh kepala Inspektorat Gianyar," ujar Deni di ruang kerjanya kemarin.

Pelimpahan dari kasus pidana ke perdata ini, imbuh Deni, tak berarti Desa Pakraman Manukayalet terbebas dari tanggung jawab.

Meskipun uang penjualan karcis yang tak diserahkan ke Pemkab Gianyar ini dipakai untuk kepentingan adat, namun Desa Pakraman Manukayalet wajib mengembalikan semua uang tersebut. Sebab, perbaikan infrastruktur dan kepentingan adat semestinya menggunakan hasil dari uang bagi hasil pemungutan karcis. Dalam hal ini, Pemkab Gianyar mendapat bagian 60 persen, sementara Desa Manuakayalet sebesar 40 persen.

Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar, I Made Juanda membenarkan, pihaknya telah menerima surat pelimpahan OTT karcis Tirta Empul.

"Kemarin setelah dilakukan gelar perkara, oleh teman dari polres, jadi dilimpahkan ke inspektorat. Karena memang ada kesepakatan sejak awal dan juga dari Polda, untuk OTT Tampaksiring kan konsepnya pemulihan. Setoran berapapun yang ditemukan hasil audit, akan dikembalikan. Tidak melalui jalur pidana. Hasil penjualan karcis yang belum disetorkan ke kami ada Rp 11 miliar," jelas Juanda.

Saat ini, Inspektorat Kabupaten Gianyar hanya tinggal menunggu Desa Pakraman Manukayalet mengembalikan uang sesuai hasil audit itu.

Pihak inspektorat memberikan kebijakan, pengembalian uang ini bisa dicicil hanya saja tidak boleh melewati batas waktu 10 bulan.

"Pengembalian boleh dicicil, tapi paling lama 10 bulan lah," ujar Juanda.

Seandainya uang tersebut tidak dikembalikan, apakah kasus ini akan dikembalikan ke hukum pidana?

Juanda meyakini hal tersebut tak terjadi. Sebab sebelum kasus ini dilimpahkan ke inspektorat, Desa Pakraman Manukayalet telah menyepakati akan mengembalikan uang tersebut.

"Kan sudah ada semacam surat pernyataan, yang intinya desa pakraman akan mengembalikan sesuai dengan hasil audit inspektorat," ujarnya. **(weg)**

Edisi : Selasa, 2 April 2019
Hal : 1

Bali Post

Bantuan Komunal Banyak Disiasati Masyarakat

Mangupura (Bali Post) -

Kebijakan Pemkab Badung dalam upaya melestarikan seni, budaya dan agama yang berlandaskan *Tri Hita Karana*, banyak dimanfaatkan masyarakat. Salah satunya bantuan komunal yang bertujuan meringankan beban masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan adat dan keagamaan. Namun sayangnya banyak masyarakat yang justru menyiasati proposal permohonan bantuan agar mendapatkan bantuan lebih.

Parahnya, proposal yang diajukan seperti bantuan dana upacara agar masyarakat tidak lagi mengeluarkan urunan justru digelembungkan. Kepala Dinas Kebudayaan Ida Bagus Anom Bhasma tak menampik prihal tersebut. "Saya bingung ada proposal yang RAB-nya harga *pejati* Rp 2 juta, *bebangkit* Rp 40 juta. Apa itu kebo gulingnya?" ungkap Anom Bhasma di Wantilan Pura Petitenget, Minggu (31/3) lalu.

Kendati Bupati Badung Nyoman Giri Prasta telah menginstruksikan untuk membantu meringankan beban masyarakat, namun pihaknya berharap masyarakat tidak memanfaatkan kebijakan tersebut sebagai peluang mendapatkan bantuan lebih. "Bapak Bupati memang menginstruksikan kepada saya untuk membantu masyarakat yang melaksanakan upacara, namun bukan berarti semua dibebankan ke pemerintah," ujarnya.

Tak hanya itu, sejumlah masyarakat juga memanfaatkan bantuan pembangunan pura sehingga pihaknya terpaksa menghentikan sementara penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk *paibon*, *pasimpangan*, *merajan ageng*, dan *merajan alit*. "Karena selama ini banyak yang mencari Surat Keterangan Terdaftar, bahkan satu pura diajukan empat untuk mendapatkan bantuan lebih, jadi kami harus mendata ulang lagi. Saya takutnya ketika diberikan nanti harus mengembalikan lagi," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dinas Kebudayaan Badung telah menerbitkan SKT untuk 5.533 pura. Penerbitan SKT ini berdasarkan status pura. SKT adalah untuk pura berstatus Sad Kahyangan, Dang Kahyangan, Kahyangan Jagat, Kahyangan Tiga, Paibon, Pemaksan (*dadia, panti, kawitan*), Kahyangan Desa, dan Swagina. Dari angka tersebut, yang paling banyak didaftarkan adalah pura *pemaksan* yang mencapai 2.170 pura. Kemudian pura *swagina* sebanyak 1.219 pura, *paibon* sebanyak 988 pura, Kahyangan Desa 729 pura, Kahyangan Tiga 392 pura, Kahyangan Jagat 28 pura, Dang Kahyangan lima pura, dan Sad Kahyangan sebanyak dua pura. **(kmb27)**

Edisi : Selasa, 2 April 2019
Hal : 3

Bali Post

Kasus OTT Tirta Empul Dilimpahkan ke Inspektorat

Dikonfirmasi Senin (1/4) kemarin, Kasat Reskrim Polres Gianyar AKP Deni Septiawan menerangkan, kasus OTT Pura Tirta Empul saat ini dilimpahkan ke Inspektorat Kabupaten Gianyar, karena berdasarkan hasil gelar perkara hanya terindikasi terkena sanksi administrasi. Dikatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan uang yang digunakan untuk memperkaya seseorang. Bahkan, diakuinya, semua digunakan untuk kepentingan persembahyangan dan perbaikan pura. "Hasil pemeriksaan kami dengan saksi, *prajuru*, dan bendesa, uang pungutan itu sejak 2013 sampai 2018, semua digunakan untuk kepentingan desa dan tidak ditemukan untuk keuntungan pribadi maupun memperkaya diri, sehingga kami limpahkan ke Inspektorat dengan nomor surat 103 pada 26 Maret 2019," ujarnya.

Deni Septiawan mengatakan, yang mendasari dalam penanganan kasus itu adalah perjanjian kerja sama Mendagri dengan Kejaksaan bersama pihak Kepolisian. Selanjutnya, berdasarkan hasil rapat kerja antara Polda Bali dan DPRD Provinsi Bali di Renon merekomendasikan kepolisian untuk memberikan tindakan persuasif. "Melakukan tindakan persuasif, sepanjang sesuai *awig-awig*, *pararem* dan keputusan desa pakraman. Atas dasar itu pula, maka penanganan kasus Tirta Empul ini dibawa ke Inspektorat," jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Inspektur Inspektorat Kabupaten Gianyar I Made Juanda menjelaskan, sesuai kesepakatan awal OTT Tirta Empul konsepnya pemulihan. Yakni dengan menghitung jumlah setoran yang ditemukan dan yang akan dikembalikan, sehingga tidak menggunakan jalur hukum atau pidana. "Yang jelas terdapat Rp 11 miliar. Sudah dilakukan gelar perkara, namun sekarang konsepnya pemulihan dan tidak diteruskan ke pengadilan," terangnya.

Juanda menambahkan, jumlah uang Rp 11 miliar itu merupakan hasil pemeriksaan uang karcis sejak 2013 sampai 2018. Total uang itu digunakan sebagai perbaikan pura dan persembahyangan. "Memang di sana Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar melakukan kerja sama dengan masyarakat. Khususnya desa pakraman, bahwa ada pemungutan karcis oleh desa pakraman pada pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 Wita. Pembagiannya 40 persen desa pakraman dan 60 persen ke Pemkab. Sesuai surat pernyataan bahwa desa pakraman akan mengembalikan sesuai hasil audit Inspektorat dan pengembaliannya sesuai kesepakatan, dicicil berapa bulan atau gimana," katanya.

Ketua Gappar Kabupaten Gianyar Ngakan Made Rai menilai ada sejumlah keanehan dalam kasus ini. Apalagi dari Pemkab Gianyar melalui Inspektorat telah menghitung kerugian negara yang berjumlah mencapai Rp 11 miliar. Maka dari itu, Gappar membawa kasus itu kepada Kejari Gianyar, Jumat (29/3) lalu. "Kami harap Kejaksaan bisa menangani kasus OTT tersebut," pintanya.

Surat tersebut ditembuskan ke Kejaksaan Tinggi Bali dan Kapolda Bali. Dalam surat itu berisi satu paragraf. "Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi adalah sudah komitmen bagi bangsa ini. Untuk itu kami melaporkan kasus OTT Tirta Empul yang jelas-jelas merugikan keuangan daerah yang jumlahnya begitu fantastis (Rp 11 miliar) hasil audit. Tapi hanya cukup dengan pengembalian uang dan kasusnya dianggap selesai. Maka kami menunggu tindak lanjut secepatnya". Pihaknya berharap kepada Kejari Gianyar, apabila ada laporan dari masyarakat, laporan dugaan pidana korupsi, tidak usah mempertimbangkan pemilu maka ditunda. "Hukum tidak ada kaitannya dengan politik," tegasnya.

Ngakan Rai berjanji siap membantu Kejari maupun instansi hukum lainnya untuk penggalian data. "Kami siap membantu untuk memberikan data mengenai adanya kejanggalan-kejanggalan di Kabupaten Gianyar," ujarnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Gusti Agung Puger belum bisa memberikan komentar mengenai surat dari Gappar tersebut. Terlebih kasus OTT itu ditangani oleh Polres Gianyar. **(kmb35)**

Edisi : Selasa, 2 April 2019

Hal : 9

Bali Post

Tercecer, 85 Subak Belum Dapat Bantuan Provinsi

Bangli (Bali Post) –

Sebanyak 85 subak di Kabupaten Bangli belum mendapat bantuan dana dari Provinsi Bali. Selain subak, satu desa pakraman juga mengalami nasib serupa. Kenyataan itu diungkapkan langsung Bupati Bangli I Made Gianyar saat acara tatap muka Gubernur Bali bersama seluruh komponen masyarakat Bangli di Wantilan Desa Adat Penglipuran, Minggu (31/3) lalu.

Made Gianyar mengatakan, banyaknya subak yang tak mendapat bantuan karena adanya kesalahan pada pendataan, sehingga menyebabkan puluhan subak itu tercecer. "Di Bangli saat ini sudah ada 318 subak yang mendapat bantuan dari Provinsi. Tapi masih ada 85 subak yang tercecer, belum dapat bantuan," terangnya.

Sementara satu desa pakraman yang disebutnya belum terdaftar untuk mendapat bantuan yakni desa, Pakraman Peradi Juntal. Desa pakraman itu tercecer karena lokasinya berada di balik bukit. "Karena di balik bukit, tidak dapat informasi sehingga tidak didaftarkan," ujarnya.

Made Gianyar mengatakan, untuk memberikan bantuan terhadap puluhan subak yang tercecer itu, Pemkab Bangli selama ini terpaksa menganggarkan dana bantuan dari APBD Bangli senilai Rp 50 juta untuk masing-masing subak. Menurut Made Gianyar, jika saja puluhan subak dan satu desa pakraman itu bisa masuk dalam data penerima bantuan pemerintah provinsi, maka tentu akan sangat meringanan beban APBD Bangli. "Karena itu melalui kesempatan ini, saya akan menyerahkan dua dokumen usulan kepada Bapak Gubernur. Kalau ini bisa diterima Provinsi, tentunya akan meringankan beban APBD Bangli yang sudah kecil," harapnya.

Menanggapi pernyataan Bupati Made Gianyar, Gubernur Bali Wayan Koster dalam kesempatan tersebut meminta Pemkab Bangli agar secepatnya mengajukan usulan pemberian bantuan untuk subak dan desa pakraman yang tercecer itu. Sehingga bisa segera dianggarkan pemerintah Provinsi Bali. Koster kala itu sempat memuji keberadaan subak di Kabupaten Bangli karena jumlahnya yang masih banyak dan lestari. Dia membandingkan dengan subak di kabupaten lainnya yang kini mulai berkurang akibat alih fungsi lahan. **(kmb40)**

Edisi : Selasa, 2 April 2019

Hal : 19

RADAR BALI

BEDAH RUMAH

Belasan Desa Belum Setor Data, Bupati Ancam Tinggal

SEMARAPURA- Belasan desa di Kabupaten Klungkung hingga saat ini belum menyetorkan jumlah rumah tidak layak huni. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta akhirnya memberikan *deadline* seminggu. Suwirta saat ditemui kemarin mengatakan, Pemkab Klungkung akan menuntaskan bedah rumah tidak layak huni tahun 2020. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp 10 miliar lebih. "Kalau membutuhkan anggaran Rp 10 miliar pun akan kami tuntaskan. Saya akan minta untuk menyisihkan pekerjaan yang lain dulu. Karena ini kebutuhan dasar *kan*. Jangan sampai kami mengambil pekerjaan setengah-setengah untuk orang kurang mampu. Untuk orang kurang mampu tidak boleh ditunda," kata Suwirta kemarin (1/4).

Bupati menambahkan, dia masih mendengar ada desa yang belum mengumpulkan data jumlah rumah tidak layak huni masyarakat Klungkung berpenghasilan rendah. Padahal, sudah melewati batas waktu pengumpulan data. Menurutnya, pihak desa sudah kerap diwanti-wanti. Bahkan secara resmi melalui surat telah diminta untuk mengumpulkan data tersebut paling lambat akhir Maret. Hanya saja sampai awal April ini, masih saja ada desa yang belum menyetorkan data yang diminta. "Kami akan tunggu hingga minggu pertama bulan April. Kalau masih ada yang belum menyetor, maka kami tinggal. Ini terlihat bahwa tidak semua desa mempunyai respons yang cepat terhadap masalah yang dihadapi masyarakatnya. Padahal kabupaten yang akan menyelesaikan semua. Sebenarnya data ini satu hari saja bisa selesai *kok*," ucapnya.

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Wayan Wirata menambahkan dari total 59 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Klungkung sebanyak 19 desa belum mengumpulkan data jumlah rumah tidak layak huni. Belasan desa tersebut tersebar di Kecamatan Nusa Penida sebanyak sembilan desa, Kecamatan Klungkung lima desa, Kecamatan Dawan tiga desa, dan Kecamatan Banjarangkan sebanyak dua desa. "Sementara total usulan yang telah masuk namun belum diverifikasi sesuai dengan kriteria sebanyak 1.182 unit usulan bedah rumah, dan 2.733 unit usulan rehab rumah," bebernya.

Terkait dengan desa-desa yang belum menyetorkan data, pihaknya mengaku telah menghubungi desa-desa tersebut, baik lewat telepon, WhatsApp maupun secara langsung. "Saat kami hubungi, katanya masih menunggu data yang dikirim kepala dusun. Sementara kepala dusunnya menyatakan di bawah masih banyak ada upacara dan kesibukan. Tapi kami sudah minta biar segera mengirim dan besok akan kami surati," tandasnya. **(ayu/dot)**

Edisi : Selasa, 2 April 2019

Hal : 2

Radar Bali

BPKP Dan Inspektorat Gelar Workshop Tata Kelola Keuangan Desa

NEGARA –Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah pusat selama 4 tahun terakhir ini mengalami peningkatan cukup signifikan. Namun niat baik pemerintah untuk memajukan pembangunan di desa khususnya meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakat desa ternyata masih dinodai oleh ulah segelintir oknum perangkat desa.

Pasalnya, DD yang digunakan berdasarkan aturan dan ketentuan yang jelas ternyata masih ada perangkat desa di Bali yang memanfaatkan tidak sesuai aturan dan ketentuan.

Itu diungkapkan Kasubdit 3/Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bali, Ida PutuWedanajati, SH, MH selaku Narasumber mengawali pemaparannya pada *workshop* Tata Kelola Keuangan Desa, Senin (1/4).

Dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat 4 tahun trakhir jumlahnya terus meningkat sangat signifikan. Tahun 2015 sebesar Rp.20,67 triliiun, tahun 2016 sebesar Rp. 46,98 triliun, tahun 2017 dan tahun 2018 naik menjadi Rp. 60 triliun dan untuk tahun 2019 Rp. 70 triliun." Kedepan, agar benar-benar peruntukaanya sesuai aturan dan ketentuan yang ada maka penggunaan dana desa perlu dikawal, didampingi sehingga pemanfaatannya yang difokuskan untuk mengurangi kemiskinan, mengembangkan ekonomi produktif serta menggerakkan industri kecil pedesaan dapat terlealisasi dengan baik tanpa ada penyimpangan, " ujarnya.

Sementara Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmanto, mengaku *workshop* yang digelarnya itu untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan perangkat desa dalam tata kelola Siskeudes. "Saat ini kemampuan perangkat desa khususnya SDM sangat berbeda-beda. Sementara dana yang dikucurkan pemerintah pusat ke desa sangat besar. Untuk menghindari penyimpangan dari ketentuan dan aturan yang ada, kita kekerjasama dengan Inspektorat Jembrana untuk melakukan pengawalan dan pengawasan secara kontinyu. Ini dimaksudkan agar dikemudian hari tidak ada perangkat desa yang terjerat kasus-kasus hukum akibat dari penyalahgunaan pemanfaatan anggaran di desa," tegasnya.

Sementara Bupati Artha dalam sambutannya dibacakan Asisten II, IGN. Sumber Wijaya, di hadapan narasumber dari DPR RI, Komisi XI, I Gusti Agung Rai Wirajaya, minta agar perangkat desa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki termasuk dalam mengelola keuangan dan kekayaan milik desa. "Selain dana desa, juga desa mengelola keuangan yang bersumber dari PAD, pendapatan transfer lainnya berupa alokasi dana desa(ADD), bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten serta bantuan keuangan dari APBD Propinsi dan kabupaten. Ini memerlukan tanggung jawab yang cukup besar. Hal ini dimaksudkan agar dana yang besar itu tidak sampai menjadi bencana terutama bagi aparatur pemerintah desa," pungkasnya.(**adv/nom**)

Edisi : Selasa, 2 April 2019

Hal : 5

RADAR BALI

OTT Tirta Empul Dibawa ke Kejari

Setelah Kasusnya Tak Dilanjutkan Polres

GIANYAR-Ketua Garda Pejuang Penerus Aspirasi Rakyat (Garppar) Gianyar, Ngakan Made Rai mengirimkan surat ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar untuk menindaklanjuti kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tirta Empul. Pasalnya, kasus yang awalnya ditangani Polres Gianyar itu hanya diminta mengembalikan kerugian negara. "Bagi saya, kasus (OTT Tirta Empul) ini, aneh. Padahal banyak kasus temuan dan pengembalian, tapi kasus tetap berlanjut. Contoh kasus LPD, kasus Perjalanan Dinas (Perdin, Red) dan lain-lain. Itu ada kerugian negara. Sekalipun pelakunya mengembalikan uang negara, pelakunya tetap diproses," ujar Ngakan Rai, kemarin (1/4).

Ngakan mengatakan dari Pemkab Gianyar melalui Inspektorat telah menghitung kerugian negara mencapai Rp 11 miliar. Menurutnya, Gappar membawa kasus OTT tersebut ke Kejari Gianyar pada Jumat lalu (29/3). "Kami harap Kejaksaan bisa menangani kasus OTT tersebut," ucapnya.

Surat tersebut ditembuskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Tinggi Bali dan Kapolda Bali. Dalam surat tersebut, Garppar mendorong penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Sebab itu adalah komitmen bangsa. " Untuk itu kami melaporkan kasus OTT Tirta Empul yang jelas-jelas merugikan keuangan daerah yang jumlahnya begitu fantastis (Rp 11 miliar) hasil audit. Namun, kasusnya tak dilanjutkan. Cukup dengan pengembalian uang dan kasusnya dianggap selesai. Maka kami menunggu tindak lanjut secepatnya. Saya mengimbau kepada Kejari Gianyar, apabila ada laporan dari masyarakat, laporan dugaan pidana korupsi tidak usah mempertimbangkan pemilu maka ditunda. Hukum tidak ada kaitannya dengan politik," sambungnya.

> **Bagi saya, kasus (OTT Tirta Empul) ini, aneh. Padahal banyak kasus temuan dan pengembalian, tapi kasus tetap berlanjut. Contoh kasus LPD, kasus Perjalanan Dinas (Perdin, Red) dan lain-lain. Itu ada kerugian negara. Sekalipun pelakunya mengembalikan uang negara, pelakunya tetap diproses,"**
>
> **Ngakan Made Rai**
> *Ketua Garppar Gianyar*

Dia juga mendukung upaya bupati Gianyar Made Mahayastra yang komit menegakkan hukum. "Komponen rakyat Gianyar patut mendukung bupati Gianyar dalam menegakkan hukum," jelasnya

Ngakan Rai menambahkan sebagai penanggung jawab atas kasus OTT tersebut, maka bendesa pakraman harus bisa mempertanggungjawabkan dana tersebut. "Yang pantas kena ini Bendesa Pakraman. Dia pakai logo desa adat sebagai yang bertanggungjawab atas kasus ini. Nanti bisa dikembangkan ke yang lain," tegasnya.

Ngakan Rai berjanji siap membantu Kejari maupun instansi hukum lainnya untuk penggalian data. "Kami siap membantu, untuk memberikan data-data mengenai adanya kejanggalan-kejanggalan di kabupaten Gianyar," tukasnya.

Seperti diketahui kasus OTT terkait karcis masuk obyek wisata Tirta Empul, Desa Pakraman Manukaya Let, Tampaksiring terjadi November 2018 lalu. Di tempat pemungutan tiket tersebut, ada dua petugas tiket yang diamankan beserta barang bukti tiket. **(dra/dot)**

Edisi : Selasa, 2 April 2019

Hal : 2

HARIAN UMUM NusaBali

Warga Pengelatan Bangun Jembatan Swadaya

Bermodal Rp 1,5 M, Perlu Dana Rp 7,5 M

Jembatan ini dulunya hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki karena kontruksinya hanya tiang pancang.

SINGARAJA, NusaBali

Warga Desa Pengelatan, Kecamatan Buleleng, Buleleng, bertekad tinggi mewujudkan jembatan dengan rencana anggaran belanja (RAB) Rp 7,5 miliar. Namun dana yang ada untuk mewujudkan jembatan ini hanya Rp 1,5 miliar. Denagn dana itu, pengerjaan fisik jembatan sudah mencapai 75 persen.

Jembatan dibangun di atas Tukad (sungai) Buwus untuk menghubungkan dua banjar di Desa Pengelatan, yakni Banjar Dinas Dauh Tukad dengan Banjar Kajanan. Jembatan dengan panjang 50 meter, lebar 6,5 meter dengan tinggi jembatan dari permukaan Tukad Buwus, sekitar 25 meter.

Dulunya, akses warga dari dua banjar itu hanya melintasi titi (jembatan kecil,Red) berukuran 1,5 meter, berada beberapa meter di atas Tukad Buwus. Jembatan ini dulunya hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki karena kontruksinya hanya tiang pancang. Jembatan itu pun diperkirakan dibangun di tahun 1970-an.

Seiring perkembangan jumlah penduduk, akses jembatan itu pun dinilai sangat vital. Karena selain menghubung dua banjar, terutama anak-anak dari Banjar Dauh Tukad yang bersekolah ke SD dan SMP yang lokasinya ada pusat desa. Jembatan itu juga memiliki akses menghubungkan beberapa desa bertetangga seperti Desa Petandakan, Pegadungan, dan Desa Nagasepaha. Akses jembatan itu juga kerap menjadi alternative terpendek saat upacara pemakaman jenazah ke Setra Desa Pakraman Pengelatan.

Menyusul perkembangan tersebut, para tokoh masyarakat Desa Pengelatan kemudian mengajukan proposal bantuan ke Pemprov Bali, melalui anggota DPRD Bali asal Buleleng.

Dalam proposal itu kebutuhan dana pembangunan jembatan itu sekitar Rp 7,5 miliar, sesuai perhitungan pihak desa dengan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buleleng.

Akhirnya pada Agustus 2018, proposal tersebut hanya mendapat dana sebesar Rp 1,5 miliar. Meski dananya masih terlalu jauh, pihak desa sepakat membangun. Jembatan itu kemudian mulai dikerjakan pada September 2018. "Karena dananya belum mencukupi, tetapi karena kami sejak lama memimpikan jembatan, kami bangun secara swadaya," ungkap salah satu tokoh masyarakat Desa Pengelatan, Wayan Soma Adnyana, di lokasi jembatan, Minggu (31/3).

Menurut Soma Adnyana yang juga panitia proyek jembatan, karena dana terbatas maka pihaknya kemudian menyesuaikan struktur bangunan dengan memanfaatkan batu kali yang ada di lokasi. Selain itu, penggunaan alat berat memanfaatkan milik pribadinya secara gratis. "Tadinya mau pakai baja, tetapi karena dana terbatas, kami manfaatkan batu kali yang ada sebagai dingding dan senderan. Disamping itu, saya punya alat berat dipakai disini. Jadi ini sangat membantu pengiritan biaya, tanpa mengurangi kekuatan jembatan," terang Soma Adnyana.

Ia berharap Pemprov Bali dan kabupaten tetap memberi perhatain agar jembatan tersebut bisa diwujudkan. Karena saat ini, pekerjaan jembatan baru mencapai 75 persen. "Kami belum tahu, kapan jembatan ini bisa terwujud. Tetapi kami akan terus berusaha mewujudkan," tandasnya.

Perbekel Pengelatan Nyoman Budarsa mengaku desa belum bisa mengarahkan kucuran Dana Desa sekitar Rp 800 juta dalam APBDes untuk pembangunan jembatan di Tukad Buwus. Alasannya, kegiatan prioritas lainnya masih sangat mendesak. Disamping itu, jika dana desa diarahkan seluruhnya ke pembangunan jembatan, kemungkinan besar seluruh dana akan tersedot hanya untuk membangun jembatan. **k19**

Edisi : Senin, 1 April 2019
Hal : 12

Tribun-Bali

Rp 1 M untuk Fogging dan ULV

TABANAN, TRIBUN BALI – Dinas Kesehatan Tabanan mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dengan serangan penyakit DBD pada bulan April dan Mei. Pada bulan tersebut merupakan masa peralihan dari musim penghujan ke kemarau sehingga perkembangbiakan nyamuk lebih cepat. Masyarakat diminta untuk tetap melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) secara rutin. Petugas juga telah melakukan fogging dan ULV.

Menurut data yang berhasil diperoleh, total selama dua bulan, ada 34 kasus yang terjadi di Tabanan. Selama Januari terjadi 8 kasus dan meningkat di bulan Februari menjadi 24 kasus. Diperkirakan puncak serangan DBD akan terjadi pada bulan April dan Mei. Sementara, secara umum kasus DBD di Kabupaten Tabanan mengalami penurunan setiap tahunnya. Seperti pada tiga tahun lalu, kasus yang terjadi mencapai 800 kasus, kemudian menurun menjadi 160 kasus dan tahun 2018 lalu hanya tercatat 44 kasus positif DBD.

"Selama dua bulan sudah ada 34 kasus yang terjadi. Dan kami prediksi puncaknya terjadi sekitar bulan April dan Mei. Kami harapkan masarakat tetap menjaga kebersihan dan melakukan PSN dengan rutin," ujar Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Menular (P2M) Dinas Kesehatan Tabanan, dr. Ketut Nariana.

Nariana menjelaskan, dari bulan Januari ke Februari juga telah ada peningkatan kasus yang cukup banyak. Dinas Kesehatan Tabanan menindaklanjuti hal tersebut dengan menggelar fogging ke daerah atau desa yang terjadi kasus positif. Anggaran untuk fogging dan ULV tahun 2019 senilai Rp 1 miliar.

"Jika dibandingkan dengan kasus yang terjadi pada 2017, kasus di tahun 2018 ini lebih sedikit. Sehingga anggaran untuk fogging dan ULV tahun ini pasti cukup karena tahun lalu juga cukup," jelas Nariana.

Perbedaan fogging dan ULV, jelas dia, untuk fogging atau pengasapan biasanya dilakukan jika sudah ada kasus positif. Sementara ULV adalah tindakan pembunuhan nyamuk dewasa sebelum terjadinya kasus DBD atau dilakukan sebelum pancaroba.

"Biasanya dilakukan sebelum musim hujan atau pada akhir tahun" jelas Nariana. Tujuan dari dua cara ini sama yaitu untuk membunuh nyamuk dewasa. **'mpa)**

Edisi : Senin, 1 April 2019

Hal : 4

Bali Post

Dukung Pembangunan Pura Kawitan Kayu Selem Songan Bangli

Bupati Giri Prasta Serahkan Dana Hibah Rp 3 Miliar

PROGRAM Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, "Badung Angelus Buana", Badung berbagi dari Badung untuk Bali kembali digulirkan. Kali ini Pura Kawitan Kayu Selem di Desa Songan, Kintamani, Bangli dibantu dana hibah sebesar Rp 3 miliar. Saat ini pura tersebut sedang di-pugar dan diperluas. Pemugarannya sudah berlangsung sejak tahun 2012 dan diperkirakan menghabiskan anggaran mencapai Rp 8 miliar lebih. Dana hibah yang diserahkan Bupati Giri Prasta diterima Ketua Warga Kayu Selem Bangli Jro Susila, bertempat di Balai Serbaguna Desa Pakraman Metra, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Bangli, Sabtu (30/3).

Kehadiran Bupati Giri Prasta didampingi Kabag Humas Badung Putu Ngurah Thomas Yuniarta disambut Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata serta anggota DPRD Bali Dapil Bangli I Nyoman Adnyana, anggota DPRD Bangli Wayan Subagan, Camat Tembuku, masyarakat setempat, Bala Bali Mula (BBM), Warga Kayu Selem Gwasong Songan se-Bali.

Ketua WKS Bangli Jro Susila beserta Manggala Utama Warga Kayu Selem Ida Mpu Nila Dharma Wreksa mengucapkan terima kasih kepada Bupati Badung dan jajaran atas bantuan hibah yang diberikan tersebut. "Kami atas nama WKS mengucapkan terima kasih, melalui bantuan hibah dari Bapak Bupati Badung kami Warga Kayu Selem merasa sangat terbantu sekali dalam mewujudkan *sradha bhakti* kepada Ida Bhatara Kawitan dan semoga Bapak Bupati beserta jajaran selalu diberikan *kerahajengan*, sukses dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin di Kabupaten Badung," ucapnya.

Sementara itu, Wabup Bangli Sang Nyoman Sedana Arta merasa berbahagia melihat hubungan *pasemetonan* Warga Pasek Kayu Selem yang begitu kental. "Ini membuktikan *pakilitan pasemetonan* keluarga besar Kayu Selem se-Bali kompak dan bersatu," ungkapnya. Apresiasi dan rasa bangga juga disampaikan kepada Bupati Badung yang telah hadir di tengah-tengah warga Kayu Selem untuk memberikan hibah sebesar Rp 3 miliar, guna mendukung pembangunan Pura Kawitan Kayu Selem Songan Bangli. "Saya merasa berbangga sekali karena baru pertama kali semenjak saya menjabat Wakil Bupati Bangli, ini merupakan bantuan hibah dengan nilai yang luar biasa. Tidak berhenti sampai di situ, tahun ini di anggaran induk kami warga Bangli juga dibantu Rp 21 miliar lebih. Ini membuktikan ketulusan dan *bares*-nya Bupati Badung bukan hanya dari APBD yang dimiliki tetapi dari kemampuan pribadinya juga Beliau telah buktikan. Terima kasih kami sampaikan atas nama masyarakat Bangli kepada Bupati Giri Prasta karena kerja nyata yang telah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di pulau Bali khususnya kami di Bangli," imbuhnya.

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di sela-sela acara menyampaikan, bantuan ini merupakan komitmen Badung berbagi dari Badung untuk Bali dengan berlandaskan *Tri Hita Karana*. Komitmen ini dipegang teguh untuk meringankan beban pribadi serta komunal masyarakat. "Salah satu wujud nyata yang kita lakukan khususnya kepada *sameton* Kayu Selem Gwasong ini, kita berikan bantuan Rp 3 miliar untuk membangun pura kawitan yang ada di Songan yaitu Songan balik bukit. Ini adalah milik seluruh *krama* khususnya *sameton* Kayu Selem di wilayah Pulau Bali," jelasnya. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan dan membantu warga Pasek Kayu Selem Gwasong dalam melaksanakan *sradha bhakti* kepada Ida Bhatara Kawitan.

Dengan *tagline* "Badung Angelus Buana" Bupati Giri Prasta ingin menjalankan program Presiden Jokowi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Program inilah yang ingin diimplementasikan Bupati Giri Prasta dari Badung membangun Bali dari pinggiran. Dengan mulai merealisasikan pembangunan 2.000 rumah sehat layak huni untuk enam kabupaten di Bali, dengan anggaran Rp 100 miliar.

Berawal di Buleleng, diserahkan 450 unit yang diterima SCTPB (Sidetapa, Cempaga, Tigawasa, Pedawa dan Banyuseri) dan Desa Gerokgak. Di Tabanan 300 unit dan Jembrana 300 unit. Untuk di Bangli akan mulai dari Desa Songan balik bukit dan setelahnya akan dilaksanakan di Desa Terunyan. Begitu pula selanjutnya untuk Karangasem dan Klungkung. Setelah program bedah rumah tuntas, akan berlanjut dengan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada setiap keluarga untuk membuat usaha dengan bantuan Rp 15 juta.

Dalam kesempatan itu, Bupati Giri Prasta juga memberikan bantuan pribadi sebesar Rp 80 juta kepada panitia acara I Wayan Suyasa, guna mendukung pelaksanaan penyerahan bantuan dana hibah Bupati Badung untuk Warga Kayu Selem. **(ad1019)**

Edisi : Senin, 1 April 2019

Hal : 3

HARIAN UMUM NusaBali

Bupati Badung Hibahkan Rp 3 M untuk Warga Pasek Kayuselem

• IST

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta didampingi Wabup Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta serahkan dana hibah untuk warga Pasek Kayuselem di wantilan Banjar Metra, Desa Yangapi, Tembuku, Sabtu (30/3).

BANGLI, NusaBali

Warga Pasek Kayuselem menerima hibah Rp 3 miliar dari Pemkab Badung. Dana hibah diserahkan langsung oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta kepada Ketua Umum Warga Pasek Kayuselem se-Bali Nusantara, Jro Susila, di wantilan Banjar Metra, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Bangli, Sabtu (30/3). Hibah tersebut direncanakan untuk pembangunan Pura Kawitan Pasek Kayuselem Gwa Song di Desa Songan, Kecamatan Kintamani.

Bupati Giri Prasta menyampaikan pemberian bantuan hibah Rp 3 miliar bertujuan meringankan beban warga Pasek Kayuselem Gwa Song yang saat ini tengah membangun pura kawitann di Desa Songan. Penyerahan bantuan hibah merupakan wujud dari penerapan Tri Hita Karana yang selama ini dijalankan Kabupaten Badung.

Bupati Giri Prasta berharap bantuan hibah yang diberikan dapat bermanfaat bagi warga Pasek Kayuselem Gwa Song. Bupati Giri Prasta juga berharap warga Pasek Kayuselem selalu bersatu dan kompak. "Tidak ada alasan tidak kompak. Kami berkomitmen membuat pasemetonan, saling parid, masidi kara, dan saling sembah," ungkapnya. Bupati Badung juga berpesan kepada semeton Pasek Kayuselem Gwa Song untuk tetap menjalankan konsep bhakti ring kawitan, tindih ring bhisama, dan guyub ring semeton.

Sementara Ketua Umum Warga Pasek Kayuselem se-Bali Nusantara, Jro Susila, menyampaikan terimakasih kepada Bupati Badung atas bantuan hibah Rp 3 miliar. Bantuan hibah ini sangat bermanfaat bagi warga Pasek Kayuselem Gwa Song dalam menyelesaikan pembangunan Pura Kawitan Pasek Kayuselem di Songan yang secara total membutuhkan anggaran Rp 10 miliar lebih. "Mudah-mudah ke depan bapak Bupati Badung dan Bapak Gubernur juga membantu peningkatan jalan menuju Pura Kayuselem yang sekarang dimiliki Bangli menjadi jalan provinsi. Peningkatan jalan itu sangat dibutuhkan karena saat karya, pamedek yang datang bisa mencapai puluhan ribu. Sementara jalan yang ada tidak cukup untuk menampung," harapnya.

Sementara Wakil Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, mengaku bangga melihat persatuan warga Pasek Kayuselem Gwa Song. Diharapkan persatuan ini dapat terus terjaga. Wabup Sedana Arta juga menyampaikan terimakasih atas hibah yang diberikan Kabupaten Badung kepada warga Pasek Kayuselem. Penyerahan bantuan hibah disaksikan ribuan warga Pasek Kayuselem se-Bali. Acara ini juga dihadiri Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata, anggota DPRD Bali Nyoman Adnyana, Muspika Tembuku, serta tokoh masyarakat setempat. **@ esa**

Edisi : Senin, 1 April 2019

Hal : 8

HARIAN UMUM
NusaBali

Pembangunan Duplikat Jembatan Tukadaya

Didanai Rp 14 Miliar, Ditarget Rampung Akhir Tahun Ini

NEGARA, NusaBali

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai mengerjakan proyek duplikasi jembatan Tukadaya di Jalan Umum Denpasar – Gilimanuk wilayah perbatasan antara Kecamatan Negara dan Kecamatan Melaya, Jembrana. Proyek duplikasi jembatan yang tengah digarap rekanan PT Trijaya Nasional, dengan nilai kontrak sebesar Rp 14.393.171.000, itu ditargetkan rampung akhir 2019 ini.

Berdasar pemantauan pada Minggu (31/3), penggarapan duplikasi jembatan di sebelah timur jembatan Tukadaya, itu sementara masih dalam proses penggalian tanah, dan persiapan membangun senderan di sisi selatan sungai. Dalam membangun jembatan baru itu, pihak Balai Besar Pelaksanan Jalan Nasional (BBPJN) VIII pada Kementerian PUPR memastikan tidak ada pembebasan lahan masyarakat, dan hanya menggunakan lahan aset negara.

Salah satu staf PT Trijaya Nasional, Agung Sastra, Minggu kemarin, mengatakan untuk panjang jembatan duplikasi itu sama dengan jembatan di sebelahnya, yakni 40 meter. Namun untuk jalan pada jembatan baru itu akan dibuat selebar 7 meter, atau lebih lebar 1 meter dibanding yang lama. "Selain jalan lebih lebar, di sisi-sisi jalan jembatan yang baru, itu juga akan diisi trotoar selebar 1 meter," ujarnya. Dia optimistis penggarapan duplikat jembatan itu, dapat rampung sesuai tenggat waktu.

Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 03 Jalan Nasional Cekik-Batas Kota Tabanan BBPJN VIII Grace Agustina Togatorop, mengatakan sebelum mulai penggarapan, dari pihak BBPJN VIII juga telah memastikan batas tanah aset lahan negara yang digunakan untuk pembangunan jembatan baru tersebut. "Yang digunakan pembangunan memang lahan aset negara. Warga sekitar juga yang memberikan informasi di mana titik-titik patok batas tanah negara di lokasi sekitar," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan duplikat itu bertujuan mengurangi kepadatan arus lalu lintas maupun beban di jembatan Tukadaya yang ada saat ini. Nantinya, setelah terbangun jembatan kembar, maka arus lalu lintas dari arah Denpasar serta Gilimanuk akan dibagi satu jalur. Untuk jembatan baru, akan digunakan arus lalu lintas dari arah Gilimanuk. Sedangkan jembatan yang lama, akan digunakan arus lalu lintas dari arah Denpasar. Selama pengerjaan duplikat jembatan dengan batas waktu hingga 25 Desember 2019 itu, pihaknya juga memastikan tidak akan mengganggu arus lalu lintas dari arah Denpasar serta Gilimanuk.

Menurut Grace, pembangunan jembatan baru itu juga akan dilengkapi trotoar. Pembangunan trotoar pada jembatan baru itu akan menjadi akses pejalan kaki yang tidak mendapat akses di jembatan yang ada saat ini, yang tanpa dilengkapi trotoar. "Ada trotoar untuk pejalan kaki. Setelah jembatan yang baru jadi, kami juga rencanakan pembangunan trotoar di jembatan yang lama. Tetapi pembangunan trotoar di jembatan yang lama itu masih kami bahas," tandas Grace. **ode**

Edisi : Senin, 1 April 2019
Hal : 7

RADAR BALI

Habis Rp 1,5 Miliar, Kini Mandeg

PENGLATAN – Warga di Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, kini resah. Pembangunan jembatan penghubung antara Banjar Dinas Dauh Tukad dengan pusat desa kini mangkrak. Dana yang dihabiskan pun sudah cukup besar. Warga pun berharap pemerintah turun tangan memberikan bantuan, agar jembatan itu bisa segera dilintasi.

Keberadaan jembatan tersebut sangat strategis bagi warga yang tinggal di Banjar Dinas Dauh Tukad. Terutama untuk menuju sekolah, baik itu tingkat SD maupun SMP. Jembatan itu juga diharapkan bisa digunakan warga untuk jalur pemakaman menuju Setra Desa Pakraman Penglatan.

Selama ini warga di Banjar Dinas Dauh Tukad dengan pusat desa, memang terpisah dengan sungai. Akibatnya warga harus menggunakan jalan memutar. Baik itu melalui simpang empat Banyuning, atau melalui jalan di dekat perbatasan antara Desa Penglatan dengan Desa Petandakan.

Tokoh masyarakat Desa Penglatan Wayan Soma Adnyana mengatakan, jembatan yang membentang di atas Tukad Buwus itu dirancang memiliki lebar 5,6 meter dengan panjang 50 meter. Hingga kini pekerjaan baru mencapai angka 75 persen. Jembatan itu sudah sejak lama diidam-idamkan warga yang tinggal di Banjar Dinas Dauh Tukad, maupun Banjar Dinas Kajanan.

Menurut Soma, jembatan itu dibangun secara swadaya. Sejauh ini panitia pembangunan baru mendapat suntikan dana sebesar Rp 1,5 miliar. "Kebetulan ada anggota DPRD Provinsi dari Desa Penglatan. Beliau memberikan bantuan Rp 1,5 miliar lewat bansos provinsi. Sisanya ya swadaya warga di sini," kata Soma. Tadinya warga hendak membangun dengan struktur

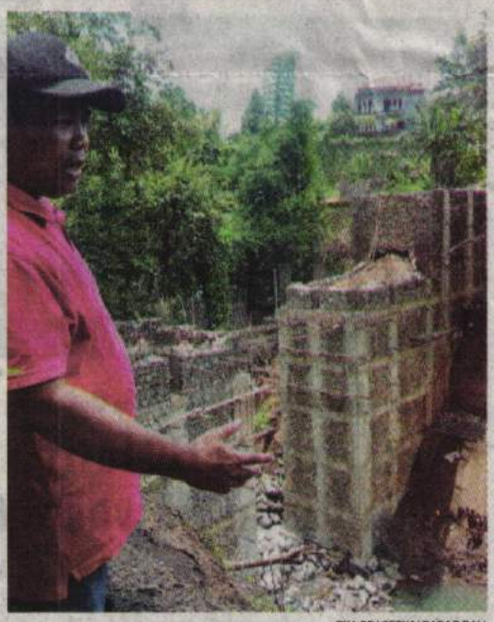

EKA PRASETYA/ RADAR BALI

SWADAYA: Jembatan penghubung Banjar Dinas Dauh Tukad dengan pusat Desa Penglatan yang proyeknya mandeg.

bajar. Namun dari hitung-hitungan, biayanya cukup besar. Terpaksa struktur diubah menjadi batu beton. Batu yang dibutuhkan pun diambil dari dasar sungai. "Semuanya swadaya ini. Perlu batu, diambil dari sungai. Perlu alat berat, saya pinjamkan. Pokoknya biar jadi saja jembatan ini, sehingga warga di sini bisa lebih dekat jarak tempuhnya," imbuh dia. Ia pun berharap pemerintah bersedia membantu proses pembangunan jembatan tersebut. Mengingat keberadaan jembatan itu telah menjadi harapan warga selama puluhan tahun. **(eps/gup)**

Edisi : Senin, 1 April 2019

Hal : 10

Radar Bali

Tabanan Bentuk Klinik Siskeudes

Dana Desa untuk Kembangkan Potensi Desa

TABANAN – Tak mau main-main dan khawatir salah pos anggaran pengelolaan keuangan yang ada di desa membuat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Tabanan membentuk klinik siskeudes. Tujuan klinik ini dibentuk agar pemerintah desa lebih profesional dan akuntabel dalam mengelola keuangan desa. Ini dianggap penting mengingat melimpahnya kucuran dana bagi desa yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Kepala DPMD Tabanan, Roemi Liestyowati mengatakan klinik siskeudes sudah berjalan selam 4 tahun. Dengan maksud agar para operator di tiap desa yang mengalami kesulitan dalam menjalankan sistem aplikasi siskeudes dapat diberikan pendampingan dan pemahaman. "Dari klinik ini kami terima keluhan rata-rata setiap hari sekitar lima orang yang datang dari desa untuk mendapatkan pendampingan. Setelah itu barulah petugas dari klinik ini bersama tim kabupaten turun langsung ke desa guna melakukan pendampingan," ujar Roemi Minggu (31/3).

Roemi menambahkan dalam perjalanan mengelola aplikasi sistem keuangan desa. Pihak desa banyak yang salah dalam hal pos anggaran. Sehingga perlu melakukan pendampingan. Sistem terus mengalami perkembangan, mau-mau tidak mau menuntut setiap operator di tiap desa siap untuk belajar terhadap perubahan tersebut.

Disamping itu aparatur pemerintahan desa harus mampu menguasai Siskeudes. Karena sistem ini diciptakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk membantu desa agar tertib dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan keuangan desa. "Klinik siskeudes yang kami bentuk sangat membatu operator desa dalam pelaksanan pengelolaankeuangan desa yang pelaporan bersasis aplikasi," kata Roemi.

Dijelaskan Roemi saat ini dana desa tahun 2019 mengalami peningkatan dari sebelumnya di tahun 2018 sebesar Rp 101 miliar menjadi Rp 118 miliar di tahun 2019. Besaran dana desa yang didapat 133 desa di Kabupaten Tabanan tentunya bervariasi. Itu tergantung pada luas wilayah, topografi keadaan wilayah, jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin di desa tersebut.

Semakin luas wilayahnya dan jumlah penduduk. Maka dana desa akan semakin besar yang didapat. Penentuan berapa jumlah besaran dana desa langsung dari Kemendes Pusat. "Kami berharap dana desa yang begitu besar agar dikelola secara baik dan tepat sasaran. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban," pungkasnya.

Sementara itu di Karangasem sebanyak 75 Desa sudah mendapatkan dana desa. Rata rata dana desa tersebut sebesar Rp 1 miliar pertahun. Dana ini langsung di transfer pemerintah pusat ke Desa. Peruntukannya untuk mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat. Besarannya juga tergantung jumlah penduduk miskin di Desa tersebut.

Menurut Kadis Pemperdayaan Masyarakat Desa (PMD) Komang Agus Sukasena kemarin besaran dana desa dipengaruhi oleh beberapa factor. Diantaranya adalah banyaknya penduduk miskin di desa tersebut. "Jadinya besaran dana desa tergantung kondisi Desa tersebut," ujarnya.

Di Karangasem, rata rata per tahun mendapatkan Rp 800 juta per Desa. Dana ini untuk pemberdayaan masyarakat tidak mampu. Selain itu, dana desa juga bisa untuk membagun insfratruktur pedesaan. Diantaranya adalah jalan desa. Selain itu bisa juga dipergnakan untuk pengelolaan sumber air bersih serta untuk mengembangkan desa yang memiliki sumber daya alam.

Potensi desa desa yang ada tersebut wajib di atahkan dan di kelola nantinya pengelolaanya oleh BUMDes. Selain itu, bisa mengelola SDA, karena sudah ada unit-unitnya. Di Karangasem BUMDes sudah memiliki empat unit. Diantaranya simpan pinjam, perdagangan umum, pengelolaan air bersih dan sarana olahraga atau Sorga. Namun khusus untuk Sorga hanya ada di Desa Menanga, Rendang. **(uli/tra/rid)**

Edisi : Senin, 1 April 2019
Hal : 17

Tribun-Bali

Gedung PPI Kini Hancur Lebur

Menahun Mangkrak Sekarang Jadi Tempat Selfie

SEMARAPURA, TRIBUN BALI - Panas terasa begitu menyengat di pesisir Pantai Karangdadi, di Desa Kusamba, Klungkung, Minggu (31/3). Meski demikian, beberapa warga tampak beraktivitas di lokasi Proyek Pusat Pelelangan Ikan (PPI) yang telah mangkrak bertahun-tahun tersebut. Bak tempat wisata, warga mengambil foto di runtuhan bangunan PPI, dengan latar belakang ombak besar yang menghancurkan beton-beton *breakwater* (pemecah gelombang).

"Awalnya hanya iseng berkunjung ke Pantai Karangdadi. Ternyata ombaknya besar seperti ini, bagus juga untuk *selfie*," ujar Nengah Danta, warga Desa Kusamba ketika ditemui di pesisir Karangdadi.

Danta dan rekannya, sengaja berteduh di runtuhan bangunan proyek PPI yang telah mangkrak bertahun-tahun sembari menunggu datangnya ombak besar. Setelah ombak besar datang, mereka pun melakukan swafoto dengan latar belakang ombak besar itu. Deburan ombak bahkan tingginya mencapai sekitar 5 meter dan nyaris setara dengan bangunan PPI.

"Bangunan PPI sekarang hanya jadi lokasi berteduh bagi warga. Banyak warga yang berfoto-foto di sana, mencari pemandangan ombak besar," ujar warga setempat, Mangku Dharma yang setiap hari berjualan di pesisir Pantai Karangdadi.

Menurutnya, saat ini bangunan-bangunan mangkrak proyek PPI itu dijadikan lokasi berteduh oleh warga dan nelayan setempat. Berdasarkan pantuan *Tribun Bali*, Minggu (31/3) kondisi proyek gedung PPI di Pantai Karang Dadi sudah hancur lebur. Bangunan yang rencananya terdiri dari gedung pelelangan ikan, pabrik es, dan kantor PPI tersebut setengahnya sudah tertimbun pasir pantai.

Atap bangunan juga sudah lama roboh dan rata dengan tanah dan saat ini hanya tersisa puing. Selain itu, beton pemecah gelombang yang sempat tersusun rapi tampak sudah tidak beraturan.

"Tapi justru warga banyak berfoto-foto di sekitar bangunan mangkrak PPI itu, terutama sore hari. Pagi juga banyak pemancing yang berteduh di sana," jelasnya. **(mit)**

Proyek Beranggaran Rp 33 Miliar

PROYEK PPI di Dusun Karangdadi, Kusamba berdiri di atas lahan 1,2 hektare dan merupakan proyek pemerintah pusat melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan. Saat perencanaan, proyek ini dianggarkan sebesar Rp 33 miliar dan pertama kali dikerjakan tahun 2005 melaui Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat.

Karena permasalahan anggaran dari pusat dan permasalahan teknis, pembangunan terhenti sejak tahun 2012. Padahal pembangunan PPI sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp 16 miliar. Hingga saat ini, bangunan PPI tersebut tidak dilanjutkan dan terbangkalai serta tidak terurus. **(mit)**

Edisi : Senin, 1 April 2019

Hal : 4

Tribun-Bali

Rp 1 M untuk Fogging dan ULV

TABANAN, TRIBUN BALI – Dinas Kesehatan Tabanan mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dengan serangan penyakit DBD pada bulan April dan Mei. Pada bulan tersebut merupakan masa peralihan dari musim penghujan ke kemarau sehingga perkembangbiakan nyamuk lebih cepat. Masyarakat diminta untuk tetap melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) secara rutin. Petugas juga telah melakukan fogging dan ULV.

Menurut data yang berhasil diperoleh, total selama dua bulan, ada 34 kasus yang terjadi di Tabanan. Selama Januari terjadi 8 kasus dan meningkat di bulan Februari menjadi 24 kasus. Diperkirakan puncak serangan DBD akan terjadi pada bulan April dan Mei. Sementara, secara umum kasus DBD di Kabupaten Tabanan mengalami penurunan setiap tahunnya. Seperti pada tiga tahun lalu, kasus yang terjadi mencapai 800 kasus, kemudian menurun menjadi 160 kasus dan tahun 2018 lalu hanya tercatat 44 kasus positif DBD.

"Selama dua bulan sudah ada 34 kasus yang terjadi. Dan kami prediksi puncaknya terjadi sekitar bulan April dan Mei. Kami harapkan masarakat tetap menjaga kebersihan dan melakukan PSN dengan rutin," ujar Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Menular (P2M) Dinas Kesehatan Tabanan, dr. Ketut Nariana.

Nariana menjelaskan, dari bulan Januari ke Februari juga telah ada peningkatan kasus yang cukup banyak. Dinas Kesehatan Tabanan menindaklanjuti hal tersebut dengan menggelar fogging ke daerah atau desa yang terjadi kasus positif. Anggaran untuk fogging dan ULV tahun 2019 senilai Rp 1 miliar.

"Jika dibandingkan dengan kasus yang terjadi pada 2017, kasus di tahun 2018 ini lebih sedikit. Sehingga anggaran untuk fogging dan ULV tahun ini pasti cukup karena tahun lalu juga cukup," jelas Nariana.

Perbedaan fogging dan ULV, jelas dia, untuk fogging atau pengasapan biasanya dilakukan jika sudah ada kasus positif. Sementara ULV adalah tindakan pembunuhan nyamuk dewasa sebelum terjadinya kasus DBD atau dilakukan sebelum pancaroba.

"Biasanya dilakukan sebelum musim hujan atau pada akhir tahun" jelas Nariana. Tujuan dari dua cara ini sama yaitu untuk membunuh nyamuk dewasa. **'mpa)**

Edisi : Senin, 1 April 2019

Hal : 4

Tribun-Bali

Gedung PPI Kini Hancur Lebur

Menahun Mangkrak Sekarang Jadi Tempat Selfie

SEMARAPURA, TRIBUN BALI - Panas terasa begitu menyengat di pesisir Pantai Karangdadi, di Desa Kusamba, Klungkung, Minggu (31/3). Meski demikian, beberapa warga tampak beraktivitas di lokasi Proyek Pusat Pelelangan Ikan (PPI) yang telah mangkrak bertahun-tahun tersebut. Bak tempat wisata, warga mengambil foto di runtuhan bangunan PPI, dengan latar belakang ombak besar yang menghancurkan beton-beton *breakwater* (pemecah gelombang).

"Awalnya hanya iseng berkunjung ke Pantai Karangdadi. Ternyata ombaknya besar seperti ini, bagus juga untuk *selfie*," ujar Nengah Danta, warga Desa Kusamba ketika ditemui di pesisir Karangdadi.

Danta dan rekannya, sengaja berteduh di runtuhan bangunan proyek PPI yang telah mangkrak bertahun-tahun sembari menunggu datangnya ombak besar. Setelah ombak besar datang, mereka pun melakukan swafoto dengan latar belakang ombak besar itu. Deburan ombak bahkan tingginya mencapai sekitar 5 meter dan nyaris setara dengan bangunan PPI.

"Bangunan PPI sekarang hanya jadi lokasi berteduh bagi warga. Banyak warga yang berfoto-foto di sana, mencari pemandangan ombak besar," ujar warga setempat, Mangku Dharma yang setiap hari berjualan di pesisir Pantai Karangdadi.

Menurutnya, saat ini bangunan-bangunan mangkrak proyek PPI itu dijadikan lokasi berteduh oleh warga dan nelayan setempat. Berdasarkan pantuan *Tribun Bali*, Minggu (31/3) kondisi proyek gedung PPI di Pantai Karang Dadi sudah hancur lebur. Bangunan yang rencananya terdiri dari gedung pelelangan ikan, pabrik es, dan kantor PPI tersebut setengahnya sudah tertimbun pasir pantai.

Atap bangunan juga sudah lama roboh dan rata dengan tanah dan saat ini hanya tersisa puing. Selain itu, beton pemecah gelombang yang sempat tersusun rapi tampak sudah tidak beraturan.

"Tapi justru warga banyak berfoto-foto di sekitar bangunan mangkrak PPI itu, terutama sore hari. Pagi juga banyak pemancing yang berteduh di sana," jelasnya. **(mit)**

Proyek Beranggaran Rp 33 Miliar

PROYEK PPI di Dusun Karangdadi, Kusamba berdiri di atas lahan 1,2 hektare dan merupakan proyek pemerintah pusat melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan. Saat perencanaan, proyek ini dianggarkan sebesar Rp 33 miliar dan pertama kali dikerjakan tahun 2005 melaui Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat.

Karena permasalahan anggaran dari pusat dan permasalahan teknis, pembangunan terhenti sejak tahun 2012. Padahal pembangunan PPI sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp 16 miliar. Hingga saat ini, bangunan PPI tersebut tidak dilanjutkan dan terbangkalai serta tidak terurus. **(mit)**

Edisi : Senin, 1 April 2019

Hal : 4

Bali Post

Dukung Pembangunan Pura Kawitan Kayu Selem Songan Bangli

Bupati Giri Prasta Serahkan Dana Hibah Rp 3 Miliar

PROGRAM Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, "Badung Angelus Buana", Badung berbagi dari Badung untuk Bali kembali digulirkan. Kali ini Pura Kawitan Kayu Selem di Desa Songan, Kintamani, Bangli dibantu dana hibah sebesar Rp 3 miliar. Saat ini pura tersebut sedang di-pugar dan diperluas. Pemugarannya sudah berlangsung sejak tahun 2012 dan diperkirakan menghabiskan anggaran mencapai Rp 8 miliar lebih. Dana hibah yang diserahkan Bupati Giri Prasta diterima Ketua Warga Kayu Selem Bangli Jro Susila, bertempat di Balai Serbaguna Desa Pakraman Metra, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Bangli, Sabtu (30/3).

Kehadiran Bupati Giri Prasta didampingi Kabag Humas Badung Putu Ngurah Thomas Yuniarta disambut Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata serta anggota DPRD Bali Dapil Bangli I Nyoman Adnyana, anggota DPRD Bangli Wayan Subagan, Camat Tembuku, masyarakat setempat, Bala Bali Mula (BBM), Warga Kayu Selem Gwasong Songan se-Bali.

Ketua WKS Bangli Jro Susila beserta Manggala Utama Warga Kayu Selem Ida Mpu Nila Dharma Wreksa mengucapkan terima kasih kepada Bupati Badung dan jajaran atas bantuan hibah yang diberikan tersebut. "Kami atas nama WKS mengucapkan terima kasih, melalui bantuan hibah dari Bapak Bupati Badung kami Warga Kayu Selem merasa sangat terbantu sekali dalam mewujudkan *sradha bhakti* kepada Ida Bhatara Kawitan dan semoga Bapak Bupati beserta jajaran selalu diberikan *kerahajengan*, sukses dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin di Kabupaten Badung," ucapnya.

Sementara itu, Wabup Bangli Sang Nyoman Sedana Arta merasa berbahagia melihat hubungan *pasemetonan* Warga Pasek Kayu Selem yang begitu kental. "Ini membuktikan *pakilitan pasemetonan* keluarga besar Kayu Selem se-Bali kompak dan bersatu," ungkapnya. Apresiasi dan rasa bangga juga disampaikan kepada Bupati Badung yang telah hadir di tengah-tengah warga Kayu Selem untuk memberikan hibah sebesar Rp 3 miliar, guna mendukung pembangunan Pura Kawitan Kayu Selem Songan Bangli. "Saya merasa berbangga sekali karena baru pertama kali semenjak saya menjabat Wakil Bupati Bangli, ini merupakan bantuan hibah dengan nilai yang luar biasa. Tidak berhenti sampai di situ, tahun ini di anggaran induk kami warga Bangli juga dibantu Rp 21 miliar lebih. Ini membuktikan ketulusan dan *bares*-nya Bupati Badung bukan hanya dari APBD yang dimiliki tetapi dari kemampuan pribadinya juga Beliau telah buktikan. Terima kasih kami sampaikan atas nama masyarakat Bangli kepada Bupati Giri Prasta karena kerja nyata yang telah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di pulau Bali khususnya kami di Bangli," imbuhnya.

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di sela-sela acara menyampaikan, bantuan ini merupakan komitmen Badung berbagi dari Badung untuk Bali dengan berlandaskan *Tri Hita Karana*. Komitmen ini dipegang teguh untuk meringankan beban pribadi serta komunal masyarakat. "Salah satu wujud nyata yang kita lakukan khususnya kepada *sameton* Kayu Selem Gwasong ini, kita berikan bantuan Rp 3 miliar untuk membangun pura kawitan yang ada di Songan yaitu Songan balik bukit. Ini adalah milik seluruh *krama* khususnya *sameton* Kayu Selem di wilayah Pulau Bali," jelasnya. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan dan membantu warga Pasek Kayu Selem Gwasong dalam melaksanakan *sradha bhakti* kepada Ida Bhatara Kawitan.

Dengan *tagline* "Badung Angelus Buana" Bupati Giri Prasta ingin menjalankan program Presiden Jokowi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Program inilah yang ingin diimplementasikan Bupati Giri Prasta dari Badung membangun Bali dari pinggiran. Dengan mulai merealisasikan pembangunan 2.000 rumah sehat layak huni untuk enam kabupaten di Bali, dengan anggaran Rp 100 miliar.

Berawal di Buleleng, diserahkan 450 unit yang diterima SCTPB (Sidetapa, Cempaga, Tigawasa, Pedawa dan Banyuseri) dan Desa Gerokgak. Di Tabanan 300 unit dan Jembrana 300 unit. Untuk di Bangli akan mulai dari Desa Songan balik bukit dan setelahnya akan dilaksanakan di Desa Terunyan. Begitu pula selanjutnya untuk Karangasem dan Klungkung. Setelah program bedah rumah tuntas, akan berlanjut dengan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada setiap keluarga untuk membuat usaha dengan bantuan Rp 15 juta.

Dalam kesempatan itu, Bupati Giri Prasta juga memberikan bantuan pribadi sebesar Rp 80 juta kepada panitia acara I Wayan Suyasa, guna mendukung pelaksanaan penyerahan bantuan dana hibah Bupati Badung untuk Warga Kayu Selem. **(ad1019)**

Edisi : Senin, 1 April 2019

Hal : 3

HARIAN UMUM NusaBali

Warga Pengelatan Bangun Jembatan Swadaya

Bermodal Rp 1,5 M, Perlu Dana Rp 7,5 M

Jembatan ini dulunya hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki karena kontruksinya hanya tiang pancang.

SINGARAJA, NusaBali

Warga Desa Pengelatan, Kecamatan Buleleng, Buleleng, bertekad tinggi mewujudkan jembatan dengan rencana anggaran belanja (RAB) Rp 7,5 miliar. Namun dana yang ada untuk mewujudkan jembatan ini hanya Rp 1,5 miliar. Denagn dana itu, pengerjaan fisik jembatan sudah mencapai 75 persen.

Jembatan dibangun di atas Tukad (sungai) Buwus untuk menghubungkan dua banjar di Desa Pengelatan, yakni Banjar Dinas Dauh Tukad dengan Banjar Kajanan. Jembatan dengan panjang 50 meter, lebar 6,5 meter dengan tinggi jembatan dari permukaan Tukad Buwus, sekitar 25 meter.

Dulunya, akses warga dari dua banjar itu hanya melintasi titi (jembatan kecil,Red) berukuran 1,5 meter, berada beberapa meter di atas Tukad Buwus. Jembatan ini dulunya hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki karena kontruksinya hanya tiang pancang. Jembatan itu pun diperkirakan dibangun di tahun 1970-an.

Seiring perkembangan jumlah penduduk, akses jembatan itu pun dinilai sangat vital. Karena selain menghubung dua banjar, terutama anak-anak dari Banjar Dauh Tukad yang bersekolah ke SD dan SMP yang lokasinya ada pusat desa. Jembatan itu juga memiliki akses menghubungkan beberapa desa bertetangga seperti Desa Petandakan, Pegadungan, dan Desa Nagasepaha. Akses jembatan itu juga kerap menjadi alternative terpendek saat upacara pemakaman jenazah ke Setra Desa Pakraman Pengelatan.

Menyusul perkembangan tersebut, para tokoh masyarakat Desa Pengelatan kemudian mengajukan proposal bantuan ke Pemprov Bali, melalui anggota DPRD Bali asal Buleleng.

Dalam proposal itu kebutuhan dana pembangunan jembatan itu sekitar Rp 7,5 miliar, sesuai perhitungan pihak desa dengan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buleleng.

Akhirnya pada Agustus 2018, proposal tersebut hanya mendapat dana sebesar Rp 1,5 miliar. Meski dananya masih terlalu jauh, pihak desa sepakat membangun. Jembatan itu kemudian mulai dikerjakan pada September 2018. "Karena dananya belum mencukupi, tetapi karena kami sejak lama memimpikan jembatan, kami bangun secara swadaya," ungkap salah satu tokoh masyarakat Desa Pengelatan, Wayan Soma Adnyana, di lokasi jembatan, Minggu (31/3).

Menurut Soma Adnyana yang juga panitia proyek jembatan, karena dana terbatas maka pihaknya kemudian menyesuaikan struktur bangunan dengan memanfaatkan batu kali yang ada di lokasi. Selain itu, penggunaan alat berat memanfaatkan milik pribadinya secara gratis. "Tadinya mau pakai baja, tetapi karena dana terbatas, kami manfaatkan batu kali yang ada sebagai dingding dan senderan. Disamping itu, saya punya alat berat dipakai disini. Jadi ini sangat membantu pengiritan biaya, tanpa mengurangi kekuatan jembatan," terang Soma Adnyana.

Ia berharap Pemprov Bali dan kabupaten tetap memberi perhatain agar jembatan tersebut bisa diwujudkan. Karena saat ini, pekerjaan jembatan baru mencapai 75 persen. "Kami belum tahu, kapan jembatan ini bisa terwujud. Tetapi kami akan terus berusaha mewujudkan," tandasnya.

Perbekel Pengelatan Nyoman Budarsa mengaku desa belum bisa mengarahkan kucuran Dana Desa sekitar Rp 800 juta dalam APBDes untuk pembangunan jembatan di Tukad Buwus. Alasannya, kegiatan prioritas lainnya masih sangat mendesak. Disamping itu, jika dana desa diarahkan seluruhnya ke pembangunan jembatan, kemungkinan besar seluruh dana akan tersedot hanya untuk membangun jembatan. **k19**

Edisi : Senin, 1 April 2019
Hal : 12

HARIAN UMUM NusaBali

Bupati Badung Hibahkan Rp 3 M untuk Warga Pasek Kayuselem

• IST

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta didampingi Wabup Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta serahkan dana hibah untuk warga Pasek Kayuselem di wantilan Banjar Metra, Desa Yangapi, Tembuku, Sabtu (30/3).

BANGLI, NusaBali

Warga Pasek Kayuselem menerima hibah Rp 3 miliar dari Pemkab Badung. Dana hibah diserahkan langsung oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta kepada Ketua Umum Warga Pasek Kayuselem se-Bali Nusantara, Jro Susila, di wantilan Banjar Metra, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Bangli, Sabtu (30/3). Hibah tersebut direncanakan untuk pembangunan Pura Kawitan Pasek Kayuselem Gwa Song di Desa Songan, Kecamatan Kintamani.

Bupati Giri Prasta menyampaikan pemberian bantuan hibah Rp 3 miliar bertujuan meringankan beban warga Pasek Kayuselem Gwa Song yang saat ini tengah membangun pura kawitann di Desa Songan. Penyerahan bantuan hibah merupakan wujud dari penerapan Tri Hita Karana yang selama ini dijalankan Kabupaten Badung.

Bupati Giri Prasta berharap bantuan hibah yang diberikan dapat bermanfaat bagi warga Pasek Kayuselem Gwa Song. Bupati Giri Prasta juga berharap warga Pasek Kayuselem selalu bersatu dan kompak. "Tidak ada alasan tidak kompak. Kami berkomitmen membuat pasemetonan, saling parid, masidi kara, dan saling sembah," ungkapnya. Bupati Badung juga berpesan kepada semeton Pasek Kayuselem Gwa Song untuk tetap menjalankan konsep bhakti ring kawitan, tindih ring bhisama, dan guyub ring semeton.

Sementara Ketua Umum Warga Pasek Kayuselem se-Bali Nusantara, Jro Susila, menyampaikan terimakasih kepada Bupati Badung atas bantuan hibah Rp 3 miliar. Bantuan hibah ini sangat bermanfaat bagi warga Pasek Kayuselem Gwa Song dalam menyelesaikan pembangunan Pura Kawitan Pasek Kayuselem di Songan yang secara total membutuhkan anggaran Rp 10 miliar lebih. "Mudah-mudah ke depan bapak Bupati Badung dan Bapak Gubernur juga membantu peningkatan jalan menuju Pura Kayuselem yang sekarang dimiliki Bangli menjadi jalan provinsi. Peningkatan jalan itu sangat dibutuhkan karena saat karya, pamedek yang datang bisa mencapai puluhan ribu. Sementara jalan yang ada tidak cukup untuk menampung," harapnya.

Sementara Wakil Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, mengaku bangga melihat persatuan warga Pasek Kayuselem Gwa Song. Diharapkan persatuan ini dapat terus terjaga. Wabup Sedana Arta juga menyampaikan terimakasih atas hibah yang diberikan Kabupaten Badung kepada warga Pasek Kayuselem. Penyerahan bantuan hibah disaksikan ribuan warga Pasek Kayuselem se-Bali. Acara ini juga dihadiri Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata, anggota DPRD Bali Nyoman Adnyana, Muspika Tembuku, serta tokoh masyarakat setempat. **@ esa**

Edisi : Senin, 1 April 2019

Hal : 8

HARIAN UMUM
NusaBali

Pembangunan Duplikat Jembatan Tukadaya

Didanai Rp 14 Miliar, Ditarget Rampung Akhir Tahun Ini

NEGARA, NusaBali

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai mengerjakan proyek duplikasi jembatan Tukadaya di Jalan Umum Denpasar – Gilimanuk wilayah perbatasan antara Kecamatan Negara dan Kecamatan Melaya, Jembrana. Proyek duplikasi jembatan yang tengah digarap rekanan PT Trijaya Nasional, dengan nilai kontrak sebesar Rp 14.393.171.000, itu ditargetkan rampung akhir 2019 ini.

Berdasar pemantauan pada Minggu (31/3), penggarapan duplikasi jembatan di sebelah timur jembatan Tukadaya, itu sementara masih dalam proses penggalian tanah, dan persiapan membangun senderan di sisi selatan sungai. Dalam membangun jembatan baru itu, pihak Balai Besar Pelaksanan Jalan Nasional (BBPJN) VIII pada Kementerian PUPR memastikan tidak ada pembebasan lahan masyarakat, dan hanya menggunakan lahan aset negara.

Salah satu staf PT Trijaya Nasional, Agung Sastra, Minggu kemarin, mengatakan untuk panjang jembatan duplikasi itu sama dengan jembatan di sebelahnya, yakni 40 meter. Namun untuk jalan pada jembatan baru itu akan dibuat selebar 7 meter, atau lebih lebar 1 meter dibanding yang lama. "Selain jalan lebih lebar, di sisi-sisi jalan jembatan yang baru, itu juga akan diisi trotoar selebar 1 meter," ujarnya. Dia optimistis penggarapan duplikat jembatan itu, dapat rampung sesuai tenggat waktu.

Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 03 Jalan Nasional Cekik-Batas Kota Tabanan BBPJN VIII Grace Agustina Togatorop, mengatakan sebelum mulai penggarapan, dari pihak BBPJN VIII juga telah memastikan batas tanah aset lahan negara yang digunakan untuk pembangunan jembatan baru tersebut. "Yang digunakan pembangunan memang lahan aset negara. Warga sekitar juga yang memberikan informasi di mana titik-titik patok batas tanah negara di lokasi sekitar," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan duplikat itu bertujuan mengurangi kepadatan arus lalu lintas maupun beban di jembatan Tukadaya yang ada saat ini. Nantinya, setelah terbangun jembatan kembar, maka arus lalu lintas dari arah Denpasar serta Gilimanuk akan dibagi satu jalur. Untuk jembatan baru, akan digunakan arus lalu lintas dari arah Gilimanuk. Sedangkan jembatan yang lama, akan digunakan arus lalu lintas dari arah Denpasar. Selama pengerjaan duplikat jembatan dengan batas waktu hingga 25 Desember 2019 itu, pihaknya juga memastikan tidak akan mengganggu arus lalu lintas dari arah Denpasar serta Gilimanuk.

Menurut Grace, pembangunan jembatan baru itu juga akan dilengkapi trotoar. Pembangunan trotoar pada jembatan baru itu akan menjadi akses pejalan kaki yang tidak mendapat akses di jembatan yang ada saat ini, yang tanpa dilengkapi trotoar. "Ada trotoar untuk pejalan kaki. Setelah jembatan yang baru jadi, kami juga rencanakan pembangunan trotoar di jembatan yang lama. Tetapi pembangunan trotoar di jembatan yang lama itu masih kami bahas," tandas Grace. **ode**

Edisi : Senin, 1 April 2019
Hal : 7

RADAR BALI

Habis Rp 1,5 Miliar, Kini Mandeg

PENGLATAN – Warga di Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, kini resah. Pembangunan jembatan penghubung antara Banjar Dinas Dauh Tukad dengan pusat desa kini mangkrak. Dana yang dihabiskan pun sudah cukup besar. Warga pun berharap pemerintah turun tangan memberikan bantuan, agar jembatan itu bisa segera dilintasi.

Keberadaan jembatan tersebut sangat strategis bagi warga yang tinggal di Banjar Dinas Dauh Tukad. Terutama untuk menuju sekolah, baik itu tingkat SD maupun SMP. Jembatan itu juga diharapkan bisa digunakan warga untuk jalur pemakaman menuju Setra Desa Pakraman Penglatan.

Selama ini warga di Banjar Dinas Dauh Tukad dengan pusat desa, memang terpisah dengan sungai. Akibatnya warga harus menggunakan jalan memutar. Baik itu melalui simpang empat Banyuning, atau melalui jalan di dekat perbatasan antara Desa Penglatan dengan Desa Petandakan.

Tokoh masyarakat Desa Penglatan Wayan Soma Adnyana mengatakan, jembatan yang membentang di atas Tukad Buwus itu dirancang memiliki lebar 5,6 meter dengan panjang 50 meter. Hingga kini pekerjaan baru mencapai angka 75 persen. Jembatan itu sudah sejak lama diidam-idamkan warga yang tinggal di Banjar Dinas Dauh Tukad, maupun Banjar Dinas Kajanan.

Menurut Soma, jembatan itu dibangun secara swadaya. Sejauh ini panitia pembangunan baru mendapat suntikan dana sebesar Rp 1,5 miliar. "Kebetulan ada anggota DPRD Provinsi dari Desa Penglatan. Beliau memberikan bantuan Rp 1,5 miliar lewat bansos provinsi. Sisanya ya swadaya warga di sini," kata Soma. Tadinya warga hendak membangun dengan struktur

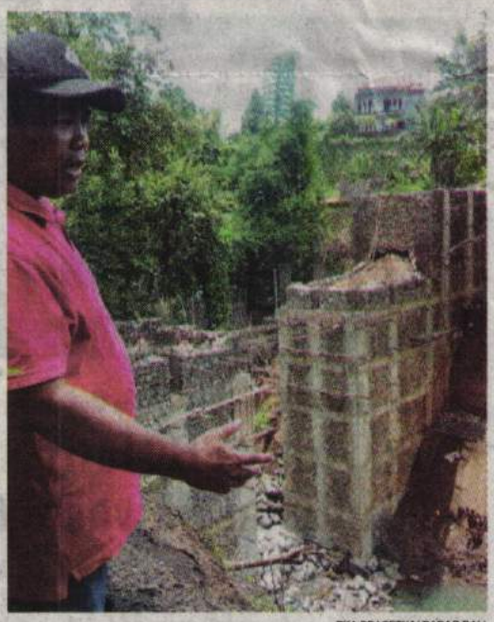

EKA PRASETYA/ RADAR BALI

SWADAYA: Jembatan penghubung Banjar Dinas Dauh Tukad dengan pusat Desa Penglatan yang proyeknya mandeg.

bajar. Namun dari hitung-hitungan, biayanya cukup besar. Terpaksa struktur diubah menjadi batu beton. Batu yang dibutuhkan pun diambil dari dasar sungai. "Semuanya swadaya ini. Perlu batu, diambil dari sungai. Perlu alat berat, saya pinjamkan. Pokoknya biar jadi saja jembatan ini, sehingga warga di sini bisa lebih dekat jarak tempuhnya," imbuh dia. Ia pun berharap pemerintah bersedia membantu proses pembangunan jembatan tersebut. Mengingat keberadaan jembatan itu telah menjadi harapan warga selama puluhan tahun. **(eps/gup)**

Edisi : Senin, 1 April 2019

Hal : 10

Radar Bali

Tabanan Bentuk Klinik Siskeudes

Dana Desa untuk Kembangkan Potensi Desa

TABANAN – Tak mau main-main dan khawatir salah pos anggaran pengelolaan keuangan yang ada di desa membuat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Tabanan membentuk klinik siskeudes. Tujuan klinik ini dibentuk agar pemerintah desa lebih profesional dan akuntabel dalam mengelola keuangan desa. Ini dianggap penting mengingat melimpahnya kucuran dana bagi desa yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Kepala DPMD Tabanan, Roemi Liestyowati mengatakan klinik siskeudes sudah berjalan selam 4 tahun. Dengan maksud agar para operator di tiap desa yang mengalami kesulitan dalam menjalankan sistem aplikasi siskeudes dapat diberikan pendampingan dan pemahaman. "Dari klinik ini kami terima keluhan rata-rata setiap hari sekitar lima orang yang datang dari desa untuk mendapatkan pendampingan. Setelah itu barulah petugas dari klinik ini bersama tim kabupaten turun langsung ke desa guna melakukan pendampingan," ujar Roemi Minggu (31/3).

Roemi menambahkan dalam perjalanan mengelola aplikasi sistem keuangan desa. Pihak desa banyak yang salah dalam hal pos anggaran. Sehingga perlu melakukan pendampingan. Sistem terus mengalami perkembangan, mau-mau tidak mau menuntut setiap operator di tiap desa siap untuk belajar terhadap perubahan tersebut.

Disamping itu aparatur pemerintahan desa harus mampu menguasai Siskeudes. Karena sistem ini diciptakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk membantu desa agar tertib dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan keuangan desa. "Klinik siskeudes yang kami bentuk sangat membatu operator desa dalam pelaksanan pengelolaankeuangan desa yang pelaporan bersasis aplikasi," kata Roemi.

Dijelaskan Roemi saat ini dana desa tahun 2019 mengalami peningkatan dari sebelumnya di tahun 2018 sebesar Rp 101 miliar menjadi Rp 118 miliar di tahun 2019. Besaran dana desa yang didapat 133 desa di Kabupaten Tabanan tentunya bervariasi. Itu tergantung pada luas wilayah, topografi keadaan wilayah, jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin di desa tersebut.

Semakin luas wilayahnya dan jumlah penduduk. Maka dana desa akan semakin besar yang didapat. Penentuan berapa jumlah besaran dana desa langsung dari Kemendes Pusat. "Kami berharap dana desa yang begitu besar agar dikelola secara baik dan tepat sasaran. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban," pungkasnya.

Sementara itu di Karangasem sebanyak 75 Desa sudah mendapatkan dana desa. Rata rata dana desa tersebut sebesar Rp 1 miliar pertahun. Dana ini langsung di transfer pemerintah pusat ke Desa. Peruntukannya untuk mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat. Besarannya juga tergantung jumlah penduduk miskin di Desa tersebut.

Menurut Kadis Pemperdayaan Masyarakat Desa (PMD) Komang Agus Sukasena kemarin besaran dana desa dipengaruhi oleh beberapa factor. Diantaranya adalah banyaknya penduduk miskin di desa tersebut. "Jadinya besaran dana desa tergantung kondisi Desa tersebut," ujarnya.

Di Karangasem, rata rata per tahun mendapatkan Rp 800 juta per Desa. Dana ini untuk pemberdayaan masyarakat tidak mampu. Selain itu, dana desa juga bisa untuk membagun insfratruktur pedesaan. Diantaranya adalah jalan desa. Selain itu bisa juga dipergnakan untuk pengelolaan sumber air bersih serta untuk mengembangkan desa yang memiliki sumber daya alam.

Potensi desa desa yang ada tersebut wajib di atahkan dan di kelola nantinya pengelolaanya oleh BUMDes. Selain itu, bisa mengelola SDA, karena sudah ada unit-unitnya. Di Karangasem BUMDes sudah memiliki empat unit. Diantaranya simpan pinjam, perdagangan umum, pengelolaan air bersih dan sarana olahraga atau Sorga. Namun khusus untuk Sorga hanya ada di Desa Menanga, Rendang. **(uli/tra/rid)**

Edisi : Senin, 1 April 2019
Hal : 17

HARIAN UMUM NusaBali

Dispar Gandeng Jasa Konsultansi untuk Gali Potensi Desa Wisata

MANGUPURA, NusaBali

Pemkab Badung saat ini telah memiliki 11 desa wisata yang ditetapkan melalui Perbup Nomor 47 Tahun 2010. Untuk upaya pengembangan, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung bakal melakukan penajaman potensi di masing-masing desa wisata tersebut, sehingga bisa lebih dikembangkan demi memikat wisatawan supaya mau datang berkunjung.

Berdasarkan Perbup Nomor 47 Tahun 2010, 11 desa wisata di Badung adalah Desa Kerta, Desa Petang, Desa Pangsan, Desa Belok Sidan, Desa Carangsari, Desa Sangeh, Desa Bongkasa Pertiwi, Desa Baha, Desa Munggu, Desa Mengwi, dan Desa Kapal. Penetapan ini dilakukan oleh Bupati Badung AA Gde Agung pada 15 September 2010.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung I Made Badra, mengatakan dalam upaya untuk mempertajam masing-masing desa perlu dilakukan kajian mendalam. Setelah ditemukan potensi yang bisa dikembangkan, barulah penataan akan dilakukan.

Menurut dia, pihaknya kini melakukan tahap lelang Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan 11 Desa Wisata di Kabupaten Badung. "Saat ini lelang sedang berlangsung, dan kami anggarkan untuk jasa konsultansi ini Rp 1,1 miliar," ungkap Badra, Senin (1/4).

11 Desa Wisata di Kabupaten Badung Berdasar Perbup Nomor 47 Tahun 2010

No	Desa	Kecamatan
1.	Kerta	Petang
2.	Petang	Petang
3.	Pangsan	Petang
4.	Belok Sidan	Petang
5.	Carangsari	Petang
6.	Sangeh	Abiansemal
7.	Bongkasa Pertiwi	Abiansemal
8.	Baha	Mengwi
9.	Munggu	Mengwi
10.	Mengwi	Mengwi
11.	Kapal	Mengwi

Birokrat asal Kuta ini menambahkan, penyedia jasa konsultansi ini akan menggali potensi serta perwajahan sesungguhnya dari 11 desa wisata yang ada sekarang. Pihak jasa konsultansi ini juga yang akan membuat masterplan serta detail engineering design (DED). "Kami tentu berharap melalui pengembangan ini, semua dewa wisata di Badung benar-benar optimal," tegasnya.

Kendati begitu, sesuai arahan Bupati, Dispar Badung akan fokus dulu menata lima desa wisata. Selebihnya menyusul secara bertahap. "Semua kami gali potensinya. Tapi sementara yang dikembangkan lima desa wisata sesuai arahan bapak bupati. Ini kami lakukan, agar potensi-potensi di setiap desa wisata kami ketahui," kata Badra. Lima desa wisata dimaksud adalah Desa Pangsan dan Desa Carangsari di Kecamatan Petang, serta Desa Bongkasar Pertiwi, Desa Baha, dan Desa Sangeh di Kecamatan Abiansemal.

Dalam beberapa kesempatan, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta meminta supaya Dinas Pariwisata menggali potensi desa wisata dengan n melibatkan seluruh komponen masyarakat. "Seluruh komponen masyarakat di desa harus mengetahui bagaimana gambaran konsep desa wisata ke depan," ujarnya.

Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Dinas LHK) pun harus dilibatkan dan saling mendukung. "Untuk taman telajakan menjadi tanggung jawab Dinas LHK, jalan dan drainase milik PUPR, jadi semuanya saling mendukung menjadi satu kesatuan," tegas Bupati Giri Prasta.

Bupati berjanji penataan desa wisata tidak berhenti hanya di lima desa wisata, tapi akan bertahap. "Tahun 2019 kita selesaikan lima desa wisata ini, selanjutnya tahun 2020 akan kita lanjutkan ke desa lainnya," tuturnya. asa

Edisi : Selasa, 2 April 2019
Hal : 2

Tribun-Bali

Desa Wajib Kembalikan Uang Karcis Rp 11 Miliar

GIANYAR, TRIBUN BALI – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gianyar akhirnya menyerahkan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) karcis masuk obyek wisata Tirta Empul, Tampaksiring, pada Inspektorat Pemkab Gianyar. Alasannya, pihak kepolisian tak menemukan adanya unsur pidana atau unsur memperkaya diri sendiri. Sebab, uang penjualan karcis senilai Rp 11 miliar yang tidak diserahkan Desa Pakraman Manukayalet ke kas Pemkab Gianyar, semua digunakan untuk kepentingan adat.

Kasatreskrim Polres Gianyar, AKP Deni Setiawan, Senin (1/4) mengatakan, keputusan itu diambil setelah kepolisian melakukan penyelidikan sekitar empat bulan.

Penyelidikan itu meliputi pemeriksaan berbagai saksi, mulai dari pihak Desa Pakraman Manukayalet, unsur terkait di Pemkab Gianyar, serta sejumlah saksi ahli. Juga mempertimbangkan hasil rapat kerja DPRD Bali tentang penanganan kasus

BERSAMBUNG ➔ HAL 7

OTT Tirta Empul beberapa waktu lalu.

"Hasil dari pemeriksaan kami terhadap saksi-saksi, bendesa, prajuru serta saksi-saksi lain, itu menjelaskan bahwa uang yang tak diserahkan ke Pemkab Gianyar dari tahun 2013 sampai 2018, semua digunakan untuk kepentingan desa adat, yaitu persembahyangan dan perbaikan pura. Karena memang kami tidak menemukan unsur memperkaya diri sendiri, jadi kasus ini kami limpahkan ke inspektorat. Surat pelimpahan telah diserahkan pada 26 Maret 2019 dan sudah diterima oleh kepala Inspektorat Gianyar," ujar Deni di ruang kerjanya kemarin.

Pelimpahan dari kasus pidana ke perdata ini, imbuh Deni, tak berarti Desa Pakraman Manukayalet terbebas dari tanggung jawab.

Meskipun uang penjualan karcis yang tak diserahkan ke Pemkab Gianyar ini dipakai untuk kepentingan adat, namun Desa Pakraman Manukayalet wajib mengembalikan semua uang tersebut. Sebab, perbaikan infrastruktur dan kepentingan adat semestinya menggunakan hasil dari uang bagi hasil pemungutan karcis. Dalam hal ini, Pemkab Gianyar mendapat bagian 60 persen, sementara Desa Manuakayalet sebesar 40 persen.

Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar, I Made Juanda membenarkan, pihaknya telah menerima surat pelimpahan OTT karcis Tirta Empul.

"Kemarin setelah dilakukan gelar perkara, oleh teman dari polres, jadi dilimpahkan ke inspektorat. Karena memang ada kesepakatan sejak awal dan juga dari Polda, untuk OTT Tampaksiring kan konsepnya pemulihan. Setoran berapapun yang ditemukan hasil audit, akan dikembalikan. Tidak melalui jalur pidana. Hasil penjualan karcis yang belum disetorkan ke kami ada Rp 11 miliar," jelas Juanda.

Saat ini, Inspektorat Kabupaten Gianyar hanya tinggal menunggu Desa Pakraman Manukayalet mengembalikan uang sesuai hasil audit itu.

Pihak inspektorat memberikan kebijakan, pengembalian uang ini bisa dicicil hanya saja tidak boleh melewati batas waktu 10 bulan.

"Pengembalian boleh dicicil, tapi paling lama 10 bulan lah," ujar Juanda.

Seandainya uang tersebut tidak dikembalikan, apakah kasus ini akan dikembalikan ke hukum pidana?

Juanda meyakini hal tersebut tak terjadi. Sebab sebelum kasus ini dilimpahkan ke inspektorat, Desa Pakraman Manukayalet telah menyepakati akan mengembalikan uang tersebut.

"Kan sudah ada semacam surat pernyataan, yang intinya desa pakraman akan mengembalikan sesuai dengan hasil audit inspektorat," ujarnya. **(weg)**

Edisi : Selasa, 2 April 2019
Hal : 1

Bali Post

Dispar Cari Formula Kembangkan Desa Wisata

Mangupura (Bali Post) -

Sektor pariwisata menjadi ujung tombak pendapatan Kabupaten Badung. Tak salah jika pemerintah setempat melalui Dinas Pariwisata (Dispar) berupaya mencari formula guna menggali potensi yang ada. Salah satunya menggarap potensi desa wisata. Kadispar Badung I Made Badra mengatakan, setidaknya akan ada lima desa wisata yang akan dikembangkan pada 2019. Bahkan pihaknya akan melakukan kajian terhadap semua desa wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Badung.

"Kami masih melakukan kajian untuk pengembangan desa wisata yang ada di Kabupaten Badung. Pengembangan desa wisata akan dilakukan setelah dilakukan pengkajian terhadap desa wisata itu sendiri, sehingga desa wisata tidak monoton dengan desa wisata lainnya," ujar Made Badra, Senin (1/4) kemarin.

Sesuai Perbup Nomor 47 Tahun 2010, sebanyak 11 desa wisata telah ditetapkan yakni Desa Kerta, Desa Petang, Desa pangsan, Desa Belok Sidan, Desa Carangsari, Desa Sangeh, Desa Bongkasa Pertiwi, Desa Baha, Desa Munggu, Desa Mengwi dan Desa Kapal.

"Dalam menggali potensi desa wisata, kami melakukan tahap lelang jasa konsultansi perencanaan penataan 11 desa wisata di Kabupaten Badung. Jasa konsultasi ini dianggarkan sebesar Rp 1,1 miliar lebih," jelasnya.

Lebih jauh dijelaskan, jasa konsultasi perencanaan ini akan memaparkan potensi, perwajahan, roh serta kondisi fisik dari masing-masing desa wisata. Sehingga semua desa wisata yang ada di Kabupaten Badung benar-benar dioptimalkan. Konsultan akan membuat *masterplan* serta *detail engineering design* (DED).

"Semua kami gali potensinya, tapi sementara yang dikembangkan lima desa wisata sesuai arahan Bapak Bupati. Ini kami lakukan, agar potensi-potensi di setiap desa wisata kami ketahui," jelasnya.

Disinggung kapan akan dilakukan penataan pada desa wisata tersebut, pihaknya mengatakan setelah DED rampung. Setelah lima desa, barulah akan dilakukan penataan desa wisata yang lain. "Kami tidak mau bekerja satu-satu. Potensi kita gali semuanya, dikembangkan hanya lima. Sehingga tahun berikutnya ada anggaran kami hanya tinggal mengembangkan dan menatanya," katanya.

Seperti diketahui, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta meminta Dispar Badung untuk menata lima desa wisata yang ada di Kabupaten Badung. Kelima desa wisata tersebut yakni Desa Sangeh, Desa Pangsan, Desa Bongkasa Pertiwi, Desa Carangsari dan Desa Mengwi. **(kmb27)**

Edisi : Selasa, 2 april 2019

Hal : 3

Bali Post

Bantuan Komunal Banyak Disiasati Masyarakat

Mangupura (Bali Post) -

Kebijakan Pemkab Badung dalam upaya melestarikan seni, budaya dan agama yang berlandaskan *Tri Hita Karana*, banyak dimanfaatkan masyarakat. Salah satunya bantuan komunal yang bertujuan meringankan beban masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan adat dan keagamaan. Namun sayangnya banyak masyarakat yang justru menyiasati proposal permohonan bantuan agar mendapatkan bantuan lebih.

Parahnya, proposal yang diajukan seperti bantuan dana upacara agar masyarakat tidak lagi mengeluarkan urunan justru digelembungkan. Kepala Dinas Kebudayaan Ida Bagus Anom Bhasma tak menampik prihal tersebut. "Saya bingung ada proposal yang RAB-nya harga *pejati* Rp 2 juta, *bebangkit* Rp 40 juta. Apa itu kebo gulingnya?" ungkap Anom Bhasma di Wantilan Pura Petitenget, Minggu (31/3) lalu.

Kendati Bupati Badung Nyoman Giri Prasta telah menginstruksikan untuk membantu meringankan beban masyarakat, namun pihaknya berharap masyarakat tidak memanfaatkan kebijakan tersebut sebagai peluang mendapatkan bantuan lebih. "Bapak Bupati memang menginstruksikan kepada saya untuk membantu masyarakat yang melaksanakan upacara, namun bukan berarti semua dibebankan ke pemerintah," ujarnya.

Tak hanya itu, sejumlah masyarakat juga memanfaatkan bantuan pembangunan pura sehingga pihaknya terpaksa menghentikan sementara penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk *paibon*, *pasimpangan*, *merajan ageng*, dan *merajan alit*. "Karena selama ini banyak yang mencari Surat Keterangan Terdaftar, bahkan satu pura diajukan empat untuk mendapatkan bantuan lebih, jadi kami harus mendata ulang lagi. Saya takutnya ketika diberikan nanti harus mengembalikan lagi," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dinas Kebudayaan Badung telah menerbitkan SKT untuk 5.533 pura. Penerbitan SKT ini berdasarkan status pura. SKT adalah untuk pura berstatus Sad Kahyangan, Dang Kahyangan, Kahyangan Jagat, Kahyangan Tiga, Paibon, Pemaksan (*dadia, panti, kawitan*), Kahyangan Desa, dan Swagina. Dari angka tersebut, yang paling banyak didaftarkan adalah pura *pemaksan* yang mencapai 2.170 pura. Kemudian pura *swagina* sebanyak 1.219 pura, *paibon* sebanyak 988 pura, Kahyangan Desa 729 pura, Kahyangan Tiga 392 pura, Kahyangan Jagat 28 pura, Dang Kahyangan lima pura, dan Sad Kahyangan sebanyak dua pura. **(kmb27)**

Edisi : Selasa, 2 April 2019
Hal : 3

Bali Post

Kasus OTT Tirta Empul Dilimpahkan ke Inspektorat

Dikonfirmasi Senin (1/4) kemarin, Kasat Reskrim Polres Gianyar AKP Deni Septiawan menerangkan, kasus OTT Pura Tirta Empul saat ini dilimpahkan ke Inspektorat Kabupaten Gianyar, karena berdasarkan hasil gelar perkara hanya terindikasi terkena sanksi administrasi. Dikatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan uang yang digunakan untuk memperkaya seseorang. Bahkan, diakuinya, semua digunakan untuk kepentingan persembahyangan dan perbaikan pura. "Hasil pemeriksaan kami dengan saksi, *prajuru*, dan bendesa, uang pungutan itu sejak 2013 sampai 2018, semua digunakan untuk kepentingan desa dan tidak ditemukan untuk keuntungan pribadi maupun memperkaya diri, sehingga kami limpahkan ke Inspektorat dengan nomor surat 103 pada 26 Maret 2019," ujarnya.

Deni Septiawan mengatakan, yang mendasari dalam penanganan kasus itu adalah perjanjian kerja sama Mendagri dengan Kejaksaan bersama pihak Kepolisian. Selanjutnya, berdasarkan hasil rapat kerja antara Polda Bali dan DPRD Provinsi Bali di Renon merekomendasikan kepolisian untuk memberikan tindakan persuasif. "Melakukan tindakan persuasif, sepanjang sesuai *awig-awig*, *pararem* dan keputusan desa pakraman. Atas dasar itu pula, maka penanganan kasus Tirta Empul ini dibawa ke Inspektorat," jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Inspektur Inspektorat Kabupaten Gianyar I Made Juanda menjelaskan, sesuai kesepakatan awal OTT Tirta Empul konsepnya pemulihan. Yakni dengan menghitung jumlah setoran yang ditemukan dan yang akan dikembalikan, sehingga tidak menggunakan jalur hukum atau pidana. "Yang jelas terdapat Rp 11 miliar. Sudah dilakukan gelar perkara, namun sekarang konsepnya pemulihan dan tidak diteruskan ke pengadilan," terangnya.

Juanda menambahkan, jumlah uang Rp 11 miliar itu merupakan hasil pemeriksaan uang karcis sejak 2013 sampai 2018. Total uang itu digunakan sebagai perbaikan pura dan persembahyangan. "Memang di sana Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar melakukan kerja sama dengan masyarakat. Khususnya desa pakraman, bahwa ada pemungutan karcis oleh desa pakraman pada pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 Wita. Pembagiannya 40 persen desa pakraman dan 60 persen ke Pemkab. Sesuai surat pernyataan bahwa desa pakraman akan mengembalikan sesuai hasil audit Inspektorat dan pengembaliannya sesuai kesepakatan, dicicil berapa bulan atau gimana," katanya.

Ketua Gappar Kabupaten Gianyar Ngakan Made Rai menilai ada sejumlah keanehan dalam kasus ini. Apalagi dari Pemkab Gianyar melalui Inspektorat telah menghitung kerugian negara yang berjumlah mencapai Rp 11 miliar. Maka dari itu, Gappar membawa kasus itu kepada Kejari Gianyar, Jumat (29/3) lalu. "Kami harap Kejaksaan bisa menangani kasus OTT tersebut," pintanya.

Surat tersebut ditembuskan ke Kejaksaan Tinggi Bali dan Kapolda Bali. Dalam surat itu berisi satu paragraf. "Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi adalah sudah komitmen bagi bangsa ini. Untuk itu kami melaporkan kasus OTT Tirta Empul yang jelas-jelas merugikan keuangan daerah yang jumlahnya begitu fantastis (Rp 11 miliar) hasil audit. Tapi hanya cukup dengan pengembalian uang dan kasusnya dianggap selesai. Maka kami menunggu tindak lanjut secepatnya". Pihaknya berharap kepada Kejari Gianyar, apabila ada laporan dari masyarakat, laporan dugaan pidana korupsi, tidak usah mempertimbangkan pemilu maka ditunda. "Hukum tidak ada kaitannya dengan politik," tegasnya.

Ngakan Rai berjanji siap membantu Kejari maupun instansi hukum lainnya untuk penggalian data. "Kami siap membantu untuk memberikan data mengenai adanya kejanggalan-kejanggalan di Kabupaten Gianyar," ujarnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Gusti Agung Puger belum bisa memberikan komentar mengenai surat dari Gappar tersebut. Terlebih kasus OTT itu ditangani oleh Polres Gianyar. **(kmb35)**

Edisi : Selasa, 2 April 2019

Hal : 9

Bali Post

Tercecer, 85 Subak Belum Dapat Bantuan Provinsi

Bangli (Bali Post) –

Sebanyak 85 subak di Kabupaten Bangli belum mendapat bantuan dana dari Provinsi Bali. Selain subak, satu desa pakraman juga mengalami nasib serupa. Kenyataan itu diungkapkan langsung Bupati Bangli I Made Gianyar saat acara tatap muka Gubernur Bali bersama seluruh komponen masyarakat Bangli di Wantilan Desa Adat Penglipuran, Minggu (31/3) lalu.

Made Gianyar mengatakan, banyaknya subak yang tak mendapat bantuan karena adanya kesalahan pada pendataan, sehingga menyebabkan puluhan subak itu tercecer. "Di Bangli saat ini sudah ada 318 subak yang mendapat bantuan dari Provinsi. Tapi masih ada 85 subak yang tercecer, belum dapat bantuan," terangnya.

Sementara satu desa pakraman yang disebutnya belum terdaftar untuk mendapat bantuan yakni desa, Pakraman Peradi Juntal. Desa pakraman itu tercecer karena lokasinya berada di balik bukit. "Karena di balik bukit, tidak dapat informasi sehingga tidak didaftarkan," ujarnya.

Made Gianyar mengatakan, untuk memberikan bantuan terhadap puluhan subak yang tercecer itu, Pemkab Bangli selama ini terpaksa menganggarkan dana bantuan dari APBD Bangli senilai Rp 50 juta untuk masing-masing subak. Menurut Made Gianyar, jika saja puluhan subak dan satu desa pakraman itu bisa masuk dalam data penerima bantuan pemerintah provinsi, maka tentu akan sangat meringanan beban APBD Bangli. "Karena itu melalui kesempatan ini, saya akan menyerahkan dua dokumen usulan kepada Bapak Gubernur. Kalau ini bisa diterima Provinsi, tentunya akan meringankan beban APBD Bangli yang sudah kecil," harapnya.

Menanggapi pernyataan Bupati Made Gianyar, Gubernur Bali Wayan Koster dalam kesempatan tersebut meminta Pemkab Bangli agar secepatnya mengajukan usulan pemberian bantuan untuk subak dan desa pakraman yang tercecer itu. Sehingga bisa segera dianggarkan pemerintah Provinsi Bali. Koster kala itu sempat memuji keberadaan subak di Kabupaten Bangli karena jumlahnya yang masih banyak dan lestari. Dia membandingkan dengan subak di kabupaten lainnya yang kini mulai berkurang akibat alih fungsi lahan. **(kmb40)**

Edisi : Selasa, 2 April 2019

Hal : 19

RADAR BALI

BEDAH RUMAH

Belasan Desa Belum Setor Data, Bupati Ancam Tinggal

SEMARAPURA- Belasan desa di Kabupaten Klungkung hingga saat ini belum menyetorkan jumlah rumah tidak layak huni. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta akhirnya memberikan *deadline* seminggu. Suwirta saat ditemui kemarin mengatakan, Pemkab Klungkung akan menuntaskan bedah rumah tidak layak huni tahun 2020. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp 10 miliar lebih. "Kalau membutuhkan anggaran Rp 10 miliar pun akan kami tuntaskan. Saya akan minta untuk menyisihkan pekerjaan yang lain dulu. Karena ini kebutuhan dasar *kan*. Jangan sampai kami mengambil pekerjaan setengah-setengah untuk orang kurang mampu. Untuk orang kurang mampu tidak boleh ditunda," kata Suwirta kemarin (1/4).

Bupati menambahkan, dia masih mendengar ada desa yang belum mengumpulkan data jumlah rumah tidak layak huni masyarakat Klungkung berpenghasilan rendah. Padahal, sudah melewati batas waktu pengumpulan data. Menurutnya, pihak desa sudah kerap diwanti-wanti. Bahkan secara resmi melalui surat telah diminta untuk mengumpulkan data tersebut paling lambat akhir Maret. Hanya saja sampai awal April ini, masih saja ada desa yang belum menyetorkan data yang diminta. "Kami akan tunggu hingga minggu pertama bulan April. Kalau masih ada yang belum menyetor, maka kami tinggal. Ini terlihat bahwa tidak semua desa mempunyai respons yang cepat terhadap masalah yang dihadapi masyarakatnya. Padahal kabupaten yang akan menyelesaikan semua. Sebenarnya data ini satu hari saja bisa selesai *kok*," ucapnya.

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Wayan Wirata menambahkan dari total 59 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Klungkung sebanyak 19 desa belum mengumpulkan data jumlah rumah tidak layak huni. Belasan desa tersebut tersebar di Kecamatan Nusa Penida sebanyak sembilan desa, Kecamatan Klungkung lima desa, Kecamatan Dawan tiga desa, dan Kecamatan Banjarangkan sebanyak dua desa. "Sementara total usulan yang telah masuk namun belum diverifikasi sesuai dengan kriteria sebanyak 1.182 unit usulan bedah rumah, dan 2.733 unit usulan rehab rumah," bebernya.

Terkait dengan desa-desa yang belum menyetorkan data, pihaknya mengaku telah menghubungi desa-desa tersebut, baik lewat telepon, WhatsApp maupun secara langsung. "Saat kami hubungi, katanya masih menunggu data yang dikirim kepala dusun. Sementara kepala dusunnya menyatakan di bawah masih banyak ada upacara dan kesibukan. Tapi kami sudah minta biar segera mengirim dan besok akan kami surati," tandasnya. **(ayu/dot)**

Edisi : Selasa, 2 April 2019

Hal : 2

Radar Bali

BPKP Dan Inspektorat Gelar Workshop Tata Kelola Keuangan Desa

NEGARA –Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah pusat selama 4 tahun terakhir ini mengalami peningkatan cukup signifikan. Namun niat baik pemerintah untuk memajukan pembangunan di desa khususnya meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakat desa ternyata masih dinodai oleh ulah segelintir oknum perangkat desa.

Pasalnya, DD yang digunakan berdasarkan aturan dan ketentuan yang jelas ternyata masih ada perangkat desa di Bali yang memanfaatkan tidak sesuai aturan dan ketentuan.

Itu diungkapkan Kasubdit 3/Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bali, Ida PutuWedanajati, SH, MH selaku Narasumber mengawali pemaparannya pada *workshop* Tata Kelola Keuangan Desa, Senin (1/4).

Dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat 4 tahun trakhir jumlahnya terus meningkat sangat signifikan. Tahun 2015 sebesar Rp.20,67 triliiun, tahun 2016 sebesar Rp. 46,98 triliun, tahun 2017 dan tahun 2018 naik menjadi Rp. 60 triliun dan untuk tahun 2019 Rp. 70 triliun." Kedepan, agar benar-benar peruntukaanya sesuai aturan dan ketentuan yang ada maka penggunaan dana desa perlu dikawal, didampingi sehingga pemanfaatannya yang difokuskan untuk mengurangi kemiskinan, mengembangkan ekonomi produktif serta menggerakkan industri kecil pedesaan dapat terlealisasi dengan baik tanpa ada penyimpangan, " ujarnya.

Sementara Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmanto, mengaku *workshop* yang digelarnya itu untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan perangkat desa dalam tata kelola Siskeudes. "Saat ini kemampuan perangkat desa khususnya SDM sangat berbeda-beda. Sementara dana yang dikucurkan pemerintah pusat ke desa sangat besar. Untuk menghindari penyimpangan dari ketentuan dan aturan yang ada, kita kekerjasama dengan Inspektorat Jembrana untuk melakukan pengawalan dan pengawasan secara kontinyu. Ini dimaksudkan agar dikemudian hari tidak ada perangkat desa yang terjerat kasus-kasus hukum akibat dari penyalahgunaan pemanfaatan anggaran di desa," tegasnya.

Sementara Bupati Artha dalam sambutannya dibacakan Asisten II, IGN. Sumber Wijaya, di hadapan narasumber dari DPR RI, Komisi XI, I Gusti Agung Rai Wirajaya, minta agar perangkat desa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki termasuk dalam mengelola keuangan dan kekayaan milik desa. "Selain dana desa, juga desa mengelola keuangan yang bersumber dari PAD, pendapatan transfer lainnya berupa alokasi dana desa(ADD), bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten serta bantuan keuangan dari APBD Propinsi dan kabupaten. Ini memerlukan tanggung jawab yang cukup besar. Hal ini dimaksudkan agar dana yang besar itu tidak sampai menjadi bencana terutama bagi aparatur pemerintah desa," pungkasnya.(**adv/nom**)

Edisi : Selasa, 2 April 2019

Hal : 5

RADAR BALI

OTT Tirta Empul Dibawa ke Kejari

Setelah Kasusnya Tak Dilanjutkan Polres

GIANYAR-Ketua Garda Pejuang Penerus Aspirasi Rakyat (Garppar) Gianyar, Ngakan Made Rai mengirimkan surat ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar untuk menindaklanjuti kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tirta Empul. Pasalnya, kasus yang awalnya ditangani Polres Gianyar itu hanya diminta mengembalikan kerugian negara. "Bagi saya, kasus (OTT Tirta Empul) ini, aneh. Padahal banyak kasus temuan dan pengembalian, tapi kasus tetap berlanjut. Contoh kasus LPD, kasus Perjalanan Dinas (Perdin, Red) dan lain-lain. Itu ada kerugian negara. Sekalipun pelakunya mengembalikan uang negara, pelakunya tetap diproses," ujar Ngakan Rai, kemarin (1/4).

Ngakan mengatakan dari Pemkab Gianyar melalui Inspektorat telah menghitung kerugian negara mencapai Rp 11 miliar. Menurutnya, Gappar membawa kasus OTT tersebut ke Kejari Gianyar pada Jumat lalu (29/3). "Kami harap Kejaksaan bisa menangani kasus OTT tersebut," ucapnya.

Surat tersebut ditembuskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Tinggi Bali dan Kapolda Bali. Dalam surat tersebut, Garppar mendorong penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Sebab itu adalah komitmen bangsa. " Untuk itu kami melaporkan kasus OTT Tirta Empul yang jelas-jelas merugikan keuangan daerah yang jumlahnya begitu fantastis (Rp 11 miliar) hasil audit. Namun, kasusnya tak dilanjutkan. Cukup dengan pengembalian uang dan kasusnya dianggap selesai. Maka kami menunggu tindak lanjut secepatnya. Saya mengimbau kepada Kejari Gianyar, apabila ada laporan dari masyarakat, laporan dugaan pidana korupsi tidak usah mempertimbangkan pemilu maka ditunda. Hukum tidak ada kaitannya dengan politik," sambungnya.

> **Bagi saya, kasus (OTT Tirta Empul) ini, aneh. Padahal banyak kasus temuan dan pengembalian, tapi kasus tetap berlanjut. Contoh kasus LPD, kasus Perjalanan Dinas (Perdin, Red) dan lain-lain. Itu ada kerugian negara. Sekalipun pelakunya mengembalikan uang negara, pelakunya tetap diproses,"**
>
> **Ngakan Made Rai**
> *Ketua Garppar Gianyar*

Dia juga mendukung upaya bupati Gianyar Made Mahayastra yang komit menegakkan hukum. "Komponen rakyat Gianyar patut mendukung bupati Gianyar dalam menegakkan hukum," jelasnya

Ngakan Rai menambahkan sebagai penanggung jawab atas kasus OTT tersebut, maka bendesa pakraman harus bisa mempertanggungjawabkan dana tersebut. "Yang pantas kena ini Bendesa Pakraman. Dia pakai logo desa adat sebagai yang bertanggungjawab atas kasus ini. Nanti bisa dikembangkan ke yang lain," tegasnya.

Ngakan Rai berjanji siap membantu Kejari maupun instansi hukum lainnya untuk penggalian data. "Kami siap membantu, untuk memberikan data-data mengenai adanya kejanggalan-kejanggalan di kabupaten Gianyar," tukasnya.

Seperti diketahui kasus OTT terkait karcis masuk obyek wisata Tirta Empul, Desa Pakraman Manukaya Let, Tampaksiring terjadi November 2018 lalu. Di tempat pemungutan tiket tersebut, ada dua petugas tiket yang diamankan beserta barang bukti tiket. **(dra/dot)**

Edisi : Selasa, 2 April 2019

Hal : 2

RADAR BALI

Ladra Divonis Sambil Berdiri

- Diganjar 3,5 Tahun Penjara
- Dana LPD Dijadikan Bancakan Keluarga

DENPASAR– Kasus korupsi LPD Desa Kapal, Mengwi, Badung, dengan terdakwa I Made Ladra memasuki puncaknya di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin (2/4). Puluhan *krama* adat Kapal dengan pakaian madya yang penasaran dengan putusan hakim langsung menyerbu ruang sidang ■ ▸ *Baca* ***Ladra...*** *Hal 7*

ADRIAN SUWANTO / RADAR BALI

DISURUH BERDIRI : Made Ladra, terdakwa kasus korupsi LPD Desa Kapal, Mengwi, ini kemarin diminta berdiri saat hakim membacakan vonis hukuman 3,5 tahun penjara, denda Rp 500 juta, subsider 4 bulan penjara.

Edisi : Rabu, 3 April 2019

Hal : 1 dan 7

RADAR BALI

Uang Negara Rp 1,7 Miliar Harus Dikembalikan

■ LADRA...
Sambungan dari hal 1

"Pak Ladra, putusan mau saya bacakan. Silakan Anda berdiri," ujar Angeliky Handajani Day, saat membacakan amar putusannya. Ladra bergegas berdiri.

Mantan Ketua LPD Kapal, itu pun mengambil sikap sempurna. Dia harus mendengarkan vonis sambil berdiri. "Dengarkan baik-baik putusan kami," imbuh hakim.

Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Badung, yaitu pasal 3 *juncto* pasal 18 UU Tipikor *juncto* pasal 64 ayat (1) KUHP.

Perbuatan terdakwa merugikan negara, dalam hal ini keuangan LPD Kapal yang modalnya merupakan bantuan dari pemerintah. Sebelum menjatuhkan hukuman, hakim membacakan pertimbangan meringankan dan memberatkan. Pertimbangan meringankan terdakwa mengaku menyesal. Sedangkan pertimbangan yang memberatkan, terdakwa telah melakukan korupsi secara bersama sehingga merugikan keuangan negara.

"Mengadili, menjatuhkan pidana 3 tahun dan enam bulan (3,5 tahun) serta denda Rp 500 juta subsider 4 bulan penjara," tegas hakim. Terdakwa Ladra yang berdiri terus menunduk menatap lantai.

Hakim juga mewajibkan Ladra membayar uang pengganti kerugian negara Rp 1,7 miliar. Uang tersebut harus dibayarkan setelah sebulan keputusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Jika tidak membayar, maka harta bendanya dilelang untuk membayar uang pengganti. "Jika masih tidak cukup, maka diganti hukuman penjara dua tahun," tukas hakim yang karib disapa Kiki itu.

Usai membacakan putusan, hakim memberitahu terdakwa bahwa hukuman yang dijatuhkan bisa langsung diterima, pikir-pikir, atau banding. Terdakwa kemudian berdiskusi dengan penasihat hukumnya.

Cukup lama mereka berdiskusi. "Yang Mulia, melihat putusan yang baru saja dijatuhkan, kami harus musyawarah dengan keluarga besar terdakwa dulu. Putusan ini harus disampaikan pada keluarga besar terdakwa. Kami pikir-pikir," ujar penasihat hukum terdakwa.

Hakim memberi waktu tujuh hari untuk pikir-pikir. "Jangan lewat tujuh hari, *ya*. Kalau lewat kami anggap terdakwa menerima putusan di tingkat pertama ini," jelas Kiki.

Sikap serupa ditunjukkan JPU Agung. Agung menyatakan pikir-pikir. Sementara usai sidang, terdakwa langsung menyalami hakim.

Ladra diduga melakukan upaya memperkaya diri sendiri, orang lain, atau koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di sisi lain LPD yang dikelolanya bermodalkan dari APBD Badung dan donasi dari Pemprov. Dan pendirian LPD tersebut berdasarkan SK Gubernur Bali Nomor 151/1990 tentang Pendirian LPD.

Berdasar audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publik Sri Marmo dan selanjutnya diinvestigasi Tim Verifikasi dan Mediasi dengan metode *risk base audit*, menyimpulkan ada sebelas temuan prinsip yang mengakibatkan LPD Desa Kapal mati suri.

Di antaranya adanya permufakatan jahat dari pengurus LPD yang menikmati fasilitas kredit dalam jumlah yang sangat besar. Fasilitas itu diberikan untuk diri terdakwa sendiri, istri terdakwa, keluarga terdakwa, dan perusahaan terdakwa. Pemberian fasilitas kredit itu dilakukan dengan bunga di bawah standar yang berkisar antara 1,3 persen sampai 2,5 persen.

Temuan berikutnya menyangkut adanya *window dressing* (rekayasa pemberian kredit) kepada anggota keluarga Ni Luh Rai Kristianti (mantan kolektor LPD) sebesar Rp 8,5 miliar. Kredit tersebut diberikan dengan bunga di bawah standar. Yang minimal tiga persen, diberikan hanya satu persen. Hal itu merupakan pelanggaran BMPK atau Batas Maksimal Pemberian Kredit.

Pemberian kredit bernilai fantastis itu dilakukan terdakwa dengan persetujuan badan pengawas. Dan, untuk menghindari aturan BPMK, pemberian kredit tersebut diberikan kepada empat orang debitur yang terhitung masih anggota keluarga terdakwa. Pelunasan terhadap kredit sebesar Rp 8,5 miliar itu dilakukan terdakwa dengan menggunakan tabungan fiktif. **(san/pit)**

Edisi : Rabu, 3 April 2019
Hal : 1 dan 7

Bali Post

Mantan Kepala LPD Kapal Divonis 3,5 Tahun

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, majelis hakim juga mewajibkan Ladra membayar uang pengganti sebagai akibat kerugian keuangan negara Rp 1.796.916.100. Uang tersebut harus dibayarkan setelah sebulan perkara ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar maka harta bendanya dapat disita untuk dilelang untuk membayar uang pengganti. Jika harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara dua tahun.

Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Bali yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam menyikapi putusan itu, baik terdakwa maupun jaksa sama-sama menyatakan pikir-pikir.

Sebelumnya, I Made Ladra (53) diadili kasus dugaan korupsi. JPU Wayan Suardi di hadapan majelis hakim pimpinan Angeliky Handajani Day menguraikan peristiwa hukum yang menyebabkan kerugian hingga Rp 15,35 miliar.

Awalnya, kata jaksa dalam surat dakwaannya, LPD Desa Kapal, Badung mati suri, sehingga dilakukan verifikasi hingga dibentuk konsultan publik dan dilakukan audit. Dari sana disimpulkan ada 11 temuan prinsip yang menyebabkan LPD Kapal mati suri. Pertama adanya pemufakatan jahat pengurus LPD Kapal hingga menikmati fasilitas kredit dalam jumlah yang besar. Banyak kredit LPD yang jatuh tempo, namun tidak dilakukan upaya penyelamatan. Adanya rekayasa pemberian kredit (*window dressing*) kepada mantan kolektor LPD atas nama Ni Luh Rai Kristianti Rp 8,5 miliar dengan bunga 1%. Adanya kredit topengan, atau kredit atas nama (fiktif). Selain itu ada kredit tempilan, pemberian kredit tanpa proses 5C, adanya pemalsuan dokumen gaji pegawai, adanya aset diambil alih atau digadaikan, terjadi potongan uang asuransi, adanya kebijakan yang merugikan LPD, beban kantor dan lainnya, termasuk terdakwa Ladra dengan menggunakan programer atas nama Martinus Baha mengubah data di LPD yang dipimpinnya. Tak pelak, sambung jaksa, LPD rugi hingga Rp 15,35 miliar.

Namun, sebagaimana dakwaan jaksa, yang harus atau menjadi tanggung jawab terdakwa sebesar Rp 7,18 miliar. Sedangkan yang menjadi tanggung jawab Ni Luh Rai Kristianti terkait dana nasabah yang diambilnya, sebut jaksa, sebesar Rp 5,02 miliar. Dan yang menjadi tanggungan kolektor Ni Kadek Kartaningsih antara lain temuan dana nasabah yang dipakai Luh Rai Kristianti sejumlah Rp 1,82 miliar dan tabungan sukarela nasabah yang ditarik adalah milik I Made Sama sebesar Rp 378 juta dan dikembalikan Rp 404 juta. Namun pengembalian, kata jaksa, menggunakan tabungan fiktif. "Sehingga total yang menjadi tanggungan Ni Kadek Ratnaningsih sebesar Rp 2,22 miliar," cetus jaksa. Selain itu, yang menjadi tanggung jawab kolektor Ni Nyoman Sudiasih terkait dana tabungan nasabah sebesar Rp 400 juta. Yang menjadi tanggungan Wayan Suardani Rp 246,3 juta, dan tanggungan Ni Made Ayu Arsianti sebesar Rp 272,8 juta. **(kmb37)**

Edisi : Kamis 4 April 2019
Hal : 5

HARIAN UMUM NusaBali

BPK Periksa LKPD Klungkung

SEMARAPURA, NusaBali

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Kepala Inspektorat Kabupaten Klungkung I Made Seger menerima rombongan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali, di ruang rapat Kantor Bupati Klungkung, Selasa (2/4). BPK ini dipimpin Wakil Penanggung Jawab BPK RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Parwira.

Kedatangan BPK serangkaian pemeriksaan terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018. Wakil Penanggung Jawab BPK RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Parwira, mengatakan, tujuan dari pemerikasaan ini yakni ada empat kreteria yang diperiksa antara lain penilaian terhadap sejauh mana standar akuntasi dengan pemerintah. Kemudian menilai sejauh mana kecukupan akun-akun yang ada di laporan keuangan, menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan ini juga biasanya dimaksudkan untuk menguji kepatuhan entitas yang diperiksa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tentunya keandalan sistem pengendalian internal entitas tersebut. "Pemeriksaan BPK ini dilaksanakan selama sebulan hingga 30 April 2019," ujarnya.

Bupati Suwirta menyampaikan kegiatan pemeriksaan ini memang rutin dilaksanakan, Bupati mengharapkan pada masing-masing instansi Pemkab Klungkung harus memahami dengan baik pelaksanaan dari pada pemeriksaan BPK. "Hal yang paling utama diperhatikan pahami kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan jangan ada yang melanggar peraturan yang berlaku," tegasnya.

Selain itu, Bupati Suwirta menambahklan apapun nantinya data yang ditanya oleh tim BPK agar bisa dijelaskan secara rinci, kerjasama antar pimpinan dengan staf dimasing-masih Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga harus dijaga dengan baik. Sehingga apapun jenis kegiatan yang dilaksanakan bisa berjalan lancar. "Kerjasama pimpinan dengan staf harus dijaga dengan baik disaat menjalankan tugas-tugas sesuai tupoksi," harapnya **wan**

• IST

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat menerima BPK, di ruang rapat Kantor Bupati Klungkung, Selasa (2/4).

Edisi : Kamis, 4 April 2019

Hal : 6

HARIAN UMUM NusaBali

Desa Adat Sah Dapat Dana APBN - APBD

DENPASAR, NusaBali

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Desa Adat sudah resmi diketok palu dalam sidang paripurna DPRD Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Selasa (2/4). Dengan pengesahan ini, maka desa adat di Bali resmi memiliki payung hukum. Dalam Perda ini diatur bahwa desa adat sah dapat sumber pendapatan dari APBN, APBD, dan hibah daerah.

Di era Gubernur Made Mangku Pastika (2008-2018), pemberian dana hibah yang diberikan oleh Pemprov Bali kepada 1.488 desa adat se-Bali pernah dipertanyakan oleh

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

pemerintah pusat. Beruntung, saat itu Gubernur Pastika dan DPRD Bali bisa memberikan argumentasi kuat, sehingga persoalan tersebut akhirnya meredup.

Kini, dengan adanya Perda Desa Adat di era Gubernur Wayan Koster (2018-2023), kekhawairan terkait sumber pendapatan desa adat praktis tidak ada lagi. Sebab, salah satu pasal dalam Perda Desa Adat, yakni Pasal 66, menyebutkan sumber pendapatan desa adat adalah dari APBN-APBD dan hibah daerah.

Yang memperkuat keberadaan desa adat adalah Pasal 46 ayat (2) Perda Desa Adat, yang mengatur keberadaan organisasi-organisasi di desa adat, seperti lembaga Werdha (lanjut usia), Paiketan Pamangku, Paiketan Serati, Yowana, Pecalang, dan Krama Istri. Selain itu, Pasal 32 ayat (2) yang mengatur sistem pemilihan di desa adat diputuskan dengan musyawarah dan mufakat, *manut dresta* (menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di desa adat setempat).

Ketua Pansus Ranperda Desa Adat DPRD Bali, Nyoman Parta, dalam pidatonya di sidang paripurna hari itu menyampaikan desa adat memiliki posisi istimewa di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Menurut Parta, hal ini tertuang dalam Pasal 18 b (ayat 2) yang berbunyi *'Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan perkembangannya sesuai dengan prinsip NKRI'.*

"Perda Desa Adat ini seiring dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meskipun ada juga yang tidak termasuk dalam pengaturan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014, namun segala ketentuan tentang desa adat diatur dalam Perda Desa Adat," ujar politisi PDIP asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar yang juga Ketua Komisi IV DPRD Bali ini.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada legislatif atas kerja keras dan kerjasamanya dalam menyelesaikan pembahasan Ranperda Desa Adat. Gubernur Koster menegaskan, keberadaan desa adat di Bali merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh dan berkembang selama berabad-abad, serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri.

Menurut Koster, peranan desa adat di Bali dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sangat strategis. Karenanya, desa adat perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam rangka memberikan perlindungan, pembinaan, dan pemberdayaannya guna mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala.

Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini menyebutkan, desa adat memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan tinggi yang khas/unik, berupa adat istiadat, agama, tradisi, seni,dan budaya, serta kearifan lokal. Untuk itu, keberadaan desa adat harus dijaga dan diperkuat kedudukannya, sehingga dapat menjalankan fungsi otonomi asli dan komunitas yang berhak membuat peraturan untuk kepentingan desa adat.

"Jangan sampai desa adat ditinggalkan oleh generasi muda kita. Keberadaan desa adat sangat penting, karena ada fungsi yang tidak mungkin dilakukan oleh desa lainnya. Ke depan, Perda Desa Adat ini harus dilaksanakan secara konsisten, sehingga desa adat mampu menjaga kesucian alam Bali, mensejahterakan krama Bali, dan menjaga kebudayaan Bali sesuai dengan visi 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali'," tandas politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang notabene mantan anggota Komisi X DPR RI dar Fraksi PDIP Dapil Bali tiga periode ini.

Perda Desa Adat yang terdiri dari 19 bab dan 103 pasal, tidak hanya menjawab tantangan ke depan terkait keberadaan desa adat di Bali. Keberadaan Perda Desa Adat juga untuk pengakuan, penguatan, pemberdayaan, dan kemandirian desa adat.

Dalam Perda Desa Adat ini, diatur beberapa hal penting. Di antaranya, desa adat sebagai subjek hukum serta swadharma (kewajiban krama) di desa adat yang meliputi krama desa adat, krama tamiu, dan tamiu. Perda Desa Adat juga mengatur tentang bendesa adat yang dipilih oleh krama desa secara musyawarah mufakat, kewajiban melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan krama dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap lingkungan, serta melaksanakan pengelolaan sampah di wewidangan desa adat. **nat**

Edisi : Kamis, 4 April 2019

Hal : 1 dan 15

HARIAN UMUM NusaBali

Proyek Bendungan Sidan Resmi Digarap

Penggarapan Bendungan Tamblang di Buleleng Timur masih tunggu identifikasi peta bidang lahan yang dibebaskan

MANGUPURA, NusaBali

Pembangunan Bendungan Sidan di perbatasan tiga kabupaten: Badung, Bangli, dan Gianyar secara resmi dimulai, ditandai dengan ground breaking (peletakan batu pertama) yang akan dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster, Kamis (4/4) pagi ini. Proyek Bendungan Sidan yang bernilai Rp 786,32 miliar ini ditarget selesai tahun 2021 mendatang.

Acara ground breaking pembangunan Bendungan Sidan rencananya akan dilakukan Gubernur Koster di Desa Bilok Sidan, Kecamatan Petang, Badung, Kamis pagi ini pukul 09.00 Wita. "Ya, besok (hari ini) dilakukan ground breaking Bendungan Sidan oleh Gubernur Bali," ungkap Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida Direktorat Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Airlangga Mardjono, saat dikonfirmasi NusaBali, Rabu (3/4).

Secara umum, Bendungan Sidan yang merupakan proyek strategis pemerintah pusat, dibangun di atas lahan seluas

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Kamis, 4 April 2019
Hal : 1 dan 15

HARIAN UMUM NusaBali

Proyek Bendungan Sidan Resmi Digarap

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

82,73 hektaer di 5 desa bertetangga pada 3 kaupaten di Bali. Pertama, wilayah Desa Bilok Sidan, Kecamatan Petang, Badung. Kedua, wilauah Desa Buahan Kaja, Kecamatan Payangan, Gianyar. Ketiga, kawasan Desa Langgahan, Kecamatan Kintamani, Bangli. Keempat, kawasan Desa Mengani, Kecamatan Kintamani, Bangli. Kelima, kawasan Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Bangli.

Menurut Airlangga Mardjono, bagian terluas bangunan fisik Bendungan Sidan berada di Desa Belok Sidan, yakni mencapai 27,06 hektare. Sedangkan luas fisik bendungan di kawasan Desa Buahan Kaja mencapai 25,23 hektare. Menyusul kemudian di kawasan Desa Bunutin (luasnya mencapai 17,74 hektare), di Desa Mengani (seluas 15,89 hektare), dan di kawasan Desa Langgahan (hanya 0,77 hektare). "Untuk pembebasan lahan dilakukan secara simultan," tegas Airlangga.

Dikonfirmasi NusaBali terpisah, Rabu kemarin, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Bendungan BWS Bali Penida, I Gusti Putu Wandira, mengatakan pembebasan lahan bendungan sedang berproses. Menurut IGP Wandira, masalah harga lahan sudah masuk dalam penilaian harga dari Tim Appraisal (tim independen penaksir harga). "Tim Appraisal masih bekerja. Nanti setelah keluar berapa harga satuannya, akan kami sosialisasikan kembali kepada masyarakat," papar Wandira.

Meskipun pembebasan lahan masih berproses, kata Wandira, masyarakat setempat sudah memberikan izin pengerjaan Bendungan Sidan, khususnya untuk membuka akses jalan, sehingga memudahkan alat berat menjangkau lokasi. Akses jalan yang telah dibangun itu panjangnya mencapai 3 kilometer, dengan lebar 7 meter.

Akses jalan masuk menuju Bendungan Sidan itu dibuat dari jalur Banjar Selantang, Desa Bilok Sidan, Kecamatan Petang. Akses jalan menuju lokasi Bendungan Sidan tersebut sudah dimulai sejak November 2018 lalu.

"Sekarang akses jalan sudah terbuka menuju lokasi bendungan. Besok (hari ini) kami akan dilaksanakan peletakan batu pertama. Rencananya, Pak Gubernur Koster secara simbolis yang meletakkan batu pertama proyek Bendungan Sidan," tegas Wandira.

IST

Camat Petang Gede Eka Sudarwitha (3 dari kanan) tinjau persiapan ground breaking Bendungan Sidan, Rabu (3/4).

Bangunan fisik Bendungan Sidan berikut fasilitas pendukungnya dirancang dengan luas sekitar 42,36 hektare. Tinggi bangunan Bendungan Sidan mencapai sekitar 68 meter. Proyek bendungan senilai Rp 786,32 miliar ini dikerjakan oleh dua perusahaan, yakni PT Brantas Abipraya dan PT Universal Suryaprima.

Proyek Bendungan Sidan---yang berlokasi di sebelah barat laut Jembatan Tertinggi 'Asia' Tukad Bangkung---ditargetkan sudah selesai dibangun tahun 2021 mendatang. Nantinya, Bendungan Sidan diperkirakan mampu menampung air dengan volume 3,8 juta meter kubik. Air yang dialirkan ke Bendungan Sidan bumber dari Sungai Ayung.

Menurut Kepala BWS Bali Penida, Airlangga Mardjono, proyek Bendungan Sidan diproyeksikan mampu memasok air baku dengan debit sebesar 1.750 liter per detik ke wilayah Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar, dan Kota Denpasar. Tak hanya memasok air baku, air Bendungan Sidan juga bisa mengairi sawah di sejumlah kabupaten.

Selain itu, Bendungan Sidan juga potensial dijadikan sumber Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), yang mampu menghasilkan listrik sebesar 1,1 MW. Manfaat lainnya lagi, keberadaan Bendungan Sidan tentunya akan memperkuat sektor pariwisata, karena bisa menjadi objek wisata.

Selain Bendungan Sidan, pada saat hampir bersamaan juga dibangun Bendungan Tamblang di wialayah Buleleng Timur. Proyek Bendungan Tambang senilai Rp 700 miliar yang ditarget rampung tahun 2022 ini, dibangun di atas lahan seluas 58,79 hektare di empat desa bertetangga kawasan Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Sawan, Buleleng.

Keempat desa yang dijadikan areal Bendungan Tamblang tersebut, masing-masing Desa Bila (Kecamatan Kubutambahan), Desa Bontihing (Kecamatan Kubutambahan), Desa Sawan (Kecamatan Sawan), dan Desa Bebetin (Kecamatan Sawan). Dari luas lahan bendungan mencapai 58,79 hektare yang dibebaskan itu, terbanyak berada di Desa Sawan, Kecamatan Sawan seluas 38,59 hektare. Menyusul kemudian di Desa Bila (Kecamatan Kubutambahan) seluas 12,2 hektare, di Desa Bontihing (Kecamatan Kubutambahan) seluas, 6,49 hektare, dan di Desa Bebetin (Kecamatan Sawan) seluas 1,49 hektare.

Bendungan Tamblang dengan luas genangan 358.585 meter persegi dan tinggi mencapai 68 meter ini diperkirakan mampu menampung air hingga 7 juta meter kubik. Air yang dialirkan ke Bendungan Tamblang bersumber dari Tukad Daya di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan. Bendungan Tamblang diproyeksikan untuk penyediaan air baku dengan debit 510 liter per detik. Di samping itu, Bendungan Tamblang juga akan menjadi objek wisata dan airnya sekaligus untuk mengairi persawahan di dua kecamatan wilayah Buleleng Timur.

Sementara itu, penggaraopan Bendungan Tamblang di Buleleng Timur masih menunggu hasil indentifikasi berupa peta bidang lahan yang dibebaskan, dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Buleleng. Setelah data fisik diterbitkan, proses akan dilanjutkan dengan pembayaran ganti rugi atas lahan yang dibebaskan.

"Permohonan kami ke BPN sudah ditindaklanjuti. BPN sudah membentuk tim, mungkin pekan depan mereka sudah mulai bekerja. Harapan kami, dua pekan ke depan sudah ada hasil indentifikasi itu," terang Kasatker Bendungan BWS Bali Penida, I Gusti Putu Wandira, Rabu kemarin.

Ketika hasil indentifikasi sudah keluar lengkap dengan data fisik berupa peta bidang lahan yang dibebaskan, kata Wandira, maka proses berikutnya adalah penentuan nilai ganti rugi. Dalam tahap ini, BWS Bali Penida akan melibatkan tim appraisal untuk menilai harga ganti rugi yang layak terhadap lahan yang dibebaskan. "Apakah nanti menunjuk langsung tim appraisal atau ditenderkan, ini tergantung dari nilai kontraknya," tegas Wandira.

Disinggung hasil sosialisasi penetapan lokasi (Penlok) Bendungan Tamblang, menurut Wandira, selama ini tidak ada pemilik lahan yang mengajukan keberatan. Intinya, pemilik lahan sudah menyetujui lokasi pembangunan Bendungan Tamblang akan memanfaatkan lahan mereka. "Selama sosialisasi tidak ada yang keberatan, mereka sudah sepakat sebelumnya, kalau lahan miliknya akan dibebaskan untuk lokasi pembangunan Bendungan Tamblang," jelasya. **asa,k19**

Edisi : Kamis, 4 April 2019
Hal : 15 dan 15

RADAR BALI

POTENSI PETANI

Perbaiki Subak, Petani Pupuan Berutang

TABANAN - Dua saluran irigasi pertanian di Subak Yeh Tilung dan Subak Yeh Sangladan yang sebelumnya jebol akibat dari bencana tanah longsor di Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, Tabanan. akhirnya kini sudah dilakukan penanganan. Meski demikian penanganan masih dilakukan sementara oleh krama subak (petani) setempat dengan memasang pipa paralon, karena bantuan atau penanganan dari pemerintah daerah tak kunjung tiba. Mirisnya lagi untuk penanganan sementara saluran irigasi subak yang kondisi jebol akibat bencana alam dengan terpaksa para petani harus mengutang di salah satu toko bangunan setempat untuk pembelian pipa paralon dan alat lainnya. Kelian Dinas Banjar Bantiran, Desa Bantiran I Made Kartika Yasa mengatakan sementara dari sembilan titik yang terdampak tanah longsor beberapa waktu lalu tidak semuanya mampu tertangani. Karena keterbatasan alat dan biaya. "Khusus untuk rusak saluran irigasi di dua subak yakni Subak Yeh Tilung dan Subak Yeh Sangladan yang jebol. Kami (warga dan petani red) sudah lakukan gotong royong penanganan sementara dengan memasang pipa paralon," ujar Kelian Dinas Banjar Bantiran Rabu (3/4).

Lanjutnya, pembelian pipa paralon masyarakat harus membeli dengan berhutang di toko banguan. Dengan pembelian pipa sekitar Rp 4 Juta. Karena sembari menunggu bantuan atau penanganan dari pemerintah daerah tak kunjung direalisasikan. "Kami pun berniat melakukan pembangunan secara swadaya, meski harus berhutang," kata Kartika Yasa.

Kartika Yasa mengakui kerusakan dua saluran irigasi subak terjadi cukup parah. Karena kerusakan terjadi pada tempat masuknya air atau bendungan air dari sungai menuju irigasi. Dia berharap agar pemerintah bisa segera menindakanjuti permasalahan tersebut sehingga par petani setempat bisa beraktivitas normal kembali. "Apalagi saat ini akan memasuki musim tanam padi," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Penataan Kawasan Pemukiman, I Made Yudiana mengakui sudah menerima laporan terkait kerusakan tanggul pada Subak Saba di Bantiran, Pupuan. Untuk sementara warga subak setempat sudah melakukan penanganan sementara dan air saat ini sudah bisa mengalir. "Sudah dilakukan gotong royong oleh krama subak setempat. Mereka bergotong royong untuk perbaikan dan saat ini sudah mengalir," ujarnya. **(uli/rid)**

Edisi : Kamis, 4. April 2019

Hal : 7

Tribun-Bali

Bupati Tinjau Utilitas Terpadu Bawah Tanah di Basangkasa, Kuta

● Tahap Awal Target 10 KM

PEMERINTAH Kabupaten Badung dibawah kepemimpinan Bupati Giri Prasta dan Wabup. Suiasa sangat komit menata utilitas terpadu bawah tanah khususnya di wilayah Kuta. Komitmen ini telah diwujudkan dengan pembangunan terowongan utilitas bawah tanah secara bertahap. Guna memastikan proyek tersebut berjalan dengan baik, Selasa (2/4) lalu, Bupati bersama Wabup. langsung turun ke lapangan meninjau proyek utilitas terpadu bawah tanah di ruas jalan Br. Basangkasa hingga Br. Pering sepanjang 1,8 km.

Menurut Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung IB Surya Suamba, penataan perangkat (utilitas) kabel listrik dan kabel telekomunikasi yang tidak beraturan di kawasan Seminyak Kuta ini dananya dari anggaran APBD Badung tahun 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 28.417.174.892,-. Pembangunan utilitas diambil oleh Kontraktor PT. Trijaya Nasional dengan Konsultan PT. Kencana Adhi Karma. Pengerjaan dilaksanakan selama 240 hari dengan box utilitas menggunakan beton pracetak ukuran 150x180 cm. "Utilitas ini sudah selesai dikerjakan, dengan metode kerja (clean construction), mulai pukul 21.00 wita hingga 06.00 wita," terangnya.

Sementara Bupati Giri Prasta mengatakan, program ini telah masuk pada Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) berkenaan dengan utilitas terpadu bawah tanah. Bupati mempunyai prinsip menjaga keindahan, estetika dengan melakukan modernisasi ke bawah. Bupati menargetkan di wilayah Kuta dibangun utilitas terpadu bawah tanah sepanjang 10 km, mulai dari Seminyak-Legian dan Kuta. "Tahap awal kita lakukan 10 km dulu. Kenapa kita mulai dari Seminyak, karena konektifitas PLN yang di Sunset Road itu masuknya dari Seminyak," jelasnya.

Dengan pembangunam ini Bupati juga mengingin-

BUPATI Nyoman Giri Prasta dan Wabup. Ketut Suiasa meninjau proyek utilitas terpadu bawah tanah di ruas jalan Br. Basangkasa hingga Br. Pering, Selasa (2/4) lalu.

kan Dinas PUPR Badung dapat mentraining dirinya sendiri, mengkomunikasikan dengan pihak yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi kaitannya dengan MRT nanti. "Kami kira sama, tinggal cukup yang lebih besar lagi. Kita targetkan ini dulu, kita harus jaga dengan baik," terangnya. Cara kerja utilitas ini, mungkin masyarakat tidak mengetahui, karena dikerjakan pada malam hari, termasuk untuk perbaikan trotoar. Bupati juga memberi apresiasi kepada PLN, Telkom dan profider yang lain, diwajibkan utilitasnya agar diturunkan ke utilitas terpadu yang telah disiapkan. "Kami akan buatkan ketentuan, maksimal bulan Juni ini sudah selesai semua, kalau tidak kami akan cabut semua," tegasnya. **(adv)**

Edisi : Kamis, 4 April 2019

Hal : 6

Tribun-Bali

Krama Sampai Ngutang Beli Pipa

TABANAN, TRIBUN BALI - Dua tempek di Subak Yeh Sabha yang sebelumnya terdampak pada bencana yang terjadi di sembilan titik wilayah Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, Tabanan, saat ini sudah mendapat penanganan. Hanya saja penanganan dilakukan seadanya oleh krama subak setempat dengan memasang pipa paralon.

Ini mereka lakukan lantaran bantuan atau penanganan dari pemerintah tak kunjung datang. Bahkan Tempek Kilung Subak Saba terpaksa mengutang di sebuah toko bangunan untuk pembelian pipa paralon dan alat lainnya.

"Sementara dari sembilan titik beberapa waktu lalu yang terdampak sudah bisa ditangani namun belum 100 persen karena keterbatasan alat dan biaya. Khusus untuk amblas di Subak Saba Tempek Yeh Kilung kami gotong royong lakukan penanganan sementara dengan pipa paralon," ujar Kelian Dinas Banjar Bantiran, I Made Kartika Yasa, Rabu (3/4).

Kerusakan sebenarnya terjadi di dua tempek yakni Tempek Kilung dan Tempek Tangladan. Namun yang terjadi di Tempek Yeh Kilung cukup parah karena kerusakan terjadi pada tempat masuknya air atau bendungan air dari sungai menuju irigasi.

Selain itu, Pura Bedugul setempat juga sempat ikut longsor. Kemudian di Tempek Tangladan hanya mengalami kerusakan pada saluran air dan sudah ditangani warga setempat.

Karena kerusakan parah, warga setempat gotong royong melakukan perbaikan dengan menyalurkan air menggunakan pipa paralon. Ironisnya karena subak tak memiliki dana sepeser pun, untuk pembelian pipa paralon warga subak harus mengutang di toko bangunan sekitar Rp 4 Juta. Ini karena bantuan atau penanganan dari pemerintah tak kunjung direalisasikan.

Ia berharap agar pemerintah bisa segera menindakanjuti permasalahan tersebut sehingga par petani setempat bisa beraktivitas normal kembali. "Mau tidak mau kami harus melakuan perbaikan sementara agar petani bisa melakukan aktivitasnya. Karena jika menunggu perbaikan dari pemerintah akan lama, karena menurut informasi pemerintah akan melakukan penanganan dua tahun lagi," jelasnya.

Sebelumnya, hujan Deras yang mengguyur Tabanan Sabtu (23/3) memicu longsor di sembilan titik. Sembilan titik tersebut terjadi di wilayah Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan. Bahkan, dari titik tersebut juga mengakibatkan dapur dan merajan warga tergerus longsor dan sempat mengakibatkan arus lalu lintas Pupuan-Singaraja lumpuh selama tiga jam. **(mpa)**

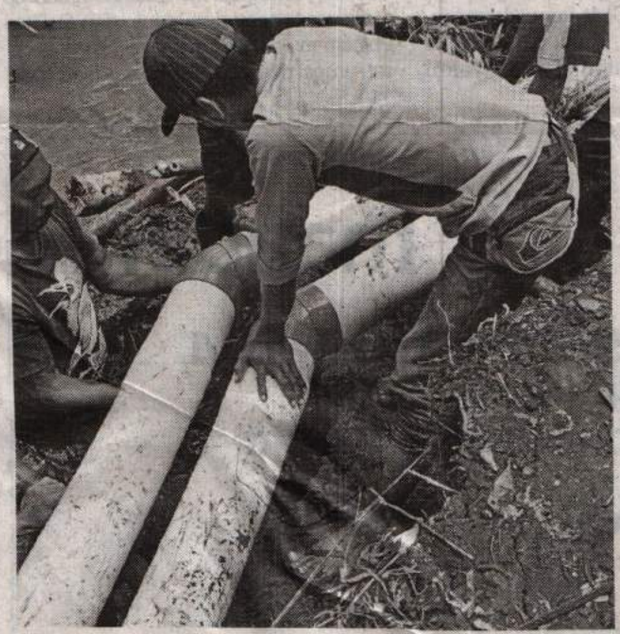

ISTIMEWA

PERBAIKAN - Suasana saat perbaikan tanggul dan saluran irigasi di Subak Saba Tempek Yeh Kilung oleh krama subak belum lama ini.

Edisi : Kamis, 4 April 2019

Hal : 4

Bali Post

Terbatas, Anggaran Pemeliharaan LPJU

Tabanan (Bali Post) -

Anggaran pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di Kabupaten Tabanan tergolong terbatas. Di APBD 2019, pemeliharaan dan pendataan LPJU dianggarkan Rp 1,9 miliar. Sementara jumlah LPJU lebih dari ratusan titik yang tersebar di sepuluh kecamatan. "Termasuk sedikit anggaran pemeliharaan tahun ini. Semoga cukup. Kalau dianggap kurang akan kita usulkan lagi di perubahan," kata Sekretaris Dinas PUPRPKP Tabanan I Gusti Agung Oka Kamasan seizin Kepala Dinas PUPRPKP, Kamis (4/4) kemarin.

Menurutnya, pemeliharaan LPJU meliputi penanganan lampu yang padam serta kerusakan komponen lainnya. Pihaknya berupaya menangani persoalan di lapangan sesegera mungkin. Namun diakuinya, ada sejumlah kasus yang memerlukan waktu ekstra.

Selain untuk pemeliharaan, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk program pendataan LPJU. Pendataan bertujuan mengetahui jumlah LPJU yang masih berfungsi baik, perlu diperbaiki hingga kawasan yang perlu LPJU. "Sementara untuk meterisasi sudah kami lakukan di tahun 2017," terangnya.

Oka Kamasan menambahkan, sejak tahun 2018 sudah tidak pernah lagi terjadi tunggakan pembayaran rekening listrik untuk LPJU. Tahun ini sudah diplot anggaran pembayaran rekening LPJU sebesar Rp 11,3 miliar dengan rata-rata per bulan Rp 950 juta tergantung pemakaian.

"Pembayaran itu untuk kurang lebih 303 rekening menjangkau semua kecamatan. Bahkan adapula yang kita bayar ke PLN Seririt, Singaraja sebesar Rp 80 juta per bulan," ungkapnya.

Anggaran pembayaran rekening listrik LPJU dan pemeliharaan yang didapat tahun ini menurun dibandingkan tahun 2017 dan 2018. Tahun 2017 dianggarkan Rp 14,5 miliar untuk rekening, meteran, pendataan dan pemeliharaan. Sedangkan tahun 2018 mendapat anggaran Rp 13,8 miliar dengan rincian Rp 11,6 miliar untuk pembayaran rekening, sementara untuk pemeliharaan dan peningkatan pelayanan sebesar Rp 2,2 miliar. **(kmb28)**

Edisi : Jumat, 5. April, 2019

Hal : 7

RADAR BALI

Tabanan Pangkas Duta di PKB

Karena Cekak Anggaran

TABANAN - Pemerintah Tabanan mulai berhitung untuk mengikuti Pesta Kesenian Bali (PKB) XLI di Denpasar. Minim anggaran membuat Pemerintah Kabupaten Tabanan harus mengurangi jumlah kelompok kesenian yang menjadi duta Tabanan dalam PKB. Tahun ini anggaran untuk mengikuti PKB Bali lebih kecil dibandingkan tahun 2018 lalu.

Anggaran untuk PKB hanya sebesar Rp 1,4 miliar lebih. Itu sudah termasuk anggaran dari BKK Provinsi sebesar Rp 450 juta. Selain itu anggaran tersebut juga digunakan untuk membiayai PKB Kabupaten Tabanan selama tiga hari. Anggaran PKB tahun ini menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 1,9 miliar.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Tabanan I Wayan Muder Kamis (4/4) kemarin di kantornya. Dikatakan Muder dalam PKB tahun ini. Pihaknya menyiapkan 13 item dari 23 item kegiatan dan pagelaran seni yang ada di PKB. Hal tersebut terpaksa dilakukan, karena minimnya anggaran untuk pembiayan PKB baik tingkat provinsi maupun di kabupaten.

"Tahun ini anggaran PKB kecil. Sementara PKB dilakukan selama sebulan di Denpasar. Anggaran tersebut digunakan untuk logistik, pemberian seragam, sarana dan prasarana, pembinaan serta persiapan," terang Muder.

Selain itu dikatakannya kembali, dana sebesar Rp 1,4 miliar itu bukan hanya untuk mengikuti PKB tingkat provinsi Bali. Tetapi juga tingkat kabupaten yang akan digelar selama tiga hari. Karena anggaran yang minim, maka pihaknya nantinya hanya akan mengikuti beberapa kegiatan pagelaran saja.

Beberapa kegiatan pokok dan wajib diikuti seperti parade saat pembukaan, lomba gong kebyar dewasa, wanita dan anak-anak, lomba baleganjur, ngelawang, taman penasar, lomba gender dan lainnya. Termasuk lomba-lomba non seni.

"Kami memprioritaskan pada item kegiatan dan kesenian yang dilombakan serta ikon PKB seperti parade saat pembukaan," beber Muder.

Muder menjelaskan kesenian gong kebyar yang akan ditampilkan di PKB, kata Muder, memang masih sama dengan tahun lalu. Untuk gong kebyar remaja/ dewasa diwakili dari Kecamatan Pupuan. Sementara gong kebyar wanita dari Belayu, Marga dan gong kebyar anak-anak dari Banjar Lebah, Marga.

"Memang untuk lomba gong kebyar kami masih memberi kesempatan pada sekaa sebelumnya tentu dengan pengembangan dan variasi yang lain yang lebih menarik," ungkapnya.

Meski terbatasnya anggaran PKB. Pihaknya lebih mengedepankan pembinaan SDM agar tumbuh seniman tari maupun tabuh dari masyarakat sendiri. "Dengan dana sebesar itu, kami belum bisa secara maksimal seluruh seni yang ada di Tabanan akan tampil di PKB," pungkasnya.

Tentu saja, minimnya anggaran untuk kontingen PKB ini tergolong ironi. Pasalnya, di tahun 2019 ini, Pemkab Tabanan malah memberikan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) untuk PNS yang nilainya mencapai Rp100 miliar untuk tujuh bulan. **(uli/yor)**

Edisi : Jumat, 5 April 2019

Hal : 8

HARIAN UMUM
NusaBali

Anggaran Pemeliharaan LPJU Tahun 2019 Turun

TABANAN, NusaBali

Anggaran pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) tahun 2019 di Kabupaten Tabanan menurun. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tabanan hanya memperoleh Rp 1,9 miliar, sementara di 2018 dialokasikan Rp 2,2 miliar.

Sekretaris Dinas PUPR Tabanan Gusti Agung Oka Kamasan menjelaskan tahun 2019 pihaknya mendapat anggaran pemeliharaan LPJU sebesar Rp 1,9 miliar dari anggaran induk APBD Tabanan. "Iya ini masih tergolong kecil," ungkapnya, Kamis (4/4).

"Nanti kalau ada kekurangan kami akan usulkan di anggaran perubahan. Mudah-mudahan mencukupi," imbuh Oka Kamasan.

Di sisi lain terkait pengadaan LPJU di 2019, Oka Kamasan mengaku masih proses pendataan. Setelah proses pendataan baru bisa melakukan pengadaan.

Disinggung perihal tunggakan pembayaran LPJU di PLN Tabanan, Oka Kamasan mengaku sejak 2018 sudah tidak pernah lagi terjadi tunggakan pembayaran rekening listrik. Di 2019 sudah diplotkan anggaran pembayaran rekening lampu PJU sebesar Rp 11,3 miliar dengan rata rata per bulan Rp 950 juta, tergantung pemakaian. "Pembayaran itu untuk sekitar 303 rekening menjangkau semua kecamatan. Bahkan adapula yang kami bayar ke PLN Seririt, Singaraja sebesar Rp 80 juta per bulan," ungkapnya.

Sekadar diketahui Dinas PUPR Tabanan tahun 2018 dianggarkan untuk pembayaran rekening listrik sebesar Rp 13,8 miliar dengan rincian Rp 11,6 miliar untuk pembayaran rekening, sementara untuk pemeliharaan dan peningkatan pelayanan sebesar Rp 2,2 miliar. Dan di 2017 dianggarkan Rp 14,5 miliar untuk rekening, meteran, pendataan, dan pemeliharaan. **des**

Edisi : Jumat, 5 April 2019
Hal : 7

HARIAN UMUM NusaBali

Komisi Pembelian Jadi Gunjingan

GIANYAR, NusaBali

Bupati Gianyar Made Mahayastra menyerahkan mobil operasional untuk 63 perbekel dan sepeda motor merek PCX untuk 64 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Gianyar, Kamis (4/3), di Lapangan Astina Gianyar. Mobil merek Expander dan sepeda motor ini dibeli oleh Ketua Forum Perbekel Kabupaten Gianyar I Gusti Nyoman Gede Susila, dari dana BHP (bagi hasil pajak) milik setiap desa.

Di sela-sela acara itu, muncul gunjingan tentang komisi pembelian mobil dalam jumlah banyak, sekitar 5 persen dari pihak dealer. Beberapa warga yang ikut menyaksikan penjemputan mobil itu mencoba menghitung komisi 5 persen dari harga mobil Rp 243,5 juta per unit, maka didapat sekitar Rp 12 juta. "Komisi sekitar Rp 12 juta per unit ini jika dikalikan 63 mobil, maka didapat Rp 756 juta lebih. Komisi ini belum termasuk pembelian 64 sepeda motor merek PCX. Kira-kira siapa yang memanen komisi ini," tanya warga yang enggan namanya dikoarankan.

Sementara itu, dari 64 desa di Kabupaten Gianyar, hanya Perbekel Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, yang tak setuju memakai dana BHP-nya untuk membeli kendaraan tersebut. Dikonfirmasi terpisah, Perbekel Pejeng Tjokorda Agung Kusuma Yuda Pemayun SE mengakui Desa Pejeng tidak menganggarkan pembelian mobil ini karena Pejeng punya program yang lebih penting. "Ya, karena ada yang lebih prioritas. Kemungkinan di APBDes Perubahan," ujarnya singkat.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Kabupaten Gianyar Dewa Ngakan Ngurah Adi mengatakan, mobil semi mewah ini bukan saja untuk operasional perbekel, namun juga mendukung program desa siaga dan desa layak anak. Pejabat asal Desa Pejeng ini menjelaskan, ada 10 persen dari BHP maka masing-masing desa memperoleh rata-rata Rp 1 miliar. Sekitar Rp 250 juta dari jumlah itu untuk pengadaan kendaraan ini.

Dihubungi usai penyerahan kendaraan itu, Manager Operasional PT Bumenreja Abadi selaku dealer pengadaan, Siyono, membantah tudingan ada komisi pembelian yang diberikan untuk pembeli kendaraan secara kolektif di dealernya. Ia juga membantah jika ada staf marketingnya yang menyatakan ada komisi setiap pembelian kendaraan minimal lima unit. "Oh. Tidak ada seperti itu (pemberian komisi pembelian kendaraan untuk perbekel, Red)," ujarnya dengan mimik was-was.

Ketua Forum Perbekel Kabupaten Gianyar IGN Gede Susila mengatakan, pengadaan kendaraan operasional ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya, Perbekel Bona, Kecamatan Blahbatuh ini menjelaskan pengadaan kendaraan yang pembeliannya dipercayakan kepada dirinya oleh 63 perbekel, sudah sesuai mekanisme. Pembelian ini sesuai perintah melalui SK Bupati Gianyar Made Mahayastra.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan, penyerahan mobil operasional ini merupakan sejarah baru bagi Kabupaten Gianyar. Karena untuk pertama kali bisa menyiapkan kendaraan operasional pada Pemerintah Desa dan BPD. "Saya yakin akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai disalahgunakan. Gunakanlah untuk kepentingan masyarakat," imbuh Mahayastra.

Seusai pelaksanaan serah terima, acara dilanjutkan dengan touring berasaa ke Basang Ambu, Desa Manukaya, Tampaksiring. **lsa,nvi**

Edisi : Jumat, 5, April, 2019

Hal : 6.

Bali Post

Terbatas, Anggaran Pemeliharaan LPJU

Tabanan (Bali Post) -

Anggaran pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di Kabupaten Tabanan tergolong terbatas. Di APBD 2019, pemeliharaan dan pendataan LPJU dianggarkan Rp 1,9 miliar. Sementara jumlah LPJU lebih dari ratusan titik yang tersebar di sepuluh kecamatan. "Termasuk sedikit anggaran pemeliharaan tahun ini. Semoga cukup. Kalau dianggap kurang akan kita usulkan lagi di perubahan," kata Sekretaris Dinas PUPRPKP Tabanan I Gusti Agung Oka Kamasan seizin Kepala Dinas PUPRPKP, Kamis (4/4) kemarin.

Menurutnya, pemeliharaan LPJU meliputi penanganan lampu yang padam serta kerusakan komponen lainnya. Pihaknya berupaya menangani persoalan di lapangan sesegera mungkin. Namun diakuinya, ada sejumlah kasus yang memerlukan waktu ekstra.

Selain untuk pemeliharaan, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk program pendataan LPJU. Pendataan bertujuan mengetahui jumlah LPJU yang masih berfungsi baik, perlu diperbaiki hingga kawasan yang perlu LPJU. "Sementara untuk meterisasi sudah kami lakukan di tahun 2017," terangnya.

Oka Kamasan menambahkan, sejak tahun 2018 sudah tidak pernah lagi terjadi tunggakan pembayaran rekening listrik untuk LPJU. Tahun ini sudah diplot anggaran pembayaran rekening LPJU sebesar Rp 11,3 miliar dengan rata-rata per bulan Rp 950 juta tergantung pemakaian.

"Pembayaran itu untuk kurang lebih 303 rekening menjangkau semua kecamatan. Bahkan adapula yang kita bayar ke PLN Seririt, Singaraja sebesar Rp 80 juta per bulan," ungkapnya.

Anggaran pembayaran rekening listrik LPJU dan pemeliharaan yang didapat tahun ini menurun dibandingkan tahun 2017 dan 2018. Tahun 2017 dianggarkan Rp 14,5 miliar untuk rekening, meteran, pendataan dan pemeliharaan. Sedangkan tahun 2018 mendapat anggaran Rp 13,8 miliar dengan rincian Rp 11,6 miliar untuk pembayaran rekening, sementara untuk pemeliharaan dan peningkatan pelayanan sebesar Rp 2,2 miliar. **(kmb28)**

Edisi : Jumat, 5. April, 2019

Hal : 7

RADAR BALI

Tabanan Pangkas Duta di PKB

Karena Cekak Anggaran

TABANAN - Pemerintah Tabanan mulai berhitung untuk mengikuti Pesta Kesenian Bali (PKB) XLI di Denpasar. Minim anggaran membuat Pemerintah Kabupaten Tabanan harus mengurangi jumlah kelompok kesenian yang menjadi duta Tabanan dalam PKB. Tahun ini anggaran untuk mengikuti PKB Bali lebih kecil dibandingkan tahun 2018 lalu.

Anggaran untuk PKB hanya sebesar Rp 1,4 miliar lebih. Itu sudah termasuk anggaran dari BKK Provinsi sebesar Rp 450 juta. Selain itu anggaran tersebut juga digunakan untuk membiayai PKB Kabupaten Tabanan selama tiga hari. Anggaran PKB tahun ini menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 1,9 miliar.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Tabanan I Wayan Muder Kamis (4/4) kemarin di kantornya. Dikatakan Muder dalam PKB tahun ini. Pihaknya menyiapkan 13 item dari 23 item kegiatan dan pagelaran seni yang ada di PKB. Hal tersebut terpaksa dilakukan, karena minimnya anggaran untuk pembiayan PKB baik tingkat provinsi maupun di kabupaten.

"Tahun ini anggaran PKB kecil. Sementara PKB dilakukan selama sebulan di Denpasar. Anggaran tersebut digunakan untuk logistik, pemberian seragam, sarana dan prasarana, pembinaan serta persiapan," terang Muder.

Selain itu dikatakannya kembali, dana sebesar Rp 1,4 miliar itu bukan hanya untuk mengikuti PKB tingkat provinsi Bali. Tetapi juga tingkat kabupaten yang akan digelar selama tiga hari. Karena anggaran yang minim, maka pihaknya nantinya hanya akan mengikuti beberapa kegiatan pagelaran saja.

Beberapa kegiatan pokok dan wajib diikuti seperti parade saat pembukaan, lomba gong kebyar dewasa, wanita dan anak-anak, lomba baleganjur, ngelawang, taman penasar, lomba gender dan lainnya. Termasuk lomba-lomba non seni.

"Kami memprioritaskan pada item kegiatan dan kesenian yang dilombakan serta ikon PKB seperti parade saat pembukaan," beber Muder.

Muder menjelaskan kesenian gong kebyar yang akan ditampilkan di PKB, kata Muder, memang masih sama dengan tahun lalu. Untuk gong kebyar remaja/ dewasa diwakili dari Kecamatan Pupuan. Sementara gong kebyar wanita dari Belayu, Marga dan gong kebyar anak-anak dari Banjar Lebah, Marga.

"Memang untuk lomba gong kebyar kami masih memberi kesempatan pada sekaa sebelumnya tentu dengan pengembangan dan variasi yang lain yang lebih menarik," ungkapnya.

Meski terbatasnya anggaran PKB. Pihaknya lebih mengedepankan pembinaan SDM agar tumbuh seniman tari maupun tabuh dari masyarakat sendiri. "Dengan dana sebesar itu, kami belum bisa secara maksimal seluruh seni yang ada di Tabanan akan tampil di PKB," pungkasnya.

Tentu saja, minimnya anggaran untuk kontingen PKB ini tergolong ironi. Pasalnya, di tahun 2019 ini, Pemkab Tabanan malah memberikan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) untuk PNS yang nilainya mencapai Rp100 miliar untuk tujuh bulan. **(uli/yor)**

Edisi : Jumat, 5 April 2019

Hal : 8

HARIAN UMUM
NusaBali

Anggaran Pemeliharaan LPJU Tahun 2019 Turun

TABANAN, NusaBali

Anggaran pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) tahun 2019 di Kabupaten Tabanan menurun. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tabanan hanya memperoleh Rp 1,9 miliar, sementara di 2018 dialokasikan Rp 2,2 miliar.

Sekretaris Dinas PUPR Tabanan Gusti Agung Oka Kamasan menjelaskan tahun 2019 pihaknya mendapat anggaran pemeliharaan LPJU sebesar Rp 1,9 miliar dari anggaran induk APBD Tabanan. "Iya ini masih tergolong kecil," ungkapnya, Kamis (4/4).

"Nanti kalau ada kekurangan kami akan usulkan di anggaran perubahan. Mudah-mudahan mencukupi," imbuh Oka Kamasan.

Di sisi lain terkait pengadaan LPJU di 2019, Oka Kamasan mengaku masih proses pendataan. Setelah proses pendataan baru bisa melakukan pengadaan.

Disinggung perihal tunggakan pembayaran LPJU di PLN Tabanan, Oka Kamasan mengaku sejak 2018 sudah tidak pernah lagi terjadi tunggakan pembayaran rekening listrik. Di 2019 sudah diplotkan anggaran pembayaran rekening lampu PJU sebesar Rp 11,3 miliar dengan rata rata per bulan Rp 950 juta, tergantung pemakaian. "Pembayaran itu untuk sekitar 303 rekening menjangkau semua kecamatan. Bahkan adapula yang kami bayar ke PLN Seririt, Singaraja sebesar Rp 80 juta per bulan," ungkapnya.

Sekadar diketahui Dinas PUPR Tabanan tahun 2018 dianggarkan untuk pembayaran rekening listrik sebesar Rp 13,8 miliar dengan rincian Rp 11,6 miliar untuk pembayaran rekening, sementara untuk pemeliharaan dan peningkatan pelayanan sebesar Rp 2,2 miliar. Dan di 2017 dianggarkan Rp 14,5 miliar untuk rekening, meteran, pendataan, dan pemeliharaan. **des**

Edisi : Jumat, 5 April 2019
Hal : 7

HARIAN UMUM NusaBali

Komisi Pembelian Jadi Gunjingan

GIANYAR, NusaBali

Bupati Gianyar Made Mahayastra menyerahkan mobil operasional untuk 63 perbekel dan sepeda motor merek PCX untuk 64 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Gianyar, Kamis (4/3), di Lapangan Astina Gianyar. Mobil merek Expander dan sepeda motor ini dibeli oleh Ketua Forum Perbekel Kabupaten Gianyar I Gusti Nyoman Gede Susila, dari dana BHP (bagi hasil pajak) milik setiap desa.

Di sela-sela acara itu, muncul gunjingan tentang komisi pembelian mobil dalam jumlah banyak, sekitar 5 persen dari pihak dealer. Beberapa warga yang ikut menyaksikan penjemputan mobil itu mencoba menghitung komisi 5 persen dari harga mobil Rp 243,5 juta per unit, maka didapat sekitar Rp 12 juta. "Komisi sekitar Rp 12 juta per unit ini jika dikalikan 63 mobil, maka didapat Rp 756 juta lebih. Komisi ini belum termasuk pembelian 64 sepeda motor merek PCX. Kira-kira siapa yang memanen komisi ini," tanya warga yang enggan namanya dikoarankan.

Sementara itu, dari 64 desa di Kabupaten Gianyar, hanya Perbekel Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, yang tak setuju memakai dana BHP-nya untuk membeli kendaraan tersebut. Dikonfirmasi terpisah, Perbekel Pejeng Tjokorda Agung Kusuma Yuda Pemayun SE mengakui Desa Pejeng tidak menganggarkan pembelian mobil ini karena Pejeng punya program yang lebih penting. "Ya, karena ada yang lebih prioritas. Kemungkinan di APBDes Perubahan," ujarnya singkat.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Kabupaten Gianyar Dewa Ngakan Ngurah Adi mengatakan, mobil semi mewah ini bukan saja untuk operasional perbekel, namun juga mendukung program desa siaga dan desa layak anak. Pejabat asal Desa Pejeng ini menjelaskan, ada 10 persen dari BHP maka masing-masing desa memperoleh rata-rata Rp 1 miliar. Sekitar Rp 250 juta dari jumlah itu untuk pengadaan kendaraan ini.

Dihubungi usai penyerahan kendaraan itu, Manager Operasional PT Bumenreja Abadi selaku dealer pengadaan, Siyono, membantah tudingan ada komisi pembelian yang diberikan untuk pembeli kendaraan secara kolektif di dealernya. Ia juga membantah jika ada staf marketingnya yang menyatakan ada komisi setiap pembelian kendaraan minimal lima unit. "Oh. Tidak ada seperti itu (pemberian komisi pembelian kendaraan untuk perbekel, Red)," ujarnya dengan mimik was-was.

Ketua Forum Perbekel Kabupaten Gianyar IGN Gede Susila mengatakan, pengadaan kendaraan operasional ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya, Perbekel Bona, Kecamatan Blahbatuh ini menjelaskan pengadaan kendaraan yang pembeliannya dipercayakan kepada dirinya oleh 63 perbekel, sudah sesuai mekanisme. Pembelian ini sesuai perintah melalui SK Bupati Gianyar Made Mahayastra.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan, penyerahan mobil operasional ini merupakan sejarah baru bagi Kabupaten Gianyar. Karena untuk pertama kali bisa menyiapkan kendaraan operasional pada Pemerintah Desa dan BPD. "Saya yakin akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai disalahgunakan. Gunakanlah untuk kepentingan masyarakat," imbuh Mahayastra.

Seusai pelaksanaan serah terima, acara dilanjutkan dengan touring berasaa ke Basang Ambu, Desa Manukaya, Tampaksiring. **lsa,nvi**

Edisi : Jumat, 5, April, 2019

Hal : 6.

Bali Post

Mantan Kepala LPD Kapal Divonis 3,5 Tahun

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, majelis hakim juga mewajibkan Ladra membayar uang pengganti sebagai akibat kerugian keuangan negara Rp 1.796.916.100. Uang tersebut harus dibayarkan setelah sebulan perkara ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar maka harta bendanya dapat disita untuk dilelang untuk membayar uang pengganti. Jika harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara dua tahun.

Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Bali yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam menyikapi putusan itu, baik terdakwa maupun jaksa sama-sama menyatakan pikir-pikir.

Sebelumnya, I Made Ladra (53) diadili kasus dugaan korupsi. JPU Wayan Suardi di hadapan majelis hakim pimpinan Angeliky Handajani Day menguraikan peristiwa hukum yang menyebabkan kerugian hingga Rp 15,35 miliar.

Awalnya, kata jaksa dalam surat dakwaannya, LPD Desa Kapal, Badung mati suri, sehingga dilakukan verifikasi hingga dibentuk konsultan publik dan dilakukan audit. Dari sana disimpulkan ada 11 temuan prinsip yang menyebabkan LPD Kapal mati suri. Pertama adanya pemufakatan jahat pengurus LPD Kapal hingga menikmati fasilitas kredit dalam jumlah yang besar. Banyak kredit LPD yang jatuh tempo, namun tidak dilakukan upaya penyelamatan. Adanya rekayasa pemberian kredit (*window dressing*) kepada mantan kolektor LPD atas nama Ni Luh Rai Kristianti Rp 8,5 miliar dengan bunga 1%. Adanya kredit topengan, atau kredit atas nama (fiktif). Selain itu ada kredit tempilan, pemberian kredit tanpa proses 5C, adanya pemalsuan dokumen gaji pegawai, adanya aset diambil alih atau digadaikan, terjadi potongan uang asuransi, adanya kebijakan yang merugikan LPD, beban kantor dan lainnya, termasuk terdakwa Ladra dengan menggunakan programer atas nama Martinus Baha mengubah data di LPD yang dipimpinnya. Tak pelak, sambung jaksa, LPD rugi hingga Rp 15,35 miliar.

Namun, sebagaimana dakwaan jaksa, yang harus atau menjadi tanggung jawab terdakwa sebesar Rp 7,18 miliar. Sedangkan yang menjadi tanggung jawab Ni Luh Rai Kristianti terkait dana nasabah yang diambilnya, sebut jaksa, sebesar Rp 5,02 miliar. Dan yang menjadi tanggungan kolektor Ni Kadek Kartaningsih antara lain temuan dana nasabah yang dipakai Luh Rai Kristianti sejumlah Rp 1,82 miliar dan tabungan sukarela nasabah yang ditarik adalah milik I Made Sama sebesar Rp 378 juta dan dikembalikan Rp 404 juta. Namun pengembalian, kata jaksa, menggunakan tabungan fiktif. "Sehingga total yang menjadi tanggungan Ni Kadek Ratnaningsih sebesar Rp 2,22 miliar," cetus jaksa. Selain itu, yang menjadi tanggung jawab kolektor Ni Nyoman Sudiasih terkait dana tabungan nasabah sebesar Rp 400 juta. Yang menjadi tanggungan Wayan Suardani Rp 246,3 juta, dan tanggungan Ni Made Ayu Arsianti sebesar Rp 272,8 juta. **(kmb37)**

Edisi : Kamis 4 April 2019
Hal : 5

HARIAN UMUM NusaBali

BPK Periksa LKPD Klungkung

SEMARAPURA, NusaBali

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Kepala Inspektorat Kabupaten Klungkung I Made Seger menerima rombongan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali, di ruang rapat Kantor Bupati Klungkung, Selasa (2/4). BPK ini dipimpin Wakil Penanggung Jawab BPK RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Parwira.

Kedatangan BPK serangkaian pemeriksaan terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018. Wakil Penanggung Jawab BPK RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Parwira, mengatakan, tujuan dari pemerikasaan ini yakni ada empat kreteria yang diperiksa antara lain penilaian terhadap sejauh mana standar akuntasi dengan pemerintah. Kemudian menilai sejauh mana kecukupan akun-akun yang ada di laporan keuangan, menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan ini juga biasanya dimaksudkan untuk menguji kepatuhan entitas yang diperiksa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tentunya keandalan sistem pengendalian internal entitas tersebut. "Pemeriksaan BPK ini dilaksanakan selama sebulan hingga 30 April 2019," ujarnya.

Bupati Suwirta menyampaikan kegiatan pemeriksaan ini memang rutin dilaksanakan, Bupati mengharapkan pada masing-masing instansi Pemkab Klungkung harus memahami dengan baik pelaksanaan dari pada pemeriksaan BPK. "Hal yang paling utama diperhatikan pahami kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan jangan ada yang melanggar peraturan yang berlaku," tegasnya.

Selain itu, Bupati Suwirta menambahklan apapun nantinya data yang ditanya oleh tim BPK agar bisa dijelaskan secara rinci, kerjasama antar pimpinan dengan staf dimasing-masih Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga harus dijaga dengan baik. Sehingga apapun jenis kegiatan yang dilaksanakan bisa berjalan lancar. "Kerjasama pimpinan dengan staf harus dijaga dengan baik disaat menjalankan tugas-tugas sesuai tupoksi," harapnya **wan**

• IST

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat menerima BPK, di ruang rapat Kantor Bupati Klungkung, Selasa (2/4).

Edisi : Kamis, 4 April 2019

Hal : 6

HARIAN UMUM NusaBali

Desa Adat Sah Dapat Dana APBN - APBD

DENPASAR, NusaBali

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Desa Adat sudah resmi diketok palu dalam sidang paripurna DPRD Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Selasa (2/4). Dengan pengesahan ini, maka desa adat di Bali resmi memiliki payung hukum. Dalam Perda ini diatur bahwa desa adat sah dapat sumber pendapatan dari APBN, APBD, dan hibah daerah.

Di era Gubernur Made Mangku Pastika (2008-2018), pemberian dana hibah yang diberikan oleh Pemprov Bali kepada 1.488 desa adat se-Bali pernah dipertanyakan oleh

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

pemerintah pusat. Beruntung, saat itu Gubernur Pastika dan DPRD Bali bisa memberikan argumentasi kuat, sehingga persoalan tersebut akhirnya meredup.

Kini, dengan adanya Perda Desa Adat di era Gubernur Wayan Koster (2018-2023), kekhawairan terkait sumber pendapatan desa adat praktis tidak ada lagi. Sebab, salah satu pasal dalam Perda Desa Adat, yakni Pasal 66, menyebutkan sumber pendapatan desa adat adalah dari APBN-APBD dan hibah daerah.

Yang memperkuat keberadaan desa adat adalah Pasal 46 ayat (2) Perda Desa Adat, yang mengatur keberadaan organisasi-organisasi di desa adat, seperti lembaga Werdha (lanjut usia), Paiketan Pamangku, Paiketan Serati, Yowana, Pecalang, dan Krama Istri. Selain itu, Pasal 32 ayat (2) yang mengatur sistem pemilihan di desa adat diputuskan dengan musyawarah dan mufakat, *manut dresta* (menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di desa adat setempat).

Ketua Pansus Ranperda Desa Adat DPRD Bali, Nyoman Parta, dalam pidatonya di sidang paripurna hari itu menyampaikan desa adat memiliki posisi istimewa di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Menurut Parta, hal ini tertuang dalam Pasal 18 b (ayat 2) yang berbunyi *'Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan perkembangannya sesuai dengan prinsip NKRI'.*

"Perda Desa Adat ini seiring dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meskipun ada juga yang tidak termasuk dalam pengaturan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014, namun segala ketentuan tentang desa adat diatur dalam Perda Desa Adat," ujar politisi PDIP asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar yang juga Ketua Komisi IV DPRD Bali ini.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada legislatif atas kerja keras dan kerjasamanya dalam menyelesaikan pembahasan Ranperda Desa Adat. Gubernur Koster menegaskan, keberadaan desa adat di Bali merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh dan berkembang selama berabad-abad, serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri.

Menurut Koster, peranan desa adat di Bali dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sangat strategis. Karenanya, desa adat perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam rangka memberikan perlindungan, pembinaan, dan pemberdayaannya guna mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala.

Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini menyebutkan, desa adat memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan tinggi yang khas/unik, berupa adat istiadat, agama, tradisi, seni,dan budaya, serta kearifan lokal. Untuk itu, keberadaan desa adat harus dijaga dan diperkuat kedudukannya, sehingga dapat menjalankan fungsi otonomi asli dan komunitas yang berhak membuat peraturan untuk kepentingan desa adat.

"Jangan sampai desa adat ditinggalkan oleh generasi muda kita. Keberadaan desa adat sangat penting, karena ada fungsi yang tidak mungkin dilakukan oleh desa lainnya. Ke depan, Perda Desa Adat ini harus dilaksanakan secara konsisten, sehingga desa adat mampu menjaga kesucian alam Bali, mensejahterakan krama Bali, dan menjaga kebudayaan Bali sesuai dengan visi 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali'," tandas politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang notabene mantan anggota Komisi X DPR RI dar Fraksi PDIP Dapil Bali tiga periode ini.

Perda Desa Adat yang terdiri dari 19 bab dan 103 pasal, tidak hanya menjawab tantangan ke depan terkait keberadaan desa adat di Bali. Keberadaan Perda Desa Adat juga untuk pengakuan, penguatan, pemberdayaan, dan kemandirian desa adat.

Dalam Perda Desa Adat ini, diatur beberapa hal penting. Di antaranya, desa adat sebagai subjek hukum serta swadharma (kewajiban krama) di desa adat yang meliputi krama desa adat, krama tamiu, dan tamiu. Perda Desa Adat juga mengatur tentang bendesa adat yang dipilih oleh krama desa secara musyawarah mufakat, kewajiban melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan krama dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap lingkungan, serta melaksanakan pengelolaan sampah di wewidangan desa adat. **nat**

Edisi : Kamis, 4 April 2019

Hal : 1 dan 15